

**KAJIAN
EKONOMI REGIONAL
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Triwulan I - 2007

**Kantor Bank Indonesia
Padang**

KATA PENGANTAR

Kajian Ekonomi Regional Provinsi Sumatera Barat ini disusun secara triwulanan sebagai salah satu produk/output Bank Indonesia Padang. Dalam terbitan ini dibahas beberapa materi yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Bank Indonesia selaku otoritas moneter dalam merencanakan dan menerapkan kebijaksanaan moneter.

Cakupan materi dan sistematika pelaporan pada terbitan ini mengacu pada Petunjuk Umum Penelitian dan Pelaporan Ekonomi Regional serta format pelaporan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Bank Indonesia. Pada dasarnya yang dibahas adalah materi yang terkait langsung dengan tugas Bank Indonesia antara lain : perkembangan inflasi regional, kondisi ekonomi makro regional, perkembangan moneter, perbankan, dan sistem pembayaran regional, serta prospek perekonomian daerah. Data yang dianalisis adalah data selama triwulan I-2007 yang bersumber dari laporan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang disampaikan kepada Bank Indonesia, serta berbagai instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, Biro Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Dirjen Anggaran, dan lain-lain.

Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu hingga selesainya terbitan ini.

Padang, Mei 2007

ttd

C.Y. Boestal
Pemimpin

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB 1 KONDISI MAKRO EKONOMI	7
1.1. Umum	7
1.2. PDRB Dari Sisi Permintaan	8
1.2.1. Konsumsi	9
1.2.2. Investasi.....	10
1.2.3. Perdagangan Internasional.....	10
1.3. PDRB Dari Sisi Penawaran	13
1.3.1. Sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan	14
1.3.2. Sektor Industri Pengolahan	15
1.3.3. Sektor Perdagangan, Hotel & Restoran	17
1.3.4. Sektor Pengangkutan & Komunikasi	18
1.3.5. Sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	18
1.3.6. Sektor Jasa-jasa	19
1.4. Kondisi Ketenagakerjaan	20
<i>Boks :</i>	
▪ <i>Analisis Perekonomian Sumatera Barat Pasca Bencana Gempa Bumi</i>	
▪ <i>Analisis Komoditi Unggulan di Zona Padang</i>	
▪ <i>Analisis Daya Beli/Konsumsi Masyarakat Sumatera Barat</i>	
▪ <i>Investor Belanda Bangun Terowongan PT. OCS dan Pemko Padang Teken MoU</i>	
▪ <i>Ringkasan Eksekutif “Perekonomian Zona Padang Triwulan I-2007”</i>	
BAB 2 KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	21
2.1. Umum	21
2.2. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah.....	22
2.3. Realisasi Belanja Negara.....	23
2.3.1. Belanja Pemerintah Pusat.....	23
2.3.2. Belanja Untuk Daerah.....	25
<i>Boks :</i>	
▪ <i>Analisis DIPA Sumatera Barat Tahun 2007 : Semestinya Bisa Menjadi Kekuatan Ekonomi</i>	

BAB 3	INFLASI	26
3.1.	Umum	26
3.2.	Determinan Inflasi	27
3.3.	Perkembangan Inflasi Kota Padang, Nasional dan Kota-kota Di Provinsi Tetangga	28
3.4.	Inflasi Berdasarkan Kelompok Barang dan Jasa	30
3.5.	Komoditi dan Jasa Penyumbang Inflasi/Deflasi terbesar	37
	<i>Boks :</i>	
	▪ <i>Ironi di Provinsi Surplus Beras, "Harga Beras Masih Tinggi"</i>	
	▪ <i>Analisis Harga Beras di Zona Padang</i>	
BAB 4	PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN	39
4.1.	Perkembangan Perbankan	39
4.1.1.	Perkembangan Bank Umum	40
4.1.1.1.	Total Asset	41
4.1.1.2.	Penghimpun Dana	44
4.1.1.3.	Penyaluran Kredit	47
4.1.1.4.	Perkembangan Kolektibilitas dan Profitabilitas	46
4.1.1.5.	Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM)	48
4.1.2.	Perkembangan Bank Syariah	49
4.1.3.	Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat	50
4.2.	Asesmen Stabilitas Keuangan Daerah	51
4.2.1.	Asesmen Koperasi dan Rumah Tangga	52
4.2.1.1.	Resiko Kredit Korporasi	53
4.2.1.2.	Resiko Kredit Rumah Tangga	53
4.2.2.	Asesmen Perbankan	54
4.2.2.1.	Resiko Kredit	54
4.2.2.2.	Resiko Likuiditas	55
4.2.2.3.	Resiko Pasar	55
4.3.	Perkembangan Sistem Pembayaran	56
4.3.1.	Perkembangan Alat Pembayaran Tunai	56
4.3.1.1.	Perkembangan Aliran Uang Kas Masuk dan Keluar	56
4.3.1.2.	Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar	56
4.3.1.3.	Perkembangan Temuan Uang Palsu	57
4.3.2.	Perkembangan Alat Pembayaran Non Tunai	57
4.3.2.1.	Perkembangan Kliring Lokal	57
4.3.2.2.	Perkembangan Transaksi Relate Time Gross Settlement (RTGS)	58
	<i>Boks :</i>	
	▪ <i>Dampak Gempa Terhadap Perbankan Sumatera Barat</i>	
BAB 5	PROSPEK PEREKONOMIAN	59
5.1.	Prospek Ekonomi	59
5.2.	Proyeksi Inflasi	60
5.3.	Prospek Kegiatan Usaha Perbankan	61

DAFTAR TABEL

			Halaman
Tabel	1.1.	Struktur PDRB Sumatera Barat Menurut Jenis Penggunaan	8
Tabel	1.2.	Pertumbuhan PDRB Tahunan Sumatera Barat Menurut Jenis Penggunaan	8
Tabel	1.3.	Perkembangan Volume Beberapa Komoditas Ekspor Andalan Provinsi Sumbar menurut SITC 2 Digit.....	10
Tabel	1.5.	Perkembangan Nilai Ekspor Beberapa Komoditas Ekspor Andalan Provinsi Sumbar menurut SITC 2 Digit.....	11
Tabel	1.6.	Importasi barang Melalui KPBC Teluk Bayur.....	12
Tabel	1.7.	Pertumbuhan PDRB Tahunan Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha	13
Tabel	1.8.	Pertumbuhan PDRB Triwulanan Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha	13
Tabel	1.9.	Jumlah Wisatawan Asing, Tingkat Penghunian Hotel (TPH), dan Rerata Lama Menginap (RLM) Tamu Hotel	17
Tabel	1.10.	Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan	20
Tabel	2.1.	Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat	21
Tabel	2.2.	Perkembangan Penerimaan Perpajakan	22
Tabel	2.3.	Komposisi Penerimaan Perpajakan	23
Tabel	2.4.	Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat	23
Tabel	2.5.	Perkembangan Belanja Untuk Daerah	25
Tabel	3.1.	Perkembangan Inflasi Inti, Administered dan Food Kota Padang	28
Tabel	3.2.	Inflasi KBI Padang dan KBI-KBI dibawah Koordinasi KKBI Padang	29
Tabel	3.3.	Perkembangan Inflasi Padang Menurut Kelompok Barang	30
Tabel	3.4.	Perkembangan Inflasi Kelompok Bahan Makanan	31
Tabel	3.5.	Perkembangan Inflasi Kelompok Makan Jadi	32
Tabel	3.6.	Perkembangan Inflasi Kelompok Perumahan	33
Tabel	3.7.	Perkembangan Inflasi Kelompok Transportasi	34
Tabel	3.8.	Perkembangan Inflasi Kelompok Kesehatan	35
Tabel	3.9.	Perkembangan Inflasi Kelompok Pendidikan	35
Tabel	3.10.	Perkembangan Inflasi Kelompok Sandang	36
Tabel	3.11.	Komoditi Penyumbang Inflasi Terbesar terhadap Inflasi/Deflasi Kota Padang	37

Tabel	3.12.	Komoditi Penyumbang Deflasi Terbesar terhadap Inflasi/Deflasi Kota Padang	38
Tabel	4.1.	Komposisi Aktiva Produktif Bank Umum	41
Tabel	4.2.	Perkembangan Dana Bank Umum Menurut Kelompok Bank dan Jenis Pengguna	41
Tabel	4.3.	Struktur Deposito Bank Umum Menurut Jangka Waktu	43
Tabel	4.4.	Struktur Kepemilikan Dana Simpanan Bank Umum	43
Tabel	4.5.	Sebaran DPK Bank Umum Berdasarkan Lokasi Kantor Penghimpun Dana	44
Tabel	4.6.	Penyaluran Kredit Bank Umum Berdasarkan Lokasi Proyek	45
Tabel	4.7.	Sebaran kredit bank Umum dan LDR Berdasarkan Lokasi Proyek	46
Tabel	4.8.	Perkembangan Kolektibilitas Kredit/Pembiayaan Bank Umum	46
Tabel	4.9.	Sebaran NPLs Bank Umum Per Penggunaan dan Sektoral	47
Tabel	4.10.	Perkembangan Profitabilitas Bank Umum	47
Tabel	4.11.	Distribus Kredit/Pembiayaan Bank Umum Menurut BakiDebet.....	48
Tabel	4.12.	Penyaluran Kredit UMKM Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi	48
Tabel	4.13.	Sebaran NPLs UMKM Bank Umum Menurut Sektoral	49
Tabel	4.13a.	Indikator Perkembangan Bank Umum Syariah	50
Tabel	4.14.	Indikator Perkembangan BPR	51
Tabel	4.15	Perputaran Kliring dan Cek/BG Kosong	58
Tabel	4.16	Perkembangan Transaksi BI-RTGS Wilayah KBI Padang	58
Tabel	5.1.	Ekspektasi Kegiatan Usaha Menurut Survey Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Triwulan I-2007	59

DAFTAR GRAFIK

		Halaman
Grafik	1.1.	Pertumbuhan Ekonomi Prov. Sumatera Barat 7
Grafik	1.2.	Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga Sumbar (q-t-q) tahun 2005-2007 9
Grafik	1.3.	Struktur PDRB Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha..... 14
Grafik	1.4.	Outstanding Kredit Sektor Pertanian 15
Grafik	1.5.	Perkembangan Kredit Sektor Industri..... 16
Grafik	1.6.	Perkembangan Impor Bahan Baku dan Mesin berdasarkan SITC 2 Digit 16
Grafik	1.7.	Perkembangan Aset, Dana dan Kredit Perbankan Sumbar..... 19
Grafik	3.1.	Perkembangan Inflasi Kota Padang dan Nasional (q-t-q) 26
Grafik	3.2.	Perkembangan Inflasi Kota Padang dan Nasional (y-o-y) 27
Grafik	3.3.	Perkembangan Inflasi KBI Padang dan KBI-KBI dibawah Koordinasi KKBI Padang (q-t-q) 29
Grafik	4.1.	Perbandingan kegiatan Usaha Perbankan Sumbar da Nasional TW -IV-2006 39
Grafik	4.2.	Perkembangan Aktiva Bank Umum 40
Grafik	4.3.	Perkembangan Suku Bunga Simpanan 42
Grafik	4.4.	Perkembangan Suku Bunga Kredit & SBI-1 bulan 45
Grafik	4.5.	Perkembangan Persetujuan dan Realisasi Kredit/Pembiayaan baru Tahun 2006 45
Grafik	4.6.	Perkembangan Realisasi Kegiatan Usaha Provinsi Sumatera Barat 52
Grafik	4.7.	Perkembangan Indeks Kondisi Ekonomi 52
Grafik	4.8.	Hasil Survei Konsumen : Indeks Keyakinan & Ekspektasi Konsumen 53
Grafik	4.9.	Komposisi DPK Menurut Jangka Waktu 55
Grafik	4.10.	Perkembangan Suku Bunga kredit dan NPLs di Sumatera Barat 55
Grafik	4.11.	Perkembangan Aliran Uang Kas Masuk dan Keluar 56
Grafik	4.12.	Perkembangan Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (PTTB) 57
Grafik.	5.1.	Perkembangan Hasil Survei Konsumen Januari 2006 – April 2007 60
Grafik.	5.2.	Proyeksi Inflasi Sumbar 61

Grafik.	5.3.	Proyeksi Kredit	62
Grafik	5.4.	Proyeksi DPK	62

DAFTAR LAMPIRAN

- | | | |
|----------|---|--|
| Lampiran | 1 | PDRB Menurut Lapangan Usaha Propinsi Sumatera Barat Atas Dasar Harga Berlaku, 2005 – 2007 |
| Lampiran | 2 | PDRB Menurut Lapangan Usaha Propinsi Sumatera Barat Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, 2005-2007 |
| Lampiran | 3 | PDRB Menurut Penggunaan Propinsi Sumatera Barat Atas Dasar Harga Berlaku, 2004-2006 |
| Lampiran | 4 | PDRB Menurut Penggunaan Propinsi Sumatera Barat Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, 2004-2006 |
| Lampiran | 5 | Indeks Harga Konsumen Bulanan Kota Padang (2002=100) |
| Lampiran | 6 | IHK Kota Padang Berdasarkan Kelompok Barang & Jasa (Tahun Dasar 2002) |

Halaman ini sengaja dikosongkan

RINGKASAN EKSEKUTIF KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT TRIWULAN I - 2007

GAMBARAN UMUM

Perekonomian Sumatera Barat tumbuh melambat, sementara inflasi relatif terkendali.

Di saat perhatian segenap komponen serius terhadap perbaikan perekonomian Sumatera Barat, gempa bumi berkekuatan 5,8 Skala Richter mengguncang Sumatera Barat. Secara langsung maupun tak langsung gempa telah menyebabkan aktifitas perekonomian Sumatera Barat terganggu. Meskipun ekonomi Sumatera Barat pada Triwulan I tahun 2007, yang diukur dari kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetap tumbuh positif, namun dibandingkan triwulan yang sama di tahun 2006, pertumbuhan tersebut jauh melambat.

Bencana gempa bumi yang melanda beberapa daerah di Sumatera Barat pada tanggal 6 Maret 2007, secara umum belum mendorong inflasi ke level yang lebih tinggi. Hal ini ditandai dengan pergerakan tingkat harga-harga (q-t-q) di kota Padang yang menunjukkan arah penurunan pada triwulan I-2007 dibandingkan triwulan sebelumnya. Begitu pula dengan inflasi nasional, juga mengalami penurunan walaupun dengan slope yang lebih landai dari kota Padang.

Kegiatan usaha perbankan daerah meningkat dan stabilitas keuangan daerah masih terjaga.

Kegiatan usaha perbankan di Sumbang pada triwulan I-2007 secara umum menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan berbagai indikator seperti aset perbankan, dana yang dikumpulkan, maupun penyaluran kredit. Sementara itu, stabilitas sistem keuangan regional Sumbang secara umum masih terjaga, seperti terlihat dari perkembangan risiko-risiko pada sektor korporasi dan rumah tangga yang relatif terkendali, meski tekanan risiko kredit sedikit meningkat akibat gempa bumi 6 Maret 2007. Perkembangan lalu lintas pembayaran di Sumbang selama triwulan laporan di bidang pembayaran tunai menunjukkan penurunan aliran uang kas masuk maupun aliran uang kas keluar dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

KONDISI MAKROEKONOMI

Ekonomi Sumatera Barat triwulan I-2007 tumbuh sebesar 4,84% (y-o-y)

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada Triwulan I tahun 2007 yang diukur dari kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat 0,98% (q-t-q) dibandingkan triwulan IV tahun 2006. Kenaikan ini meski lebih tinggi daripada kenaikan triwulan sebelumnya sebesar 0,89% (q-t-q), namun jauh lebih kecil daripada pertumbuhan ekonomi secara nasional sebesar 2,00% (q-t-q). Apabila pertumbuhan ekonomi diukur secara tahunan, maka pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sebesar 4,84% (y-o-y), jauh dibawah pertumbuhan ekonomi nasional triwulan I tahun 2006 secara tahunan sebesar 6,0% (y-o-y).

Dari sisi permintaan, pertumbuhan positif terjadi pada semua jenis penggunaan.

Dari sisi permintaan, konsumsi tetap merupakan penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Kondisi ini tidak bergeser sejak beberapa tahun ke belakang. Pangsa konsumsi mencapai 66,80% terdiri dari konsumsi rumah tangga sebesar 54,98% dan konsumsi pemerintah sebesar 11,82%. Dari sisi pertumbuhan tahunan, terjadi penurunan pertumbuhan tahunan dari semua jenis penggunaan kecuali impor. Konsumsi mengalami perlambatan dari 2,85% (y-o-y) pada triwulan IV tahun 2006 menjadi 2,37% (y-o-y). Investasi juga menurun dari 2,80% (y-o-y) menjadi 2,04% (y-o-y).

Melambatnya pertumbuhan konsumsi merupakan pola musiman triwulan I. Biasanya di triwulan I konsumsi akan menurun seiring dengan penurunan konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Pada triwulan I, konsumsi rumah tangga cenderung "normal" setelah mengalami peningkatan konsumsi di triwulan IV akibat adanya perayaan hari raya keagamaan. Sementara untuk konsumsi pemerintah, realisasi belanja APBD hanya berupa pengeluaran rutin. Belanja modal/investasi biasanya berlangsung pada triwulan III dan IV. Kondisi konsumsi triwulan I-2007 diperparah dengan adanya gempa bumi 6 Maret 2007. Gempa menyebabkan

pertumbuhan konsumsi rumah tangga baik makanan maupun non makanan mengalami pertumbuhan negatif.

Dari sisi penawaran, pertumbuhan positif terjadi pada semua sektor ekonomi.

Pada sisi penawaran, sektor pertanian masih merupakan sektor dominan dengan kontribusi pada triwulan I-2007 sebesar 24,66%. Kontribusi terbesar berikutnya berasal dari sektor perdagangan, hotel & restoran, dengan kontribusi sebesar 18,31%, dan secara berturut-turut kontribusi sektor lainnya adalah sektor jasa-jasa (16,13%), sektor pengangkutan & komunikasi (13,39%), dan sektor industri pengolahan (13,00%). Sementara itu kontribusi sektor lainnya seperti sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor bangunan, serta listrik masing-masing masih dibawah 6%.

Dilihat dari pertumbuhan tahunan (*y-o-y*), semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif. Sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada triwulan I-2007, dengan pertumbuhan mencapai 7,29% (*y-o-y*). Sektor lain yang tumbuh di atas angka 5% adalah sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 7,29%, sektor perdagangan, hotel & restoran sebesar 6,40%, dan sektor bangunan/konstruksi sebesar 6,05%. Sementara itu sektor jasa-jasa, sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor pertambangan & penggalian dan sektor listrik, gas & air tumbuh tidak lebih dari 4,5%.

KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Analisis keuangan daerah pada laporan ini hanya meliputi pelaksanaan APBN yang berada di wilayah Sumatera Barat untuk periode yang berakhir tanggal 31 Maret 2007 yang bersumber dari Laporan Arus Kas Per MAK/MAP yang dirilis Kantor Wilayah III Direktorat Jenderal Perbendaharaan Padang. Secara umum realisasi pendapatan dan belanja negara di wilayah Sumbar mengalami kenaikan.

Realisasi pendapatan negara di Sumbar meningkat.

Realisasi pendapatan negara dan hibah di wilayah Sumbar meningkat 30,65%. Pertumbuhan ini terjadi baik pada penerimaan perpajakan sebesar 30,34% maupun penerimaan negara bukan pajak sebesar 35,48%. Sementara itu, belanja negara juga mengalami kenaikan meski dengan presentase yang lebih kecil. Pada triwulan ini, realisasi belanja negara di wilayah Sumatera Barat mencapai Rp 2,319 triliun atau lebih tinggi Rp 224,277 miliar dibandingkan triwulan I tahun sebelumnya. Kenaikan belanja negara ini terutama terjadi pada belanja daerah sebesar 12,62%, sedangkan belanja pemerintah pusat hanya mengalami kenaikan sebesar 2,09%.

Penerimaan perpajakan di Sumbar mencapai 30,34%.

Penerimaan perpajakan di wilayah Sumatera Barat meningkat cukup tinggi sebesar 30,34%. Pada triwulan I-2007, penerimaan perpajakan bersih mencapai Rp 350,72 miliar atau naik sebesar Rp 81,64 miliar dibandingkan triwulan I-2006. Kenaikan penerimaan pajak tersebut terjadi karena peningkatan penerimaan pajak (kotor) sebesar 21,83% sementara terjadi penurunan pengembalian (*restitusi*) pajak sebesar 55,76%. Peningkatan tertinggi terjadi pada penerimaan Bea Masuk sebesar 176,56% dari Rp 4,07 miliar pada triwulan I-2006 menjadi Rp 11,26 miliar pada triwulan laporan.

Realisasi belanja mencapai Rp389,39 miliar.

Realisasi belanja pemerintah pusat di wilayah Sumatera Barat sampai dengan triwulan I-2007 mencapai Rp 389,39 miliar atau meningkat sebesar 3,41% dibandingkan triwulan I-2006. Seperti triwulan I-2006, pada triwulan laporan belanja pemerintah pusat didominasi dengan belanja pegawai dengan nilai Rp 259,72 miliar dengan sumbangan sebesar 66,70% dari total belanja pemerintah pusat. Kenaikan gaji PNS sebesar 15% dari gaji pokok mulai 1 Januari 2007 membuat belanja gaji dan tunjangan pegawai mengalami kenaikan dari Rp 184,46 miliar menjadi Rp 237,52 miliar.

INFLASI

Bencana gempa bumi yang melanda beberapa daerah di Sumatera Barat pada tanggal 6 Maret 2007, secara umum belum mendorong inflasi ke level yang lebih tinggi. Hal ini ditandai dengan pergerakan tingkat harga-harga di kota Padang yang menunjukkan arah penurunan pada triwulan I-2007 dibandingkan triwulan

sebelumnya. Begitu pula dengan inflasi nasional, juga mengalami penurunan walaupun dengan slope yang lebih landai dari kota Padang.

Kota Padang pada triwulan I-2007 mengalami inflasi sebesar 3,68% (q-t-q).

Inflasi kota Padang pada triwulan I-2007 tercatat sebesar 3,68% (q-t-q). Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 5,07% (q-t-q). Walaupun menurun, inflasi kota Padang tersebut masih lebih tinggi apabila dibandingkan inflasi nasional pada triwulan I-2007 yang tercatat sebesar 1,91% (q-t-q). Laju inflasi kota Padang hingga Maret 2007, mencapai 3,68% (y-t-d), lebih tinggi dibandingkan laju inflasi nasional yang tercatat sebesar 1,91%.

Inflasi inti (core inflation) kota Padang tercatat sebesar 8,20% (y-o-y).

Berdasarkan determinannya, inflasi inti (*core inflation*), pada triwulan I-2007 relatif terkendali pada level 1 digit, sementara inflasi non inti (*non core inflation*) bergerak lebih cepat memasuki level 2 digit. Inflasi inti (*core inflation*) kota Padang tercatat sebesar 8,20% (y-o-y) dengan sumbangan sebesar 3,68%, sementara inflasi non inti (*non core inflation*) sebesar 12,79% (y-o-y) dengan sumbangan sebesar 7,05%.

Kelompok bahan makanan mengalami inflasi tertinggi.

Berdasarkan kelompok barang & jasa (q-t-q), semua kelompok barang & jasa mengalami inflasi. Seperti halnya triwulan IV-2006, inflasi tertinggi terjadi pada kelompok bahan makanan sebesar 8,88% (sumb. inflasi 2,84%), disusul kemudian kelompok makanan jadi sebesar 2,63% (sumb. inflasi 0,45%). Selanjutnya secara berturut-turut pada kelompok sandang sebesar 1,16% (sumb. inflasi 0,08%), kelompok perumahan sebesar 0,99% (sumb. inflasi 0,19%), kelompok transportasi inflasi sebesar 0,50% (sumb. inflasi 0,08%), kelompok pendidikan sebesar 0,46% (sumb. inflasi 0,03%), dan kelompok kesehatan sebesar 0,40% dengan sumbangan inflasi sebesar 0,01%.

PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

Kegiatan usaha perbankan Sumatera Barat triwulan I-2007 menunjukkan peningkatan.

Kegiatan usaha perbankan di Sumbar pada triwulan I-2007 secara umum menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan berbagai indikator seperti aset perbankan, dana yang dikumpulkan, maupun penyaluran kredit. Sementara itu, stabilitas sistem keuangan regional Sumbar secara umum masih terjaga, seperti terlihat dari perkembangan risiko-risiko pada sektor korporasi dan rumah tangga yang relatif terkendali, meski tekanan risiko kredit sedikit meningkat akibat gempa bumi 6 Maret 2007.

Total aset bank umum di Provinsi Sumbar pada triwulan I-2007 tercatat sebesar Rp16,44 triliun, naik sebesar Rp568 miliar (3,58%) dibandingkan posisi triwulan sebelumnya. Peningkatan aset terjadi pada semua kelompok bank dengan pertumbuhan tertinggi dialami oleh kelompok bank pemerintah sebesar 4,16%. Berdasarkan pangsa, kelompok bank pemerintah mempunyai pangsa terbesar yakni sebesar 80,44%. Sedangkan pangsa bank syariah masih yang terkecil yaitu sebesar 2,85%.

Dana masyarakat yang berhasil dihimpun bank umum di Sumbar pada triwulan I-2007 hanya mencapai Rp11,42 triliun, turun sebesar Rp7,4 miliar (0,06%) dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya. Penurunan terjadi terutama pada tabungan yang menurun 7,99%. Sebelumnya, tabungan meningkat cukup tinggi sebesar 21,35% pada triwulan IV-2006. Sementara itu, simpanan berjangka mengalami peningkatan sebesar 6,81% dan giro juga meningkat 4,47%.

Nilai kredit yang disalurkan oleh bank umum untuk proyek yang berlokasi di Sumbar hingga posisi triwulan laporan mencapai Rp10,97 triliun, meningkat Rp355,5 miliar (3,35%) dibandingkan posisi triwulan IV-2006. Pertumbuhan tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan pertumbuhan kredit pada triwulan sebelumnya sebesar 5,47%.

Nilai kredit berskala mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang disalurkan bank umum Sumbar pada triwulan I-2007 mencapai Rp6.885 miliar atau meningkat 5,5% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Peningkatan kredit UMKM tertinggi terjadi pada kredit skala mikro (7,13%), kemudian kredit berskala kecil (5,61%).

Pangsa kredit UMKM bank umum di Sumbar mencapai 74,39% dari total kredit, meningkat dari pangsa UMKM triwulan sebelumnya sebesar 73,05%. Berdasarkan kelompok baki debetnya, alokasi kredit terbesar disalurkan untuk usaha mikro dengan pangsa 38,98%. Sedangkan pangsa kredit berskala besar (korporat) sebesar 25,61%.

Kegiatan usaha BPR Sumbar triwulan I-2007 mengalami pertumbuhan positif.

Secara umum, indikator-indikator perkembangan kegiatan usaha BPR pada triwulan laporan tetap mengalami pertumbuhan meskipun dari sisi dana yang dihimpun mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Total asset BPR di Sumbar pada triwulan I-2007 mengalami peningkatan sebesar 5,25% menjadi Rp592,61 miliar. Pada periode yang sama, posisi penghimpunan dana BPR tercatat sebesar Rp369,23 miliar atau naik 6,36% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Baik tabungan maupun deposito mengalami pertumbuhan positif masing-masing sebesar 3,74% dan 9,77%.

Meski terjadi penurunan dalam pertumbuhan dana, namun kredit yang disalurkan BPR justru tumbuh lebih tinggi daripada triwulan sebelum mencapai 8,82% menjadi Rp423,88 miliar di triwulan I-2007. Menurut lapangan usaha, peningkatan kredit dialami oleh semua sektor ekonomi dengan pertumbuhan kredit tertinggi terjadi pada sektor pertanian (15,28%). Sektor perdagangan juga tumbuh cukup tinggi sebesar 5,90%. Menurut jenis penggunaan, pertumbuhan kredit tertinggi dialami kredit konsumsi (14,34%) diikuti oleh kredit investasi (13,32%) dan kredit modal kerja (6,16%).

Secara umum transaksi tunai menunjukkan penurunan.

Perkembangan lalu lintas pembayaran di Sumbar selama triwulan laporan di bidang pembayaran tunai menunjukkan penurunan aliran uang kas masuk maupun aliran uang kas keluar dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal yang sama juga terjadi pada transaksi non-tunai. Selama triwulan I-2007, kegiatan transaksi tunai melalui Bank Indonesia Padang menunjukkan penurunan aliran uang kas masuk (*cash-inflow*) maupun aliran uang kas keluar (*cash-outflow*). Aliran kas masuk ke Bank Indonesia Padang (*cash-inflow*) turun 32% menjadi Rp1.516 miliar. Sementara itu, aliran uang kas keluar dari Bank Indonesia Padang (*cash-outflow*) menurun tajam 88% sebesar Rp1.363 miliar dibanding triwulan sebelumnya. Dengan perkembangan tersebut, aliran uang kas masuk bersih (*net-inflow*) pada triwulan laporan sebesar Rp1.335 miliar, tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV-2006 sebesar Rp693 miliar.

Transaksi menggunakan kliring lokal wilayah KBI Padang dalam triwulan laporan mengalami kenaikan di sisi volume namun turun secara nominalnya. Volume kliring naik 5,3% menjadi 93 ribu lembar dengan nilai transaksi menurun 0,1% menjadi Rp2.284,6 miliar. Bila dilihat secara rata-rata harian, warkat kliring yang berhasil diproses pada triwulan I-2007 tercatat sebanyak 1.476 lembar per hari dengan rata-rata nilai transaksi per harinya mencapai Rp36 miliar. Perkembangan transaksi menggunakan sarana BI-RTGS di Kantor BI Padang pada triwulan I-2007 menunjukkan baik transaksi masuk maupun transaksi keluar mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Untuk transfer masuk ke Sumbar melalui BI-RTGS, nilai transaksi turun sebesar 28,71% menjadi Rp7.046 miliar sementara volume transfer juga menurun 14,24% menjadi 6.563 transaksi. Sementara untuk transfer keluar dari Sumbar, nilai transaksi menurun sebesar 19,87% menjadi Rp7.060 miliar sementara volume transaksi turun 16,17% menjadi 7.173 transaksi.

PROSPEK PEREKONOMIAN SUMATERA BARAT

Pertumbuhan ekonomi Sumbar pada triwulan II-2007 diperkirakan sedikit lebih tinggi dari triwulan I-2007.

Berdasarkan evaluasi perkembangan ekonomi, moneter, perbankan dan sistem pembayaran serta kondisi makro ekonomi nasional, kegiatan perekonomian Sumatera Barat pada triwulan II-2007 diprediksikan mengalami pertumbuhan yang positif dengan pertumbuhan yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I-2007. Menurut proyeksi Bank Indonesia Padang, perekonomian Sumatera Barat diperkirakan tumbuh antara 1,00-2,00% (q-t-q) pada triwulan II-2007.

Perkiraan ini dikonfirmasi oleh hasil survei kegiatan dunia usaha (SKDU) yang menunjukkan ekspektasi positif responden untuk kegiatan usaha di triwulan II-

2007. Menurut kalangan dunia usaha di Sumbar semua sektor diperkirakan mengalami peningkatan usaha kecuali sektor pengangkutan dengan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 13,14. Sektor pertanian diperkirakan mengalami peningkatan usaha tertinggi dengan SBT sebesar 5,35. Sektor bangunan juga diperkirakan akan mengalami peningkatan usaha dengan meningkatnya permintaan untuk recovery pasca gempa.

Inflasi triwulan II-2007 diperkirakan lebih rendah dibanding triwulan laporan.

Laju inflasi kota Padang triwulan II-2007 diperkirakan akan lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I-2007. Berdasarkan proyeksi Bank Indonesia Padang, inflasi pada triwulan II-2007 diperkirakan berkisar antara 1,50% s.d. 2,50% (q-t-q). Deflasi yang terjadi pada bulan April 2007 (m-t-m) diprediksi masih akan berlanjut dalam level yang lebih rendah hingga bulan Juni 2007. Tekanan yang mungkin terjadi yaitu pada komoditi kelompok sandang dan kelompok pendidikan mengingat tahun ajaran baru dimulai pada akhir triwulan II hingga triwulan III.

Kinerja perbankan triwulan II-2007 diperkirakan kembali meningkat dibanding triwulan laporan.

Kegiatan perbankan di Sumatera Barat pada triwulan II-2007 diperkirakan kembali meningkat dengan pertumbuhan yang lebih tinggi daripada triwulan I-2007. Bank Indonesia Padang memproyeksikan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga pada triwulan II-2007 sebesar 6,00-8,00%. Pembukaan Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat pada bulan Mei 2007 diharapkan akan meningkatkan DPK perbankan syariah terutama bagi masyarakat Sumatera Barat yang terkenal agamis.

**TABEL RINGKASAN EKSEKUTIF
INDIKATOR EKONOMI DAN MONETER TRIWULANAN
SUMATERA BARAT**

INDIKATOR	2005	2006				2007
	Trw IV	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV	Trw I
MAKRO-EKONOMI REGIONAL						
Laju Inflasi (q-t-q)	11,25%	1,17%	0,71%	0,93%	5,07%	3,68%
Laju Inflasi (y-o-y)	20,47%	14,13%	16,47%	14,41%	8,05%	10,73%
IHK Bahan Makanan (qtq)	10,43%	-1,34%	-2,35%	-0,63%	12,59%	8,88%
IHK Makanan Jadi (qtq)	5,72%	5,43%	0,05%	2,98%	4,14%	2,63%
IHK Perumahan (qtq)	8,22%	2,29%	4,82%	1,15%	1,74%	0,99%
IHK Sandang (qtq)	4,23%	0,55%	5,28%	0,80%	2,06%	1,16%
IHK Kesehatan (qtq)	8,25%	5,52%	-0,18%	0,32%	1,56%	0,40%
IHK Pendidikan (qtq)	2,30%	0,11%	1,57%	5,46%	0,34%	0,46%
IHK Transport (qtq)	30,61%	0,48%	0,31%	0,10%	0,17%	0,50%
Pertumbuhan PDRB (q-t-q) *	1,94%	1,21%	1,33%	1,56%	0,89%	0,98%
Pertumbuhan PDRB (y-o-y) *	6,61%	6,82%	6,60%	6,11%	5,08%	4,84%
Ekspor (Ribuan USD) **	178.723	205.987	174.694	334.946	231.722	236.342
Impor (Ribuan USD) **	-	-	3.468	11.461	6.765	14.823
PERBANKAN (BANK UMUM)						
Aktiva (miliar Rp)	12.213,07	13.011,75	13.982,01	14.968,13	15.866,98	16.436,00
Deposito (miliar Rp)	2.785,10	3.114,56	3.250,82	3.463,80	3.229,26	3.449,10
Giro (miliar Rp)	2.265,00	2.582,21	2.899,05	3.132,30	3.437,50	3.591,00
Tabungan (miliar Rp)	3.906,10	3.415,94	3.600,62	3.926,10	4.764,46	4.383,70
DPK berdasarkan lokasi kantor penghimpun dana (miliar Rp)	8.956,30	9.112,70	9.750,48	10.522,10	11.431,21	11.423,80
Kredit Umum berdasarkan lokasi proyek (miliar Rp)	9.515,80	9.830,88	9.865,35	10.067,20	10.618,05	10.973,70
Kredit UMKM (miliar Rp)	5.608,23	5.779,05	6.051,82	6.332,10	6.526,73	6.885,40
Suku Bunga Kredit (rerata akhir periode)	15,82	16,28	16,38	16,30	15,76	15,24
Suku Bunga Deposito 1 bln (rerata akhir periode)	10,08	10,37	10,19	9,88	8,66	8,00
NPLs	3,73%	4,00%	4,85%	4,95%	3,43%	3,48%
NIM	8,74%	2,28%	4,34%	6,21%	8,24%	2,00%
LDR	106,25%	107,88%	101,18%	95,68%	92,89%	96,10%
SISTEM PEMBAYARAN						
Cash Inflow (miliar Rp)	2.323,11	1.927,09	1.830,39	2.352,00	2.237,16	1.516,43
Cash Outflow (miliar Rp)	1.483,94	1.259,38	1.292,89	1.472,00	1.544,08	1.363,00
PTTB (nominal, miliar Rp)	668	576	739	930	878	1.295
Volume Kliring (lembar)	166.567	158.752	165.132	103.371	88.299	93.000
Nominal Kliring (miliar Rp)	3.586,50	3.135,61	3.168,99	2.401,90	2.286,40	2.284,60
Nominal Tranfer Masuk via RTGS (miliar Rp)	8.678,84	7.797,51	8.099,63	9.363,94	9.884,07	7.046,00
Nominal Tranfer Keluar via RTGS (miliar Rp)	8.995,02	10.369,32	8.988,58	8.568,11	8.810,63	7.060,00
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH***						
Pendapatan Asli Daerah (miliar Rp)	448,299	105,57	236,82	355,02	494,92	na
Dana Alokasi Umum (miliar Rp)	247,49	159,01	278,27	397,52	477,03	na
Dana Alokasi Khusus (miliar Rp)	-	-	-	-	-	na
Pengeluaran APBD (miliar Rp)	766,42	54,17	261,10	480,86	994,45	na

Keterangan :

* Tw.I-2007 angka sangat sementara, mulai Tw.I-2005 digunakan tahun dasar 2000

** Tw.I-2007 angka sementara, *open file data*.

*** Data triwulan I-2007 belum tersedia (analisis Keuangan Daerah berupa realisasi DIPA Sumbar)

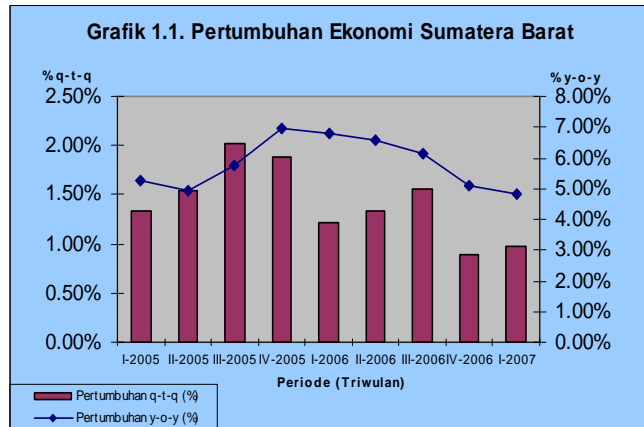
BAB 1

KONDISI MAKRO EKONOMI SUMATERA BARAT

1.1. Umum

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada Triwulan I tahun 2007 yang diukur dari kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat 0,98% (q-t-q)¹ dibandingkan triwulan IV tahun 2006. Kenaikan ini meski lebih tinggi daripada kenaikan triwulan sebelumnya sebesar 0,89% (q-t-q), namun jauh lebih kecil daripada pertumbuhan ekonomi secara nasional sebesar 2,00% (q-t-q). Apabila pertumbuhan ekonomi diukur secara tahunan, maka pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sebesar 4,84% (y-o-y), jauh dibawah pertumbuhan ekonomi nasional triwulan I tahun 2006 secara tahunan sebesar 6,00% (y-o-y).

Melambatnya pertumbuhan ekonomi Sumbar di triwulan I-2007 merupakan pola musiman triwulan I. Biasanya di triwulan I konsumsi akan menurun seiring dengan penurunan konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Pada triwulan I, konsumsi rumah tangga cenderung "normal" setelah mengalami peningkatan konsumsi di triwulan IV akibat adanya perayaan hari raya keagamaan. Sementara untuk konsumsi pemerintah, realisasi belanja APBD hanya berupa pengeluaran rutin. Belanja modal/investasi biasanya berlangsung pada triwulan III dan IV.



Kondisi konsumsi triwulan I-2007 diperparah dengan adanya gempa bumi 6 Maret 2007. Di tengah tekanan serius terhadap perekonomian Sumbar, gempa bumi berkekuatan 5,8 Skala Richter mengguncang Sumbar. Gempa yang berpusat di dekat Batusangkar mengakibatkan hampir 60% wilayah Sumbar mengalami kerusakan baik berat, sedang, maupun ringan. Perekonomian Sumbar untuk beberapa saat lumpuh karena banyak rumah, pasar, dan berbagai infrastruktur

¹ Terakhir BPS Sumatera Barat menyebutkan pertumbuhan ekonomi 0,95% (q-t-q)

rusak. Lebih dari 30 ribu bangunan meliputi fasilitas umum, rumah ibadah, kantor, sekolah, rumah, dan tempat usaha mengalami kerusakan. Nilai kerusakan akibat gempa diprediksi oleh Satkorlak Provinsi Sumbar mencapai Rp 1,5 triliun. Menurut ekonom Universitas Andalas, Dr. Syafruddin Karimi, gempa ini mengakibatkan kapasitas produktif perekonomian Sumbar berkurang. Efek lanjutannya adalah menurunnya laju pertumbuhan ekonomi sebesar 1,2%. Apabila kita bandingkan antara pertumbuhan ekonomi tahunan Sumbar triwulan I tahun 2006 sebesar 4,84% dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,00%, maka prediksi Dr. Karimi di atas mendekati kenyataan.

1.2. PDRB dari Sisi Permintaan

Dari sisi permintaan, konsumsi tetap merupakan penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Kondisi ini tidak bergeser sejak beberapa tahun ke belakang. Pangsa konsumsi mencapai 66,80% terdiri dari konsumsi rumah tangga sebesar 54,98% dan konsumsi pemerintah sebesar 11,82%.

Tabel 1.1.
Struktur PDRB Sumatera Barat Menurut Jenis Penggunaan

Jenis Penggunaan	I-2006	II-2006	III-2006	IV-2006	I-2007
Konsumsi	67.54	67.37	66.98	66.80	66.80
- Rumah Tangga	55.61	55.47	55.16	54.98	54.98
- Pemerintah	11.93	11.89	11.82	11.82	11.82
Investasi	18.25	18.12	18.03	18.04	18.04
Ekspor	21.07	20.85	21.60	22.35	22.35
Impor	5.79	5.78	5.80	5.84	5.84

Sumber Data : BPS

Masih tingginya harga internasional komoditas ekspor dari Sumbar seperti CPO dan karet membuat sumbangan ekspor terhadap PDRB mencapai angka 22,35%, sama seperti triwulan sebelumnya. Secara net, sumbangan ekspor netto juga masih tetap sama dengan triwulan IV-2006 yaitu 16,51%.

Bagaimana dengan sumbangan investasi? Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, sumbangan investas tidak mengalami perubahan pada angka 18,04%, namun bila dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya, terjadi penurunan share investasi sebesar 0,19% dari 18,25% menjadi 18,04%.

Tabel 1.2.
Pertumbuhan Tahunan PDRB Sumatera Barat Menurut Jenis Penggunaan

Jenis Penggunaan	I-2006	II-2006	III-2006	IV-2006	I-2007
Konsumsi	5.79	5.42	4.47	2.85	2.37
- Rumah Tangga	6.18	5.44	4.83	3.68	3.77
- Pemerintah	11.97	10.86	9.30	6.54	6.14
Investasi	5.20	4.42	3.72	2.80	2.04
Ekspor	17.16	12.93	12.18	14.56	14.51
Impor	24.83	17.15	10.80	5.21	5.62

Sumber Data : BPS

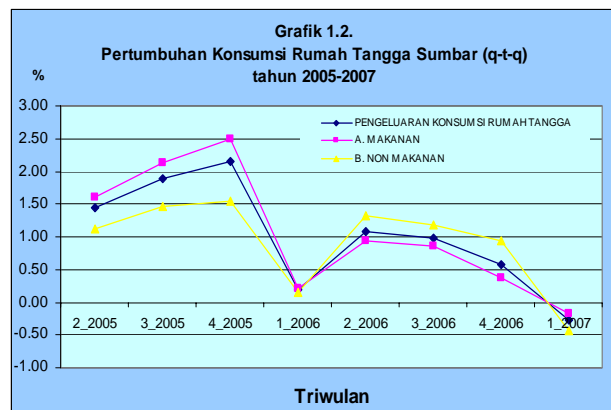
Dari sisi pertumbuhan tahunan, terjadi penurunan pertumbuhan tahunan dari semua jenis penggunaan kecuali impor. Sebagaimana terdapat pada tabel 1.2., konsumsi mengalami perlambatan dari 2,85 pada triwulan IV tahun 2006 menjadi

2,37%. Investasi juga menurun dari 2,80% menjadi 2,04%. Prediksi ekonom Unand Dr Karimi mengenai penurunan kapasitas produktif tercermin pada penurunan investasi ini. Kemudian, ekspor relatif stabil dengan pertumbuhan sebesar 14,51%. Lokasi produksi komoditas ekspor yang berada di Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Dharmasraya, dan Kabupaten Solok Selatan yang relatif tidak terkena gempa bumi membuat ekspor komoditas primer tetap stabil.

1.2.1. Konsumsi

Dari sisi konsumsi, kembali terjadi perlambatan pertumbuhan PDRB y-o-y. Sebagaimana terlihat pada tabel 1.2. Bila pada triwulan sebelumnya pertumbuhan konsumsi (y-o-y) tercatat 2,85%, pada triwulan laporan angka pertumbuhan (y-o-y) kembali turun hingga mencapai 2,37%. Kenaikan tipis konsumsi rumah tangga dari 3,68% pada triwulan IV-2006 menjadi 3,77% pada triwulan I-2007 tidak mampu meningkatkan PDRB konsumsi karena pertumbuhan konsumsi pemerintah justru turun dari 6,54% menjadi 6,14%. Hal ini merupakan pola musiman triwulan I. Biasanya di triwulan I konsumsi akan menurun seiring dengan penurunan konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah.

Sektor pemerintah ternyata tidak dapat mengimbangi lesunya perekonomian. Peningkatan transfer dana dari APBN dalam bentuk Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ternyata tidak dioptimalkan oleh pemerintah daerah. Masih terlambatnya pengesahan APBD beberapa pemerintah kabupaten/kota membuat pemerintah tidak dapat melakukan realisasi anggaran untuk meningkatkan konsumsi. Kondisi konsumsi triwulan I-2007 diperparah dengan adanya gempa bumi 6 Maret 2007. Gempa menyebabkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga baik makanan maupun non makanan mengalami pertumbuhan negatif.



1.2.2. Investasi

Pembentukan modal tetap bruto (PMTB), yang merupakan salah satu indikator investasi pada PDRB, mengalami pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 2,37% (*y-o-y*). Walaupun tumbuh positif, pertumbuhan tersebut lebih rendah dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,85% (*y-o-y*). Bahkan bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, pertumbuhan triwulan ini jauh merosot dari 5,20% pada triwulan I 2006.

Sementara itu, bila dibandingkan pertumbuhan investasi secara *q-t-q*, terjadi penurunan angka investasi. Bila pada triwulan sebelumnya investasi masih mengalami peningkatan sebesar 0,98% (*q-t-q*), maka pada triwulan laporan terjadi penurunan angka investasi sebesar 0,59% (*q-t-q*). Penurunan angka investasi ini juga didukung oleh data *outstanding* kredit perbankan untuk investasi. Pada triwulan ini, angka pertumbuhan *outstanding* kredit investasi menurun dari 18,14% (*q-t-q*) pada triwulan IV-2006 menjadi 0,69% (*q-t-q*).

Pertumbuhan investasi yang rendah ini diperkirakan berasal dari usaha yang sudah berjalan. Berdasarkan data dari *website* BKPM, tidak ada realisasi investasi PMDN maupun PMA selama bulan Januari-Maret 2007 di Sumatera Barat. Masih rendahnya angka investasi ini menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Barat belum menjadi tujuan investasi. Untuk menggairahkan iklim investasi di Sumatera Barat, pemerintah daerah perlu membuat terobosan, seperti misalnya mengurangi birokrasi/pengurusan perizinan, membentuk sistem *one stop service*, keringanan pajak, dll.

1.2.3. Perdagangan Internasional

Secara umum, posisi perdagangan internasional provinsi Sumatera Barat masih menunjukkan net ekspor yang positif. Komoditas ekspor utama Sumatera Barat melalui Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Teluk Bayur adalah komoditas primer seperti CPO, Kelapa Sawit, Karet Mentah, Coklat, Teh, serta Batu Bara. Sedangkan komoditas ekspor hasil industri manufaktur hanyalah produk semen.

Tabel 1.3.
Perkembangan Volume Beberapa Komoditas Ekspor Andalan Provinsi Sumbar
Menurut SITC 2 Digit

Komoditas	dalam ribuan Kg				
	Tw I 2006	Tw II 2006	Tw III 2006	Tw IV 2006	Tw I 2007
FIXED VEGETABLE OILS & FATS	245,596,207	225,541,089	371,786,254	426,391,294	236,385,966
CRUDE RUBBER	50,802,640	37,152,291	74,287,410	41,858,820	42,152,218
COFFEE, TEA, COCOA, SPICES	10,794,371	10,524,402	11,518,339	12,065,842	12,120,852
NON METALIC MINERALS MFS	130,183,738	408	262,849,127	722,558,869	370,885,452

Komoditas	dalam %				
	Tw I 2006	Tw II 2006	Tw III 2006	Tw IV 2006	Tw I 2007
FIXED VEGETABLE OILS & FATS		-8.17	64.84	14.69	-44.56
CRUDE RUBBER		-26.87	99.95	-43.65	0.70
COFFEE, TEA, COCOA, SPICES		-2.50	9.44	4.75	0.46
NON METALIC MINERALS MFS		-100.00	64,423,705.64	174.89	-48.67

Sumber: Ditjen Bea dan Cukai

Peningkatan share ekspor pada triwulan I-2007 dikonfirmasi dengan pertumbuhan ekspor tahunan yang cukup tinggi mencapai 14,51%, sebagaimana terdapat pada tabel 1.2. Hal yang perlu diwaspadai adalah meskipun mengalami pertumbuhan tertinggi, namun angka tersebut masih dibawah pencapaian triwulan sebelumnya sebesar 14,56%. Bahkan bila dibandingkan triwulan I-2006, terjadi penurunan pertumbuhan sebesar hampir 3%. Hal ini merupakan suatu yang kontradiktif dibalik semakin tingginya harga internasional beberapa komoditas primer.

Bila kita perhatikan perkembangan ekspor melalui Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Teluk Bayur pada tabel 1.3. dan 1.4., terjadi penurunan volume ekspor cukup drastis sebesar 44,56% pada kelompok komoditas *Fixed Vegetable Oils and Fats* dari 426 juta ton menjadi 236 juta ton. Hal serupa juga terjadi ekspor semen (kelompok *non metallic minerals mfs*) yang pada triwulan IV-2006 tercatat sebesar 722 juta ton menjadi hanya 370 juta ton. Dua komoditas ekspor lain seperti karet mentah dan kopi, teh, kakao, dan lada naik tipis dibawah 1%.

Tabel 1.5.
Perkembangan Nilai Ekspor Beberapa Komoditas Ekspor Andalan Provinsi Sumbar
Menurut SITC 2 Digit

Komoditas	dalam USD				
	Tw I 2006	Tw II 2006	Tw III 2006	Tw IV 2006	Tw I 2007
FIXED VEGETABLE OILS & FATS	91,638,475.00	87,118,018.00	148,315,334.00	184,764,477.00	121,898,118
CRUDE RUBBER	83,008,406.00	67,832,210.00	153,118,612.00	80,704,160.00	73,604,071
COFFEE, TEA, COCOA, SPICES	7,954,572.00	8,779,807.00	9,384,690.00	9,729,122.00	10,290,480
NON METALIC MINERALS MFS	4,866,748.00	552.00	9,293,256.00	26,844,052.00	14,342,605

Pertumbuhan Beberapa Komoditas Ekspor Andalan Provinsi Sumbar
Menurut SITC 2 Digit

Komoditas	dalam %			
	Tw II 2006	Tw III 2006	Tw IV 2006	Tw I 2007
FIXED VEGETABLE OILS & FATS	-4.93	70.25	24.58	-34.03
CRUDE RUBBER	-18.28	125.73	-47.29	-8.80
COFFEE, TEA, COCOA, SPICES	10.37	6.89	3.67	5.77
NON METALIC MINERALS MFS	-99.99	1,683,460.87	188.86	-46.57

Sumber: Ditjen Bea dan Cukai

Bila penurunan volume ekspor tersebut kita konfirmasi dengan penurunan nilai ekspor, ternyata nilai ekspor juga mengalami penurunan meskipun tidak sedrastis penurunan volume. Pada kelompok komoditas *Fixed Vegetable Oils and Fats*, penurunan nilai impor sebesar 34,03% masih dibawah penurunan volume impor sebesar 44,56%. Tingginya harga internasional CPO masih menolong kinerja ekspor CPO Sumbar dari sisi nilai ekspor. Hal sebaliknya terjadi pada kelompok komoditas *Crude Rubber*. Meskipun secara volume komoditas ini naik tipis sebesar 0,70%, namun secara nilai kelompok komoditas ini justru melorot cukup tinggi,

yaitu sebesar 8,80%. Hal ini menunjukkan harga karet internasional mulai menunjukkan penurunan.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, tren ekspor Sumatera Barat baik dari sisi nilai maupun volume menunjukkan penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Namun bila dibandingkan triwulan I-2006, nilai ekspor komoditas utama Sumbar masih lebih tinggi. Komoditas ekspor yang mengalami kenaikan adalah *fixed and vegetable oil, coffe, tea, cocoa, spices, dan non metallic mineral mfs* sedangkan *crude rubber* justru mengalami penurunan.

Pada triwulan I-2007, importasi melalui Sumatera Barat diwarnai dengan tingginya volume impor bahan pokok, pupuk, dan kertas bahan baku pengemas semen. Berdasarkan data dari Ditjen Bea dan Cukai, importasi pupuk baik pupuk alami maupun buatan mencapai 61 ribu ton atau 77% dari total volume impor. Importasi bahan pokok pada triwulan ini terdiri dari beras sebanyak 12 ribu ton dan gula sebanyak 2,2 ribu ton untuk menambah pasokan beras dan gula pasir di Sumatera Barat akibat kelangkaan kedua komoditi tersebut. Berdasarkan volume, impor mengalami penurunan sebesar 47,86%.

Seiring dengan penurunan volume, nilai impor melalui Sumatera Barat juga mengalami penurunan dengan angka yang lebih kecil daripada triwulan sebelumnya, 31,92%. Penurunan ini banyak terjadi pada impor pupuk buatan sebesar hampir 60%. Nilai Impor bahan penolong perkebunan sawit ini mengalami penurunan dari USD 9,1 juta menjadi USD 3,6 juta. Importasi mesin-mesin juga mengalami penurunan cukup drastis dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan ini, nilai impor mesin-mesin turun separuhnya dari USD 2,4 juta menjadi USD 1,2 juta. Sama halnya dengan pupuk buatan, nilai impor pupuk alami juga mengalami penurunan sebesar 27% dari USD 1,8 juta menjadi USD 1,3 juta.

Tabel 1.6.
Importasi Barang Melalui KPBC Teluk Bayur

5 Besar Komoditas Impor Melalui KPBC Teluk Bayur Berdasarkan Nilai Impor

Kelompok Barang Berdasarkan SITC 2 Digit	dalam USD				
	Tw I 2006	Tw II 2006	Tw III 2006	Tw IV 2006	Tw I 2007
04 - CEREAL & CEREAL PREPARATIONS	-	-	-	3,632,580	3,771,120
56 - FERTILIZERS MANUFACTURED	-	1,504,000	4,864,569	9,164,103	3,682,900
64 - PAPER,PAPERBOARD&MFD THEREOF	-	3,969	1,038,573	2,052,006	2,079,249
27 - CRD.FERTILIZERS&CRD.MINERALS	-	222,750	1,167,750	1,885,500	1,383,445
74 - GENERAL INDUSTRIAL MACH.&EQP	61,571	591,124	807,916	2,450,442	1,190,511
Total Nilai Impor	125,112	3,468,131	11,543,005	21,775,856	14,823,336

5 Besar Komoditas Impor Melalui KPBC Teluk Bayur Berdasarkan Volume Impor

Kelompok Barang Berdasarkan SITC 2 Digit	dalam Kg				
	Tw I 2006	Tw II 2006	Tw III 2006	Tw IV 2006	Tw I 2007
27 - CRD.FERTILIZERS&CRD.MINERALS	-	9,900,000	51,900,000	83,800,000	46,280,326
56 - FERTILIZERS MANUFACTURED	-	10,000,000	23,455,487	52,693,000	15,655,000
04 - CEREAL & CEREAL PREPARATIONS	-	-	-	12,000,000	12,000,000
64 - PAPER,PAPERBOARD&MFD THEREOF	-	538	1,485,950	2,974,324	2,993,323
06 - SUGAR, SUGAR PREP. AND HONEY	-	-	250,000	-	2,200,000
Total Volume Impor	19,950	20,613,420	79,492,383	153,201,007	79,871,644

Sumber: Ditjen Bea dan Cukai

1.3. PDRB Dari Sisi Penawaran

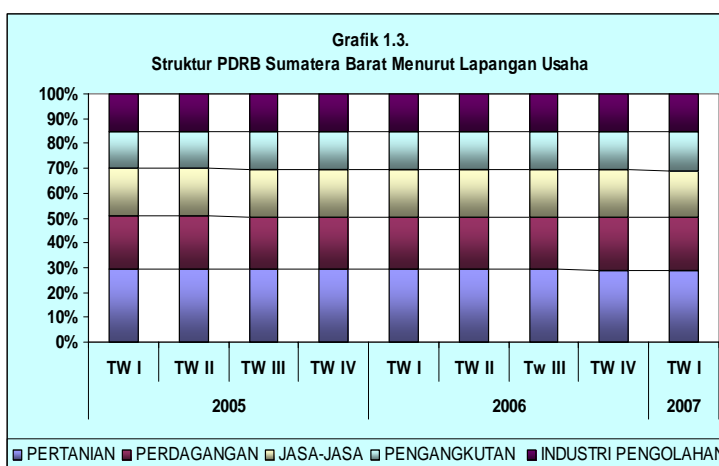
Pada sisi penawaran, sektor pertanian masih merupakan sektor dominan dengan kontribusi pada triwulan I-2007 sebesar 24,66%. Kontribusi terbesar berikutnya berasal dari sektor perdagangan, hotel & restoran, dengan kontribusi sebesar 18,31%, dan secara berturut-turut kontribusi sektor lainnya adalah sektor jasa-jasa (16,13%), sektor pengangkutan & komunikasi (13,39%), dan sektor industri pengolahan (13,00%). Sementara itu kontribusi sektor lainnya seperti sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor bangunan, serta listrik masing-masing masih dibawah 6%.

Dilihat dari pertumbuhan tahunan (*y-o-y*), semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif. Sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada triwulan I-2007, dengan pertumbuhan mencapai 7,29% (*y-o-y*). Sektor lain yang tumbuh di atas angka 5% adalah sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 7,29%, sektor perdagangan, hotel & restoran sebesar 6,40%, dan sektor bangunan/konstruksi sebesar 6,05%. Sementara itu sektor jasa-jasa, sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor pertambangan & penggalian dan sektor listrik, gas & air hanya tumbuh tidak lebih dari 4,5% (Tabel 1.7).

Tabel 1.7. Pertumbuhan PDRB Tahunan Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha						Tabel 1.8. Pertumbuhan PDRB Triwulanan Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha					
LAPANGAN USAHA	2006				2007	LAPANGAN USAHA	2006				2007
	TRW. I	TRW. II	TRW. III	TRW. IV	TRW. I		TRW. I	TRW. II	TRW. III	TRW. IV	TRW. I
Pertanian	6.99	6.59	6.03	3.86	3.28	Pertanian	0.95	1.12	1.44	0.30	0.39
Pertambangan	6.58	6.10	4.80	3.82	2.40	Pertambangan	1.48	1.11	0.66	0.52	0.10
Industri Pengolahan	8.72	8.57	5.95	3.83	3.11	Industri Pengolahan	1.37	0.76	1.11	0.54	0.67
Listrik, Gas, & Air Bersih	15.10	11.03	5.95	2.37	1.23	Listrik, Gas, & Air Bersih	1.68	1.09	(0.82)	0.42	0.55
Bangunan	7.35	7.48	6.12	6.41	6.05	Bangunan	1.20	2.25	1.36	1.45	0.86
Perdagangan, Hotel, Restoran	5.11	5.65	6.38	6.72	6.40	Perdagangan, Hotel, Restoran	1.66	1.84	2.03	1.04	1.35
Pengangkutan dan Komunikasi	10.21	8.39	7.92	6.86	7.29	Pengangkutan dan Komunikasi	1.46	1.23	1.99	2.02	1.86
Keuangan, Persewaan dan Jasa	6.10	7.10	7.99	7.85	7.91	Keuangan, Persewaan dan Jasa	1.32	2.53	2.62	1.17	1.37
Jasa-jasa	3.92	4.11	4.36	3.93	4.38	Perusahaan	0.65	1.05	1.32	0.86	1.10
PDRB	6.82	6.60	6.11	5.08	4.84	PDRB	1.21	1.33	1.56	0.89	0.98
Sumber Data : BPS						Sumber Data : BPS					

Sedikit berbeda dengan analisis pertumbuhan PDRB secara tahunan, bila dianalisa secara triwulanan pertumbuhan PDRB Sumbar berdasarkan sektor mengalami kenaikan tipis dari 0,89% pada triwulan IV-2006 menjadi 0,98% pada triwulan I-2007. Secara umum pertumbuhan masing-masing sektor masih didominasi oleh sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 1,86%, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 1,37%, dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 1,35%.

Analisis triwulanan ini dilakukan untuk mengetahui efek musiman atau akibat dari suatu *shock*. Mari kita cermati tabel 1.8. Pada triwulan yang sama tahun 2006, hampir semua sektor tumbuh di atas 1%. Hanya sektor pertanian dan jasa-jasa yang tumbuh di bawah



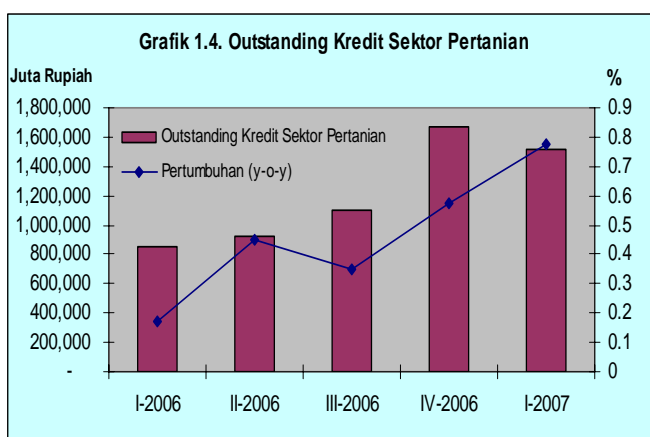
1%, masing-masing 0,95% dan 0,65%. Akibat berbagai bencana alam dan gempa bumi yang menimpa bumi Sumatera Barat, perekonomian sektoral mengalami perlambatan. Lima dari sembilan sektor usaha tumbuh di bawah 1%. Sektor tersebut adalah pertanian, pertambangan, industri pengolahan, listrik, air, dan gas, serta bangunan. Sementara 4 sektor lainnya seperti perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, dan jasa-jasa tumbuh di atas 1%. Mengingat sumbangan sektor pertanian dan industri pengolahan cukup tinggi terhadap pembentukan PDRB, maka pertumbuhan ekonomi Sumbar melorot drastis.

1.3.1 Sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Sektor pertanian, peternakan, dan perikanan pada triwulan I-2007 mengalami pertumbuhan sebesar 3,28% (y-o-y). Pertumbuhan PDRB sektor pertanian pada triwulan laporan tersebut merupakan yang terendah dibandingkan triwulan-triwulan sebelumnya. Bila dibandingkan triwulan IV-2006, pertumbuhan untuk semua subsektor mengalami perlambatan.

Subsektor tanaman pangan yang pada triwulan sebelumnya tumbuh 4,09% (y-o-y) pada triwulan laporan hanya tumbuh 3,33% (y-o-y). Subsektor perkebunan yang menjadi primadona ekspor Sumatera Barat juga hanya tumbuh 5,29%, turun 0,08% daripada triwulan sebelumnya. Sektor peternakan mencatat pertumbuhan sebesar 2,69% sedangkan sektor perikanan tumbuh 3,18%. Yang lebih parah adalah sektor kehutanan. Sektor ini kembali mengalami penurunan produksi hingga mencapai 3,43%.

Beberapa faktor diperkirakan mempengaruhi melambatnya pertumbuhan sektor pertanian ini antara lain faktor cuaca, bencana alam banjir, tanah longsor maupun gempa bumi, dan belum masuknya musim panen. Pada bulan Januari 2007, terjadi bencana banjir yang menimpa Kabupaten Limapuluh Kota seluas 685,5 hektar, Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 560 hektar, Kabupaten Solok seluas 143 hektar dan Kota Padang mencapai 51,75 hektar. Menurut Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura (Dispertahor) Sumbar Djoni sebagaimana dikutip dari Harian Padang Ekspres, bencana tersebut diperkirakan



akan mengganggu produksi tanaman padi mencapai 15-20 persen. Untuk mengantisipasi bencana banjir petani dianjurkan agar menanam tanaman padi sesuai dengan musim. Jika pada musim kering petani dianjurkan untuk tidak menanam tanaman padi namun menanam tanaman

palawija. Sedangkan pada musim hujan untuk menghindari musibah banjir di areal sawah, petani dianjurkan untuk tidak membiarkan saluran irigasi tersumbat dan membersihkan saluran-saluran air.

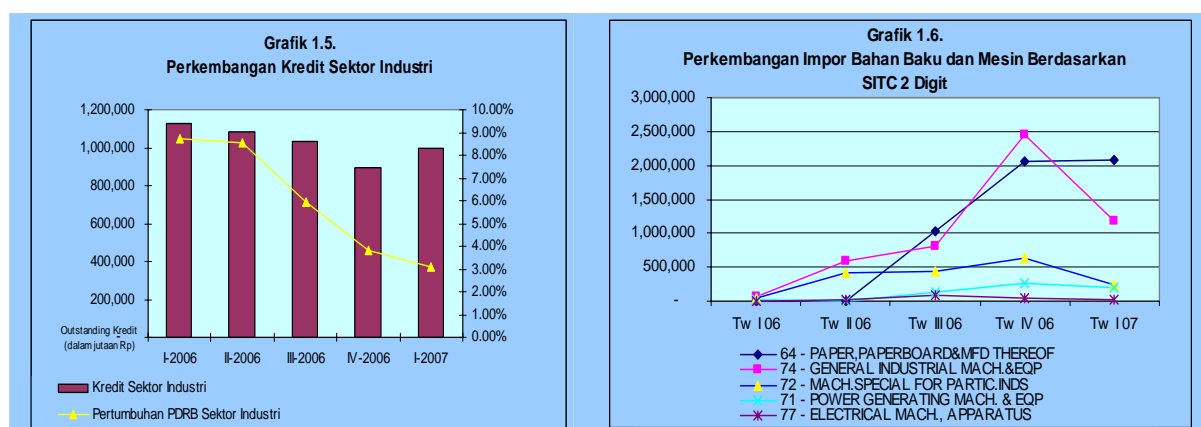
Meskipun demikian diperkirakan akan terjadi *rebound* pertumbuhan sektor pertanian pada triwulan berikutnya. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan outstanding kredit untuk sektor pertanian. Meskipun secara nominal outstanding kredit mengalami penurunan, namun pertumbuhan kredit sektor pertanian mengalami pertumbuhan sebesar 77,84%. Sebagaimana pidato Gubernur Bank Indonesia dalam Pertemuan Tahunan Perbankan 2007, kemiskinan umumnya berada di sektor pertanian. Oleh karenanya fokus perhatian pemerintah, baik pusat maupun daerah, hendaknya kepada pengembangan sektor pertanian yang menyentuh masyarakat banyak. Salah satu program yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat, yaitu revitalisasi sektor pertanian, hendaknya ditanggapi dan direspon dengan cepat oleh pihak-pihak terkait di daerah.

1.3.2 Sektor Industri Pengolahan

Sektor industri pengolahan Sumatera Barat kembali mengalami perlambatan pertumbuhan (y-o-y) pada triwulan I-2007. Pertumbuhan tahunan (y-

o-y) tercatat 3,11%, turun cukup tajam dari 3,83% pada triwulan sebelumnya, bahkan jauh sekali triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 8,72%. Turunnya pertumbuhan sektor industri ini terjadi pada hampir semua subsektor kecuali semen dan barang non logam.

Subsektor tekstil, barang kulit dan alas kaki yang pada triwulan sebelumnya tumbuh 4,33%, pada triwulan ini hanya tumbuh 2,64%. PDRB subsektor kertas dan barang cetakan tumbuh 2,80%, melambat 0,19% dari triwulan IV-2006 sebesar 2,99%. Sementara itu subsektor barang kayu dan hasil hutan kembali mengalami penurunan PDRB yang pada triwulan IV-2006 tercatat -3,75% menjadi -5,30%.



Penurunan kegiatan produksi di sektor industri ini dapat dihubungkan dengan penurunan *outstanding* kredit di sektor industri. Sebagaimana digambarkan pada grafik 1.5., Penurunan pertumbuhan PDRB di sektor Industri bergerak searah dengan *outstanding* kredit. Meskipun pada triwulan I, *outstanding* kredit mengalami peningkatan, namun kenaikan PDRB sektor industri tidak segera mengalami peningkatan. Faktor penyebab hal tersebut diduga karena ada faktor *lagged* dari kucuran kredit. Tidak serta merta produksi meningkat setelah kredit dikucurkan. Selain itu, faktor gempa bumi juga diperkirakan memberikan tekanan pada sektor industri. Gempa bumi yang melanda beberapa sentra industri di Bukittinggi, Agam, dan Padang Pariaman membuat beberapa subsektor industri mengalami tekanan seperti subsektor tekstil, subsektor makanan dan minuman, serta subsektor barang lainnya.

Impor bahan baku dan mesin-mesin juga mengalami penurunan pada triwulan laporan. Dapat kita lihat pada grafik 1.6, impor beberapa kelompok mesin industri dan bahan baku mengalami penurunan. Hanya impor kertas bahan baku pengemas semen yang masih stabil, sedangkan impor mesin-mesin industri

umum terjun bebas. Meskipun demikian pada triwulan II-2007 diharapkan terjadi perbaikan. Rencana pembangunan pabrik pakan ternak dan pabrik gula rafinasi di Padang Industrial Park diperkirakan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor industri.

1.3.3 Sektor Perdagangan, Hotel & Restoran

Di triwulan I-2007 sektor perdagangan, hotel & restoran mengalami pertumbuhan sebesar 6,40% (y-o-y). Pertumbuhan tersebut sedikit menurun dibandingkan pertumbuhan di triwulan IV-2006 yang tercatat sebesar 6,72% (y-o-y). Pertumbuhan yang terjadi pada sektor perdagangan, hotel & restoran disumbang dari pertumbuhan yang terjadi pada semua subsektornya yaitu subsektor perdagangan besar & eceran, subsektor hotel dan subsektor restoran yang masing-masing tumbuh sebesar 6,47%, 2,62%, dan 5,02%.

Beberapa hal diduga menjadi penyebab menurunnya performa sektor perdagangan sebagai salah satu sektor primadona perekonomian Sumbar. Gempa yang mengguncang lebih dari 60% wilayah Sumbar mengakibatkan beberapa pasar dan pusat perdagangan tidak beroperasi selama beberapa waktu. Tingginya harga beras pada triwulan ini juga mempengaruhi daya beli masyarakat. Tingginya harga beras memicu inflasi tahun berjalan provinsi Sumatera Barat hingga mencapai 3,68%.

Sementara itu, Kunjungan wisatawan asing ke Sumatera Barat selama triwulan I-2007 mencapai 5.808 wisatawan asing. Angka ini menurun 20,69% dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebanyak 7.323 wisatawan asing. Dari 15 pintu masuk, Sumatera Barat menduduki peringkat 8 pada akhir triwulan I-2007. Sampai dengan Februari 2007 rata-rata tingkat penghunian kamar hotel berbintang di Sumatera Barat sebesar 40,56% dengan rata-rata lama menginap sebesar 1,72%. Angka ini diprediksikan akan meningkat pada triwulan II 2007 seiring dengan adanya cuti bersama, liburan sekolah dan kembali meningkatnya kegiatan perekonomian (tabel 1.9).

Tabel 1.9. Jumlah Wisatawan Asing, Tingkat Penghunian Hotel (TPH) dan Rerata Lama Menginap (RLM) Tamu Hotel

Periode Waktu	Wisatawan Asing (orang)		Tingkat Penghunian Kamar (%)		Rerata Lama Menginap (hari)	
	Sumbar	15 Pintu Masuk	Sumbar	Rerata 10 DTW	Sumbar	Rerata 10 DTW
Tw.I-2006	6,051	871,817	39.84	43.40	2.00	2.28
Tw.II-2006	6,120	1,023,099	42.90	45.15	1.90	2.35
Tw.III-2006	5,416	1,038,857	42.78	47.21	1.82	2.31
Tw.IV-2006	7,323	1,043,709	37.36	44.13	1.86	2.22
Tw.I-2007	5,808	1,001,697	40.56	45.21	1.72	2.35

* Data Wisman s.d. Maret 2007, data TPK dan RLM s.d. Februari 2007

Sumber : BPS

1.3.4 Sektor Pengangkutan & Komunikasi

Pada triwulan I tahun 2007, sektor pengangkutan & komunikasi mengalami pertumbuhan positif sebesar 7,29% (y-o-y). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi daripada triwulan sebelumnya sebesar 6,86%. Meskipun demikian bila dibandingkan dengan pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi secara nasional, pertumbuhan sektor ini di Sumbar masih relatif tertinggal. Menurut data yang dilansir BPS 15 Mei 2007 yang lalu, sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh sangat tinggi, yaitu sebesar 11,1%.

Dilihat dari subsektornya, pertumbuhan pada triwulan laporan terutama disumbangkan subsektor komunikasi yang tumbuh sebesar 12,36% (y-o-y) sedangkan subsektor angkutan hanya meningkat sebesar 5,89%. Pertumbuhan pada subsektor angkutan terjadi pada angkutan udara sebesar 12,71%, angkutan sungai, danau & penyeberangan 7,27%, jalan raya sebesar 5,65% dan jasa penunjang angkutan sebesar 5,60%. Sementara itu, angkutan laut dan kereta api mengalami pertumbuhan negatif masing-masing sebesar -1,12% dan -2,87%.

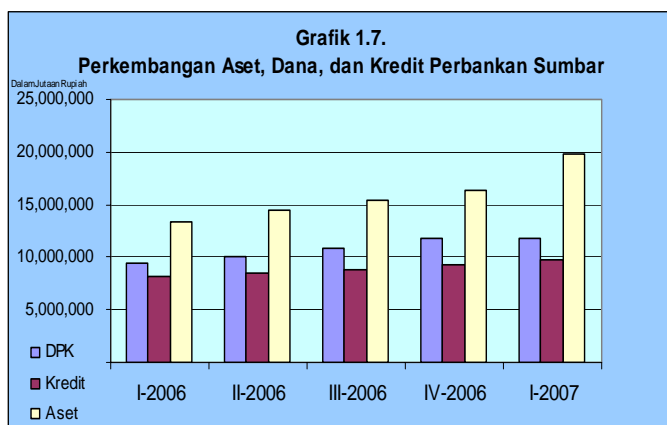
Pertumbuhan tahunan PDRB di subsektor komunikasi sebesar 12,36% seiring dengan perkembangan telekomunikasi seluler dan internet secara nasional. Beroperasinya CDMA dari PT Indosat Tbk di Kota Padang, Bukittinggi, dan Payakumbuh meningkatkan *traffic* komunikasi berbasis seluler. Selain itu, paket promo yang digelar para operator seluler dengan tarif murah pada jam-jam tertentu serta pemberian bonus pulsa meningkatkan jumlah pemakai telepon seluler. Tidak heran bila pada jam-jam tertentu telepon seluler beberapa operator sulit untuk digunakan karena padatnya *traffic*. Diperkirakan perkembangan sektor komunikasi ini akan berlanjut mengingat jaringan berbasis 3G dan HSDPA untuk akses *mobile internet* belum diluncurkan di Sumbar.

Pertumbuhan yang sama juga terjadi pada subsektor angkutan udara. Permintaan yang tinggi dari konsumen membuat Garuda Indonesia membuka kembali penerbangan malam ke Jakarta pada akhir bulan Desember 2006. Selain itu, Merpati juga membuka jalur baru Bandung-Padang yang terbang setiap akhir pekan.

1.3.5 Sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan

Sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan pada triwulan I-2007 tumbuh sebesar 7,91% (y-o-y). Pertumbuhan sektor ini pada triwulan laporan, sedikit lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan

sebelumnya yang tercatat sebesar 7,85% (y-o-y). Pertumbuhan sektor keuangan sebagian besar berasal dari pertumbuhan subsektor bank sebesar 10,45% (y-o-y), disusul kemudian subsektor sewa bangunan sebesar 6,94%, subsektor lembaga keuangan non bank sebesar 6,33%, dan subsektor jasa perusahaan sebesar 3,76%. Jika melihat pertumbuhan tersebut, sektor ini relatif tidak terkena dampak gempa bumi 6 Maret 2007.



Meningkatnya subsektor bank ditandai dengan meningkatnya aset, jumlah kredit yang diberikan dan dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun oleh kantor-kantor bank di Sumatera Barat. Kredit yang tersalurkan hingga triwulan I-2007 sebesar Rp9,6 triliun, sedangkan DPK

mencapai Rp11,86 triliun (grafik 1.7). Aset bank juga meningkat dari 16,4 triliun pada akhir triwulan IV-2006 menjadi 19,77 triliun pada posisi akhir triwulan I-2007. Membaiknya kinerja subsektor bank di Sumatera Barat terkait dengan kinerja bank secara nasional. Faktor perbaikan kondisi makro perekonomian nasional yang ditandai dengan stabilnya inflasi sehingga mendorong suku bunga kredit. Dilihat dari *loan to deposit ratio* (LDR), posisi LDR bank di Sumatera Barat mencapai 81,56%. Hal ini cukup baik dibandingkan dengan LDR nasional yang hanya berkisar pada angka 63%.

1.3.6 Sektor Jasa-jasa

Sektor jasa-jasa pada triwulan I-2007 tumbuh sebesar 4,38% (y-o-y). Pertumbuhan sektor ini pada triwulan laporan sedikit lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,93% (y-o-y). Pertumbuhan pada sektor jasa-jasa sebagian besar berasal dari subsektor pemerintahan umum & pertahanan yang meningkat sebesar 4,40% (y-o-y), sedangkan subsektor swasta tumbuh sebesar 4,35% (y-o-y). Pada subsektor swasta, jasa hiburan dan rekreasi meningkat 5,53%, jasa sosial kemasyarakatan 4,59%, dan jasa perorangan dan rumah tangga 3,95%.

Dibandingkan pada triwulan lalu, semua subsektor tersebut mengalami penurunan kecuali. Meningkatnya jasa-jasa pemerintahan umum dan pertahanan

mungkin disebabkan peran pemerintah dalam penanganan masalah gempa bumi dan beberapa bencana alam lainnya.

1.4. Kondisi Ketenagakerjaan

Pada periode triwulan I-2007, jumlah pencari kerja di Sumatera Barat mengalami penurunan. Pencari kerja yang terdaftar selama triwulan I-2007 tercatat sebanyak 3.690 orang, sementara pada periode triwulan IV-2006 pencari kerja yang terdaftar sebanyak 5.057 orang (Tabel 1.10). Dilihat dari siklusnya, pencari kerja di Sumatera Barat terbanyak terjadi pada periode triwulan II setiap tahunnya, mengingat pada periode tersebut merupakan saat selesainya periode pendidikan sekolah. Namun demikian, banyak pula pencari kerja yang baru mendaftarkan dirinya pada Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi setelah beberapa masa/bulan dari kelulusan/tamat sekolah.

Menurut tingkat pendidikan, jumlah pencari kerja pada periode triwulan I-2007 terbanyak berpendidikan tingkat SMA/SLTA sebanyak 2.224 orang (60,27%) dari total pencari kerja). Selanjutnya, pencari kerja terbanyak adalah tingkat Sarjana/S1 sebanyak 786 orang (20,37%), disusul kemudian D.I/D.II/D.III yaitu mencapai 430 orang (11,65%), dan SMP/SLTP sebanyak 173 orang (4,69%), tingkat SD sebanyak 77 orang (2,09%). Sementara itu, pencari kerja tidak tamat SD dan lulusan S2/S3 pada triwulan laporan tidak ada. Hingga triwulan I-2007, jumlah pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Sumatera Barat tercatat sebanyak 3.690 orang.

Tabel 1.10
Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar
Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Trw III 2006		Trw IV 2006		Trw I 2007	
	Jumlah	Share	Jumlah	Share	Jumlah	Share
Tidak Tamat SD	4	0.11%	0	0.00%	0	0.00%
SD	34	0.90%	17	0.34%	77	2.09%
SMP/SLTP	84	2.22%	118	2.33%	173	4.69%
SMA/SLTA	2653	70.19%	3247	64.21%	2224	60.27%
D.I/D.II/D.III	435	11.51%	645	12.75%	430	11.65%
Sarjana (S1)	570	15.08%	1030	20.37%	786	21.30%
S2/S3	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Total	3780	100.00%	5057	100.00%	3690	100.00%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja

Melihat komposisi pencari kerja yang mayoritas lulusan SMA/SLTA, kebijakan dinas terkait, seperti Dinas Pendidikan Nasional dan Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi, hendaknya disesuaikan dengan kualitas pencari kerja di tingkat SMA/SLTA. Umumnya lulusan SMA/SLTA belum matang untuk terjun ke dunia kerja. Perlu ditingkatkan keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) di tiap kabupaten dan kota yang memberi latihan keterampilan khusus bagi calon pencari kerja, sehingga kualitas pencari kerja dapat ditingkatkan tidak hanya untuk bekerja di perusahaan/pabrik namun juga diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri.

Analisis Perekonomian Sumatera Barat Pasca Bencana Gempa Bumi

Umum

Pasca gempa bumi tanggal 6 Maret 2007 yang melanda Sumatera Barat, para pakar dan pengamat ekonomi lokal memperkirakan dampak negatif yang cukup signifikan akan terjadi terhadap perekonomian Sumatera Barat. Hal tersebut didasarkan pada perkiraan kerugian materi yang mencapai angka Rp1,5 triliun berupa kerusakan dan kehancuran harta, bangunan rumah, gedung, sarana/fasilitas umum, dll.

Selain itu, gempa juga diperkirakan berdampak lanjutan terhadap angka inflasi yang akan mencuat tinggi terkait dengan melonjaknya permintaan barang-barang kebutuhan sehari-hari, seperti bahan pangan, sandang, peralatan masak, bahan bangunan, dll, untuk keperluan para korban gempa. Hal ini wajar mengingat antusias organisasi maupun individu yang ingin memberikan bantuan kepada para korban gempa sangatlah besar.

Hasil Analisis Berdasarkan Data-data

Analisis dilakukan terhadap data-data ekonomi yang dikeluarkan BPS Sumatera Barat seperti PDRB dan inflasi triwulan I-2007, data dari Bank Indonesia Padang seperti dana pihak ketiga, kredit dan sistem pembayaran. Secara teori pergerakan data-data tersebut dapat menyiratkan/menggambarkan suatu informasi aktifitas perekonomian di suatu daerah.

PDRB Sumatera Barat

Pertumbuhan PDRB Tahunan Sumatera Barat Menurut Sektor Ekonomi

Sektor Ekonomi	2004	2005	2006*				(y-o-y, dalam %)	
			Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV	2006*	2007**
1 Pertanian	8,85	5,13	6,99	6,59	6,03	3,86	5,84	3,28
2 Pertambangan & Penggalian	2,61	3,09	6,58	6,10	4,80	3,82	5,30	2,40
3 Industri Pengolahan	0,97	4,93	8,72	8,57	5,95	3,83	6,71	3,11
4 Listrik, Gas dan Air	12,71	12,51	15,10	11,03	5,95	2,37	8,39	1,23
5 Bangunan	4,82	4,69	7,35	7,48	6,12	6,41	6,83	6,05
6 Perdagangan, Hotel & Restoran	5,71	5,97	5,11	5,65	6,38	6,72	5,97	6,40
7 Pengangkutan dan Komunikasi	4,57	9,81	10,21	8,39	7,92	6,86	8,31	7,29
8 Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	7,33	6,33	6,10	7,10	7,99	7,85	7,27	7,91
9 Jasa-Jasa	3,96	4,21	3,92	4,11	4,36	3,93	4,08	4,38
	5,37	5,73	6,82	6,60	6,11	5,08	6,14	4,84

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, **angka sangat sementara

Pergerakan PDRB Sumatera Barat pasca gempa menunjukkan arah yang melambat dibandingkan triwulan sebelum gempa. Penurunan tercatat mencapai 0,24%, yaitu dari 5,08% (y-o-y) pada triwulan IV-2006 menjadi 4,84% (y-o-y) di triwulan I-2007. Meskipun melambat, perlambatan tersebut tidak semata-mata akibat gempa, namun juga faktor cuaca dan bencana lainnya yang menyebabkan beberapa sektor ekonomi mengalami perlambatan. Dilihat dari sektor ekonomi,

maka terdapat sektor-sektor yang mengalami perlambatan dan ada pula yang justru mengalami percepatan. Perlambatan terjadi pada sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas & air minum, sektor bangunan dan sektor perdagangan, hotel & restoran. Sementara itu, sektor pengangkutan & komunikasi, sektor keuangan dan sektor jasa-jasa mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2007.

Pada bulan Januari 2007, terjadi bencana banjir yang menimpa Kabupaten Limapuluh Kota seluas 685,5 hektar, Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 560 hektar, Kabupaten Solok seluas 143 hektar dan Kota Padang mencapai 51,75 hektar. Banjir tersebut diperkirakan mengganggu produksi tanaman padi mencapai 15-20 persen. Gempa diperkirakan berdampak langsung terhadap sektor bangunan. Rusak dan hancurnya bangunan, terutama rumah dan bangunan untuk komersial, tidak secara langsung diperbaiki atau dibangun kembali. Hal ini selain dikarenakan adanya kekhawatiran datangnya gempa susulan pasca gempa 6 Maret 2007, juga diperlukan dana yang tidak sedikit jumlahnya.

Pertumbuhan PDRB Tahunan Sumatera Barat Menurut Jenis Penggunaan

Jenis Penggunaan	2004	2005	2006*				(y-o-y, dalam %)	
			Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV	2006*	2007**
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6,35	4,85	6,82	6,60	4,47	2,85	5,15	1,39
A. Makanan	6,73	4,56	7,55	7,04	4,58	2,40	5,35	1,12
B. Non Makanan	5,65	5,36	5,53	5,82	4,27	3,66	4,81	1,88
2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	11,10	1,18	7,76	6,02	2,68	0,44	4,15	(0,31)
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,17	4,23	6,79	6,12	4,83	3,68	5,33	3,18
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,89	5,83	6,38	6,30	3,72	2,80	4,77	0,91
5 Perubahan Stok	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Ekspor Barang-barang dan Jasa-jasa	7,43	21,06	15,00	13,25	12,18	14,56	13,73	16,66
7 Dikurangi Impor Barang-barang dan Jasa-jasa	4,16	21,58	25,03	17,12	10,80	5,21	13,95	5,45
	5,37	5,73	6,82	6,60	6,11	5,08	6,14	4,84

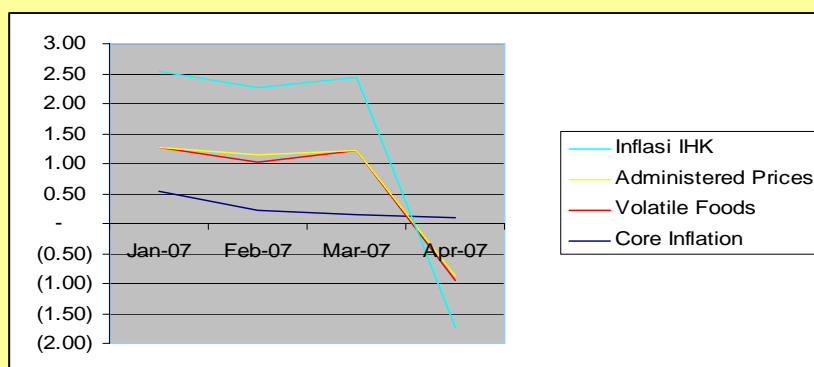
Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, **angka sangat sementara

Dari sisi permintaan, pertumbuhan konsumsi mengalami perlambatan bahkan tumbuh negatif. Konsumsi rumah tangga dan pemerintah tercatat melambat dengan pertumbuhan sebesar 1,39% (y-o-y) dan 3,18% (y-o-y). Sedangkan konsumsi lembaga swasta nirlaba tumbuh negatif sebesar 0,31% (y-o-y). Begitu pula dengan pertumbuhan investasi yang terpukul hingga 0,91% (y-o-y) pada triwulan I-2007. Padahal di triwulan I-2006 bisa mencapai 6,38% (y-o-y).

Melambatnya pertumbuhan konsumsi merupakan pola musiman. Pada triwulan I, konsumsi biasanya menurun seiring dengan penurunan konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Konsumsi RT yang biasanya meningkat di triwulan IV, akibat adanya perayaan hari raya keagamaan, memasuki triwulan I cenderung kembali "normal". Sementara itu, konsumsi pemerintah, yang dicerminkan dari realisasi belanja APBD, pada triwulan I biasanya baru berupa pengeluaran rutin, seperti untuk pembayaran gaji, listrik, telepon, dll. Namun rendahnya konsumsi triwulan I-2007 diperparah dengan adanya gempa bumi 6 Maret 2007. Gempa menyebabkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga, baik makanan maupun non makanan, mengalami pertumbuhan negatif. Rusaknya asset dan harta benda RT diperkirakan berdampak negatif terhadap daya beli RT.

Inflasi Kota Padang

Semula akibat gempa diprediksikan angka inflasi akan naik tinggi seiring dengan melonjaknya permintaan bahan pangan, sandang dan papan. Namun pasokan yang cukup dan relatif tetap lancarnya distribusi barang dapat mencegah kenaikan harga ke level yang lebih tinggi. Di bulan Maret 2007, secara m-t-m inflasi naik tipis dari bulan sebelumnya, yaitu dari 1,14% di bulan Februari 2007 menjadi 1,22%. Kenaikan angka inflasi tersebut lebih dikarenakan faktor kelangkaan beras yang memang terjadi secara nasional. Langkanya beras menaikkan harga beras hingga 20% dari harga 'normal'. Memasuki bulan April 2007, inflasi kota Padang cenderung turun hingga deflasi 0,87%. Efek negatif gempa terhadap harga-harga di kota Padang nampaknya tidak secara signifikan berpengaruh. Walaupun ada, itupun berlangsung dalam rentang waktu yang tidak lama.



Dilihat dari determinan inflasi, *core inflation* di bulan Maret 2007 relatif terjaga pada level dibawah 0,50%. Stabilitas *core inflation* berlangsung hingga bulan April 2007 dengan tren yang terus menurun. Sementara itu, inflasi *administered price* dan *volatile food* yang sempat berada pada level 1,3% di bulan Maret 2007, secara beriringan turun tajam di bulan April 2007 hingga deflasi 0,9%. Permintaan terhadap barang kategori bahan makanan yang kembali normal di bulan April 2007, dan pasokan/supply barang yang cukup memadai merupakan faktor penyebab deflasi di kota Padang.

Simpanan Masyarakat dan Kredit Bank

Dari laporan bulanan bank umum yang disampaikan ke Bank Indonesia Padang, Dana Pihak Ketiga (DPK) di bulan Maret 2007 mengalami perlambatan pada beberapa daerah gempa, seperti di Kab Agam, kota Padang, kota Padang Panjang, kota Payakumbuh, dan Kab Solok. Sementara itu, pada daerah yang terkena gempa lainnya, DPK justru mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dari bulan Februari 2007, yaitu di Kab 50 Kota, Kab Tanah Datar, kota Bukittinggi, dan kota Solok. Secara keseluruhan, DPK bank umum di Sumatera Barat pada bulan Maret 2007 tetap tumbuh positif, yaitu tumbuh sebesar 1,37% dari bulan Februari 2007.

**Perkembangan Dana Pihak Ketiga Berdasarkan Kepemilikan
Per Wilayah Kabupaten Kota Menurut Bank Pelapor**

Wilayah	Pertumbuhan Februari			Pertumbuhan Maret		
	Perush. Swasta	Perorangan	DPK Total	Perush. Swasta	Perorangan	DPK Total
Kab. Agam	-7,57%	-6,10%	5,49%	9,17%	4,38%	-4,78%
Kab. Padang Pariaman	-16,23%	-3,32%	-3,33%	-6,22%	-1,84%	-1,89%
Kota Padang	-9,60%	-1,36%	0,47%	1,37%	-2,56%	-0,22%
Kab. Limapuluh Koto	-10,40%	-2,59%	-3,41%	-26,93%	1,54%	2,75%
Kodya Solok	-61,82%	1,18%	-0,92%	63,23%	-0,74%	3,18%
Kodya Padangpanjang	-16,58%	-0,49%	4,93%	-9,42%	1,77%	3,23%
Kab. Tanah Datar	10,84%	-6,76%	2,35%	-58,23%	6,98%	3,58%
Kodya Payakumbuh	-8,17%	-23,92%	5,63%	-18,92%	26,08%	3,83%
Kota Bukittinggi	-10,30%	-0,93%	0,56%	-24,98%	1,96%	4,98%
Kab. Solok	9,41%	-3,59%	7,92%	-36,69%	-0,51%	6,59%
Kotif Pariaman	-29,17%	-8,91%	9,36%	8,16%	-6,05%	8,79%
Rata-Rata	-13,60%	-5,16%	2,64%	-9,04%	2,82%	2,73%

Sumber Data : LBU

Fenomena yang cukup menarik, yaitu pada beberapa wilayah yang terkena gempa, di bulan Maret 2007 justru terjadi kenaikan simpanan milik perorangan antara lain di Payakumbuh (26,08%), Tanah Datar (6,98%), Agam (4,38%), dan Bukittinggi (1,96%). Hal sebaliknya terjadi pada simpanan milik perusahaan swasta, terjadi penurunan cukup drastis di Tanah Datar (-58,23%), Kab. Solok (-36,69%), Kab. 50 Kota (-26,93%), Kota Bukittinggi (-24,98%), dan Kota Payakumbuh (-18,92%).

Meningkatnya simpanan perorangan dikarenakan adanya pemberian bantuan dana kepada individu/keluarga yang menjadi korban gempa, melalui sarana perbankan (transfer rekening/kliring). Penurunan pada simpanan/DPK milik perusahaan diduga digunakan/diambil untuk membiayai rehabilitasi pasca gempa, kalangan dunia usaha melakukan *self financing* dengan menggunakan simpanan yang mereka miliki di bank umum.

**Perkembangan Kredit Pasca Gempa 6 Maret 2007
Menurut Bank Pelapor**

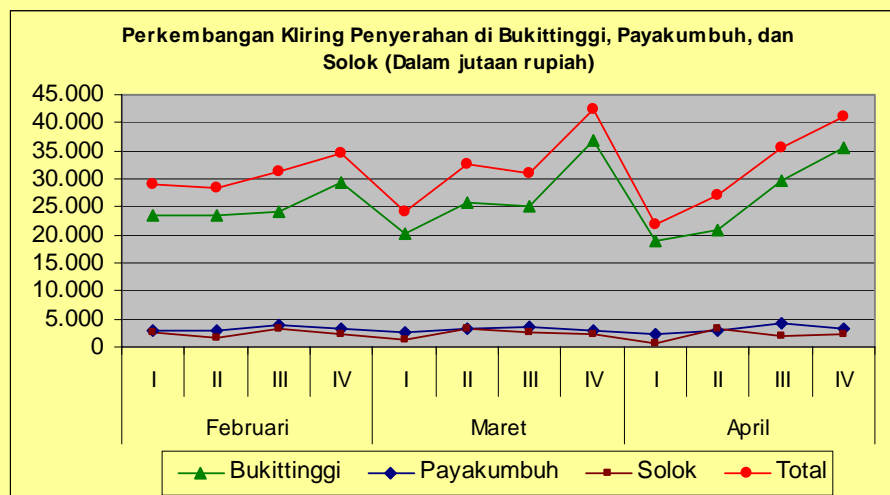
Wilayah	Pertumbuhan		Selisih
	Februari	Maret	
Kab. Agam	3,15%	4,46%	1,31%
Kab. Limapuluh Koto	2,19%	3,56%	1,38%
Kab. Solok	5,64%	7,89%	2,25%
Kab. Padang Pariaman	2,00%	1,31%	-0,68%
Kab. Tanah Datar	2,56%	4,04%	1,47%
Kota Bukittinggi	3,32%	3,39%	0,07%
Kota Padang	3,89%	3,79%	-0,10%
Kodya Padangpanjang	5,38%	3,13%	-2,25%
Kodya Solok	2,89%	3,91%	1,02%
Kodya Payakumbuh	4,20%	4,39%	0,20%
Kotif Pariaman	9,69%	4,64%	-5,05%

Sumber : LBU

Seperti halnya DPK, pertumbuhan kredit pasca gempa (posisi Maret 2007) pada beberapa daerah yang terkena gempa mengalami perlambatan, seperti di Kab Padang Pariaman, kota Padang, kota Padang Panjang dan kota Pariaman. Sementara itu, pada daerah yang terkena gempa lainnya, seperti Kab Agam, 50 Kota, Solok, Tanah Datar, kredit di bulan Maret 2007 justru mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dari bulan Februari 2007. Secara keseluruhan, kredit yang disalurkan bank umum di Sumatera Barat pada bulan Maret 2007 tetap tumbuh positif, yaitu tumbuh sebesar 3,82% dari bulan Februari 2007.

Sistem Pembayaran

Pasca gempa, di minggu kedua Maret 2007 terjadi kenaikan jumlah nominal kliring penyerahan hingga mencapai 35,44%. Sementara itu, pada bulan April 2007 nilai nominal kliring penyerahan terus mengalami peningkatan dari minggu I sampai dengan minggu IV hingga mencapai Rp41 miliar. Peningkatan tersebut diduga karena banyaknya transfer dana dalam rangka penyaluran bantuan finansial, baik dari organisasi/lembaga maupun individu.



Kesimpulan

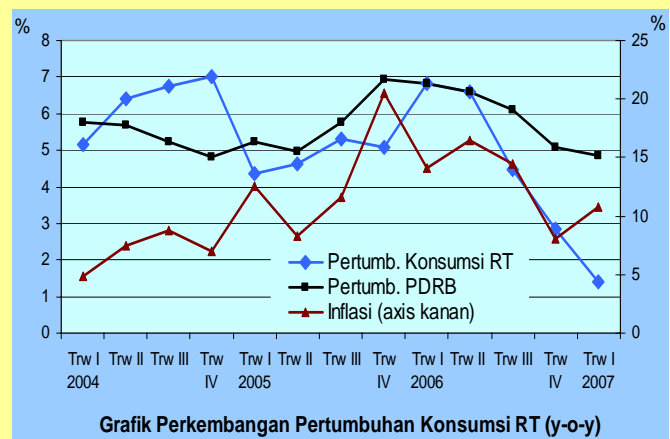
- Walaupun tidak terlalu signifikan dan bukan satu-satunya faktor, gempa juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Triwulan I-2007 ekonomi Sumatera Barat melambat menjadi 4,84% (y-o-y), sedangkan pada triwulan IV-2006 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,08%.
- Secara umum pergerakan harga/inflasi di Sumatera Barat (dengan IHK kota Padang sebagai proxy) relatif stabil terkendali. Supply/pasokan barang pasca gempa yang tetap lancar dan dalam jumlah yang memadai, merupakan faktor yang dapat menahan laju kenaikan harga/inflasi.
- Meningkatnya simpanan perorangan dikarenakan adanya pemberian bantuan dana kepada individu/keluarga yang menjadi korban gempa, melalui sarana perbankan (transfer rekening/kliring).
- Penurunan pada simpanan/DPK milik perusahaan diduga digunakan/diambil untuk membiayai rehabilitasi pasca gempa, kalangan dunia usaha melakukan *self financing* dengan menggunakan simpanan yang mereka miliki.
- Dilihat dari total provinsi Sumatera Barat, gempa belum berdampak negatif terhadap pertumbuhan kredit dan simpanan di Sumatera Barat. Pada bulan April 2007, kredit dan simpanan justru meningkat dibandingkan Maret 2007.
- Sistem pembayaran tidak terganggu dengan adanya gempa. Pasca gempa justru terjadi peningkatan arus pembayaran non tunai (kliring) karena tingginya transfer dana yang diperkirakan dalam rangka membantu korban gempa.

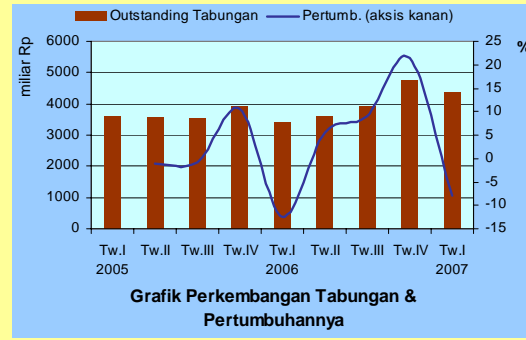
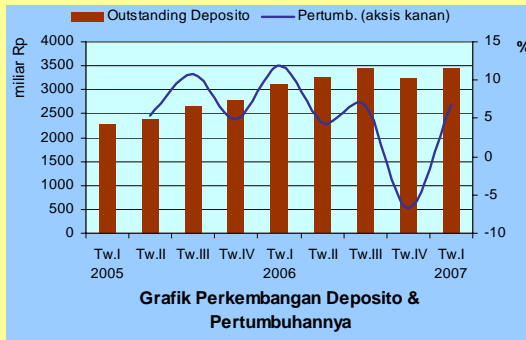
Analisis Daya Beli/Konsumsi Masyarakat Sumatera Barat

Kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada bulan Oktober 2005 yang lalu, berdampak cukup luas di masyarakat, terutama terhadap penurunan daya beli/konsumsi masyarakat. Kondisi penurunan daya beli ini diduga terjadi di semua wilayah Indonesia, termasuk Sumatera Barat. Dari angka PDRB Sumatera Barat, diketahui bahwa pertumbuhan PDRB dan konsumsi rumah tangga (RT) mengalami tren yang melambat sejak triwulan I-2006. Dalam grafik terlihat dampak kenaikan harga BBM mulai dirasakan pada periode triwulan I-2006, yang menurunkan daya beli masyarakat.

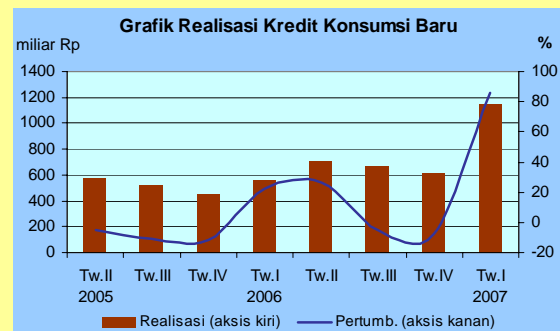
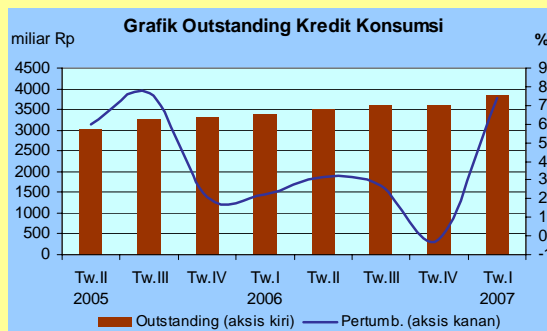
Namun tren perlambatan konsumsi tersebut, yang semula semata-mata disebabkan turunnya daya beli masyarakat, diduga mengalami pergeseran. Masyarakat Sumatera Barat selanjutnya cenderung "mengerem" tingkat konsumsinya dan lebih selektif dalam melakukan konsumsi (*priority expenditure*). Hal ini terlihat dari tren angka inflasi yang sebenarnya juga mengalami penurunan secara gradual sejak triwulan I-2006, namun penurunan inflasi tersebut ternyata tidak diiringi dengan pertumbuhan konsumsi yang lebih tinggi. Konsumsi terus merosot hingga triwulan I-2007 yang diperparah dengan adanya bencana gempa bumi di Sumatera Barat.

Selain itu, dengan asumsi pendapatan masyarakat setelah dikurangi konsumsi disimpan dalam tabungan dan deposito, pada 2 grafik di bawah dapat diketahui bahwa sebenarnya daya beli masyarakat, walaupun belum dapat dikatakan pulih, berangsur-angsur meningkat. Hal ini tampak dari deposito, walau sempat mengalami penurunan pada triwulan IV-2006, namun meningkat di triwulan I-2007. Sedangkan tabungan, sedikit menurun dari posisi akhir tahun 2006. Penurunan tersebut, bersifat temporer dan diduga merupakan *shifting*/pemindahan dana dari tabungan ke deposito karena bunga tabungan yang terus menurun.

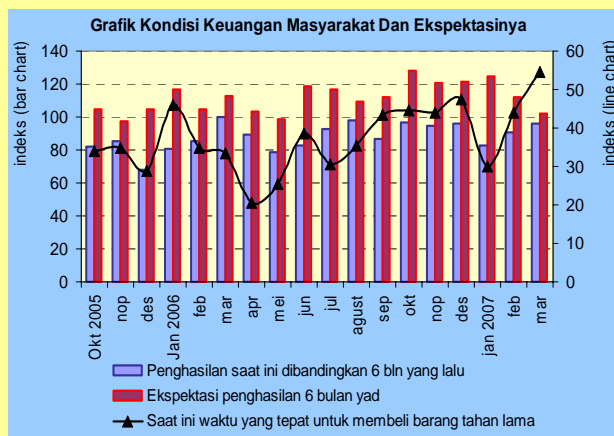




Meskipun masih rendah, daya beli masyarakat yang relatif membaik, dikonfirmasi pula dari outstanding dan realisasi kredit baru untuk konsumsi yang relatif meningkat. Kondisi yang cukup unik terjadi pada realisasi kredit baru untuk konsumsi, yang cenderung menurun sejak triwulan III-2006, namun di akhir tahun 2006 hingga triwulan I-2007 justru meningkat signifikan. Hal ini diduga karena meningkatnya biaya/harga barang konsumsi sehingga kebutuhan kredit konsumsi otomatis menyesuaikan.



Berdasarkan hasil survei konsumen, secara umum masyarakat 'berperilaku' pada posisi 'normal' atau tidak terpengaruh secara signifikan pasca kenaikan harga BBM Oktober 2005. Masyarakat yang menyatakan 'penghasilan saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu' lebih baik, sempat mengalami penurunan di bulan Desember 2005, namun kemudian naik di hingga bulan Maret 2006 dan secara fluktuatif sepanjang tahun 2006 hingga bulan Maret 2007 bergerak pada indeks antara 80 - 100. Sementara itu, 'ekspektasi penghasilan 6 bulan yang akan datang' memasuki kuartal pertama tahun 2007 justru mengalami penurunan indeks. Hal ini diduga karena ekspektasi inflasi yang masih tinggi akibat adanya bencana gempa bumi di Sumatera Barat.



memasuki kuartal pertama tahun 2007 justru mengalami penurunan indeks. Hal ini diduga karena ekspektasi inflasi yang masih tinggi akibat adanya bencana gempa bumi di Sumatera Barat.

Berbeda pada indeks 'ketepatan waktu untuk membeli barang tahan lama', setelah mengalami indeks tertinggi di bulan Januari 2006, karena adanya

kepastian dari pemerintah pusat akan kenaikan gaji PNS, pada bulan April 2006 justru terpuruk, jauh setelah kebijakan kenaikan harga BBM dikeluarkan. Namun kemudian indeks berangsur-angsur meningkat kembali hingga diatas 100 (optimis) pada bulan Maret 2007. Meningkatnya indeks tersebut diperkirakan karenaantisipasi masyarakat terhadap ekspektasi inflasi yang akan meningkat di masa yang akan datang. Pada bulan Maret 2007 inflasi tahunan sebesar 10,73% (y-o-y) lebih tinggi dari posisi Desember 2006 yang tercatat sebesar 8,05% (y-o-y). Hal tersebut seiring dengan outstanding dan realisasi kredit konsumsi yang juga meningkat di triwulan I-2007.

Kesimpulan

Kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM secara langsung berdampak terhadap harga-harga barang/inflasi dan daya beli masyarakat. Melonjaknya angka inflasi menyebabkan daya beli masyarakat menurun yang ditandai dengan melambatnya pertumbuhan konsumsi pada PDRB Sumatera Barat. Namun selanjutnya, perlambatan konsumsi tersebut diduga mengalami pergeseran tidak semata-mata akibat penurunan daya beli, namun karena adanya pembatasan konsumsi masyarakat. Hal ini terlihat dari angka inflasi yang mulai turun secara gradual namun tidak diiringi dengan percepatan konsumsi pada PDRB. Selain itu, simpanan masyarakat dan kredit yang disalurkan bank cenderung meningkat, yang mencerminkan membaiknya pendapatan dan permintaan masyarakat.

Analisis Komoditi Unggulan di Zona Padang*

Sektor pertanian merupakan sektor kedua terbesar dalam struktur PDRB zona Padang setelah sektor pertambangan. Pangasanya terhadap PDRB zona Padang pada Triwulan I-2007 mencapai 20,19% dan memberikan sumbangan sebesar 0,83% terhadap pertumbuhan zona.

Untuk komoditi kelapa sawit, luas lahan di zona Padang menguasai 39,19%** dari luas kebun kelapa sawit nasional, dengan pangsa produksi mencapai 39,75% produksi nasional. Sedangkan untuk komoditi karet, luas lahan karet di zona Padang sebesar 28,97% dari luas kebun karet nasional, dengan pangsa produksi sebesar 26,28% dari produksi karet nasional.

Perbandingan Luas Lahan & Produksi Perkebunan (Tahun 2004)

Komoditi / Zona	Luas Lahan (Ha)	Pangsa	Produksi (Ton)	Pangsa
Kelapa Sawit				
Medan	1.223.183	22,45	3.686.064	31,22
Padang	2.134.902	39,19	4.693.499	39,75
Palembang	832.765	15,29	1.511.460	12,80
Sumatera	4.190.850	76,93	9.891.023	83,78
Nasional	5.447.562		11.806.550	
Karet				
Medan	555.652	17,03	459.491	22,24
Padang	945.175	28,97	542.994	26,28
Palembang	800.324	24,53	489.175	23,68
Sumatera	2.301.151	70,54	1.491.660	72,21
Nasional	3.262.267		2.065.817	

Di tahun 2007, luas lahan perkebunan direncanakan akan meningkat seiring dengan adanya program revitalisasi perkebunan yang dicanangkan pemerintah pusat. Pemda Riau menargetkan perluasan kebun kelapa sawit seluas 120 ribu ha, yang terdiri dari program pemerintah sebanyak 10 ribu ha, kebun masyarakat seluas 50 ribu – 60 ribu ha, dan perkebunan swasta seluas 60 ribu – 70 ribu ha. Jika diasumsikan dibutuhkan dana sebesar Rp30 juta untuk setiap ha, maka dibutuhkan pembiayaan sebesar Rp36 triliun untuk sekitar 120 ribu ha. Jumlah ini belum termasuk kebutuhan dana untuk peremajaan lahan yang sudah tidak produktif.

Di Sumatera Barat, secara bertahap hingga 2010, luas kebun kelapa sawit akan ditambah sebanyak 15.200 Ha dan di Jambi bertambah 352.500 Ha. Guna merealisasikan tambahan luas lahan kelapa sawit tersebut, Pemprov. Jambi

* Zona Padang terdiri dari Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Riau dan Kepulauan Riau

** Terdiri dari kebun di Prov. Sumbar, Riau dan Jambi, posisi tahun 2004

mengalokasikan dalam APBD sebesar Rp60 miliar/tahun (2006-2010) untuk membagikan bibit karet dan pupuk gratis.

Program Revitalisasi Perkebunan di Jambi dan Sumatera Barat

Wilayah	Komoditi	Program	Rencana Pengembangan (Ha)/Tahun					Total/
			2006	2007	2008	2009	2010	Target
Jambi	Karet	Perluasan Kebun	4.170	4.200	4.231	4.261	4.293	21.155
		Peremajaan Kebun	17.500	25.000	27.500	27.500	33.156	130.656
	Kelapa Sawit	Perluasan Kebun	50.000	60.000	75.000	80.000	87.500	352.500
Sumbar	Karet	Perluasan Kebun	0	600	700	600	600	2.500
		Peremajaan Kebun	0	1.975	1.875	1.800	2.150	7.800
	Kelapa Sawit	Perluasan Kebun	0	3.800	3.800	3.800	3.800	15.200
		Peremajaan Kebun	0	500	2.200	1.200	950	4.850
	Kakao	Perluasan Kebun	11.827	17.285	18.775	17.517	17.652	83.056

Sumber : Dinas Perkebunan Prov. Jambi & Sumbar

Selain kelapa sawit, perkebunan karet rakyat banyak yang telah berumur tua (diatas 30 tahun) sehingga selain dilakukan perluasan, juga perlu dilakukan peremajaan. Harga karet di pasar internasional 20 tahun ke depan yang diproyeksikan terus meningkat akibat kebutuhan negara besar (ex:Cina) terhadap karet olahan untuk mendukung industrinya, membuat provinsi Jambi bertekad menjadi leader dalam pelaksanaan program peremajaan karet dari pusat. Selain itu, investor dari Thailand juga berminat untuk meng-investasikan dananya pada rencana *replanting* karet.

Namun demikian, pelaksanaan program revitalisasi perkebunan dihadapkan pada beberapa hambatan/kendala yang perlu segera dicarikan jalan keluarnya, seperti :

- ⇒ Koordinasi antar instansi terkait lemah.
- ⇒ Sebagian besar lahan belum bersertifikat.
- ⇒ Bibit/pupuk tidak tersedia dengan cukup.
- ⇒ Izin penggunaan lahan perkebunan kelapa sawit telah diterbitkan tetapi belum direalisasikan.

Investor Belanda Bangun Terowongan, PT OCS dan Pemko Padang Teken MoU

Bertempat di ruang sidang lantai II Balaikota, Wali Kota Padang Fauzi Bahar menandatangani nota kesepahaman (Memorandum Of Understanding/MoU) dengan Direktur Utama PT Offshore Crew Services (OCS) Indonesia (pelaksana megaproyek terowongan), E Pieters.

E Pieters datang tak sendirian. Eddie didampingi tim konsultan dari Jerman, Harrenknecht Tunnelling Germany dan Presiden Direktur PT Kalla Inti Karsa, M Iqbal.

Di hadapan Pieters bersama tim konsultan, sebelum MoU, wako turut mempresentasikan megaproyek (terowongan, reklamasi pelabuhan Telukbayur dan Padang Bay City). Turut hadir Ketua Umum Kadin Sumbar Asnawi Bahar, Wakil Ketua DPRD Padang Panji Alam, sejumlah kepala dinas/badan/kantor dan tokoh elemen masyarakat. Dalam MoU tersebut, dibunyikan PT OCS Indonesia yang bermarkas di Jakarta itu diberikan hak pengelolaan terowongan selama 40 tahun.

Setelah itu, hak pengelolaan terowongan akan dikembalikan lagi kepada pihak tuan rumah, yaitu Pemko Padang. Fauzi mengatakan, perjanjian kerjasama dengan PT OCS, pembicaraan sebenarnya sudah dimulai sejak 2 tahun lalu. Namun, baru saat ini Pemko baru bisa melakukan finalisasinya. PT OCS dalam hal ini, juga tidak membebankan biaya pembuatan studi kelayakan (feasibility study) ke dalam APBD Kota Padang, melainkan PT OCS sendiri yang akan menanggungnya.

"Sebagai tahap awal, kita akan melakukan studi kelayakan tentang pembangunan terowongan ini. Secepatnya, pembangunan terowongan ini akan dilakukan. Tentunya, setelah pihak investor benar-benar yakin dengan studi kelayakan tersebut," ujar Wali Kota Padang Fauzi Bahar didampingi Kepala Badan Penanaman Modal dan Kerjasama (BPMK) Kota Padang, Didi Aryadi kepada Padang Ekspres ini usai penandatanganan MoU tersebut.

Penandatanganan: Direktur Utama PT OCS Indonesia E Pieters (kanan) saat menandatangani MoU megaproyek terowongan Pegambiran - Bungus Telukcabung didampingi Wali Kota Padang Fauzi Bahar dan Ketua Umum Kadin Sumbar, Asnawi Bahar, di ruang sidang lantai II Balaikota, Senin (21/5).

Wako memberi jaminan bahwa PT OCS bukanlah makelar. Sebab, kata wako, yang membawa PT OCS Indonesia untuk berinvestasi ke Padang adalah Presiden Direktur PT Kalla Inti Karsa, M Iqbal yang notabene milik Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. "Bapak M Iqbal juga staf pribadi Wapres tersebut. Jadi mustahil kiranya Pak Iqbal main-main. Sebab ia juga berniat memajukan Sumbar, karena ia sendiri orang Batusangkar," terang Fauzi.

Sementara itu, Direktur Utama PT OCS Indonesia E Pieters kepada koran ini menjelaskan, megaprojek terowongan sepanjang 6 km tersebut akan menelan biaya sebesar Rp3 triliun. "terowongan tersebut nantinya akan kita buat kembar, yang masing-masingnya akan kita buat dalam dua jalur. Untuk pembuatan ini, akan memakan waktu selama tiga tahun," ulasnya. terowongan itu, nantinya masing-masing akan memiliki diameter luar dan diameter dalam, 14 meter dan 12, 75 meter.

Lanjutnya, di setiap 500 meter terowongan tersebut akan dibuat jalur penerangan interkoneksi yang berfungsi untuk kenyamanan pengendara. terowongan ini, tambah Pieters, juga diyakini sebagai salah satu terowongan yang terbaik di dunia setelah terowongan Cina dan Jerman. Lanjutnya, usai penandatanganan MoU, wako bersama rombongan PT OCS dan tim konsultan Jerman langsung meninjau megaprojek tersebut ke lokasi, Bungus, Pelabuhan Telukbayur dan Muaro Padang.

"Kedatangan mereka (PT OCS, red) kali ini membuktikan bahwa mereka tidak main-main. Buktinya, mereka datang bersama konsultan. Dan, terhadap hal ini, kita harus menyambut gembira, karena telah memunculkan optimisme bagi kemajuan Kota Padang," ujar Fauzi didampingi Kepala Badan PMK Didi Aryadi di sela-sela peninjauan lokasi megaprojek di Bungus, Senin (21/5) siang.

Wako mengatakan, banyak multiplier effect yang akan didapat warga kota dengan selesainya terowongan Pegambiran - Bungus Teluk Kabung nantinya. Khususnya terhadap jalur Padang-Pessel yang nantinya dapat ditempuh dengan tempo waktu yang relatif lebih singkat (lewat jalan darat). Lain dari itu, tambah wako, tanah bukit sejumlah 12 juta kubik yang dibuat untuk terowongan tersebut dapat digunakan untuk reklamasi Pelabuhan Telukbayur.

Ringkasan Eksekutif Perekonomian Zona Padang Triwulan I-2007*

I. Gambaran Umum

Perekonomian di Zona Padang pada triwulan I-2007 mengalami pertumbuhan yang positif, namun melambat bila dibandingkan triwulan sebelumnya. Melambatnya pertumbuhan di zona Padang terjadi karena adanya perlambatan pada semua provinsi di zona Padang, terutama perlambatan pertumbuhan pada PDRB Riau. Sektor primer masih mendominasi struktur PDRB zona Padang dengan pertumbuhan yang lebih rendah dari sektor sekunder dan tersier.

Tekanan inflasi di zona Padang pada triwulan laporan secara tahunan (y-o-y) dan kuartalan (q-t-q), mengalami peningkatan dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya. Seperti triwulan sebelumnya, kelompok bahan makanan masih menjadi faktor pendorong kenaikan angka inflasi di zona Padang.

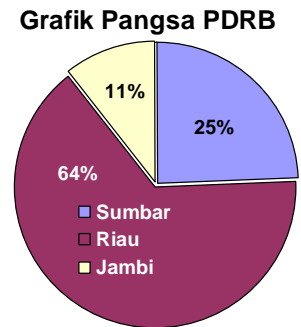
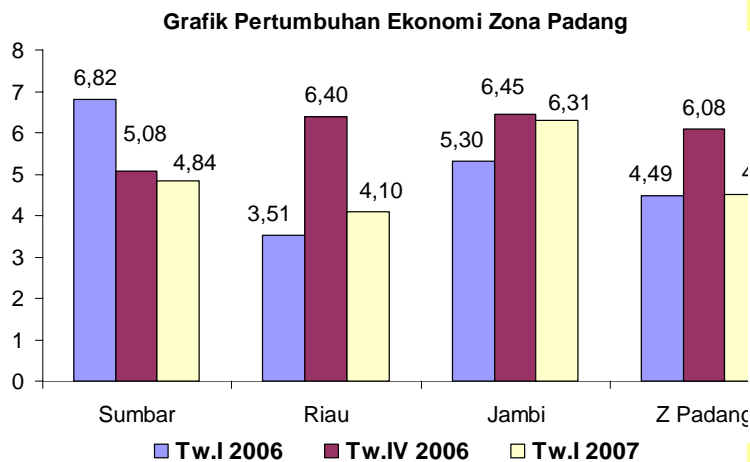
II. Asesmen Makro-Ekonomi Regional

Pada periode triwulan I-2007, perekonomian di Zona Padang mengalami pertumbuhan yang positif namun melambat bila dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan PDRB Zona Padang pada triwulan I-2007. Angka pertumbuhan PDRB pada triwulan I-2007 sebesar 4,51%¹ (y-o-y). Angka pertumbuhan tersebut sedikit lebih tinggi dari periode yang sama di tahun 2006 yang tercatat sebesar 4,49%, namun lebih rendah dari pertumbuhan pada triwulan IV-2006 yang mencapai 6,08% (y-o-y).

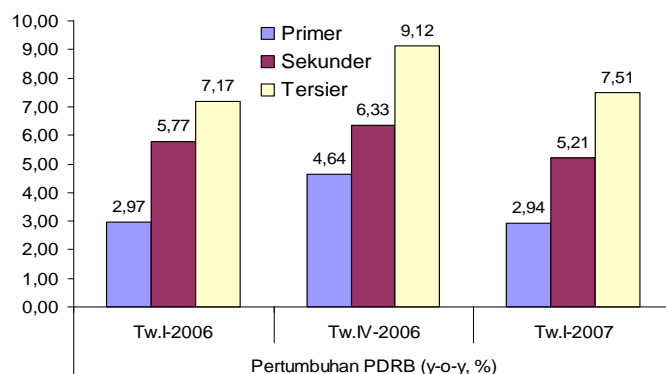
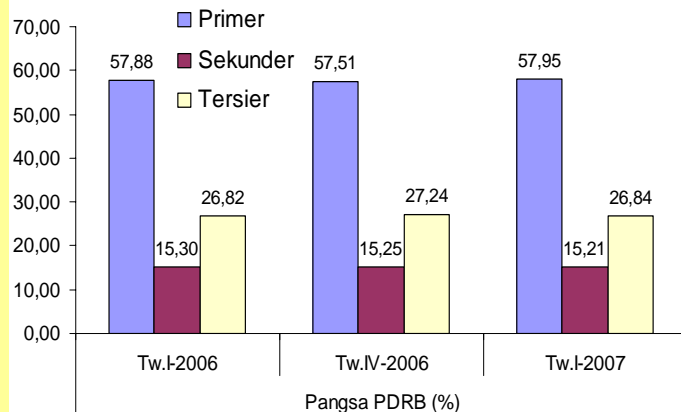
Melambatnya pertumbuhan di zona Padang terjadi karena adanya perlambatan pada semua provinsi di zona Padang, terutama perlambatan pertumbuhan pada PDRB Riau, yang semula tumbuh 6,40% (y-o-y) pada triwulan IV-2006, turun menjadi 4,10% (y-o-y) pada triwulan I-2007. Pangsa PDRB Riau terhadap pembentukan PDRB zona Padang mencapai 64%, sehingga penurunan ataupun peningkatan PDRB provinsi Riau cukup berpengaruh terhadap pergerakan pertumbuhan zona Padang.

* Zona Padang terdiri dari Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Riau dan Kepulauan Riau

¹ Data PDRB Zona Padang terdiri dari data Provinsi Sumbar, Jambi dan Riau.



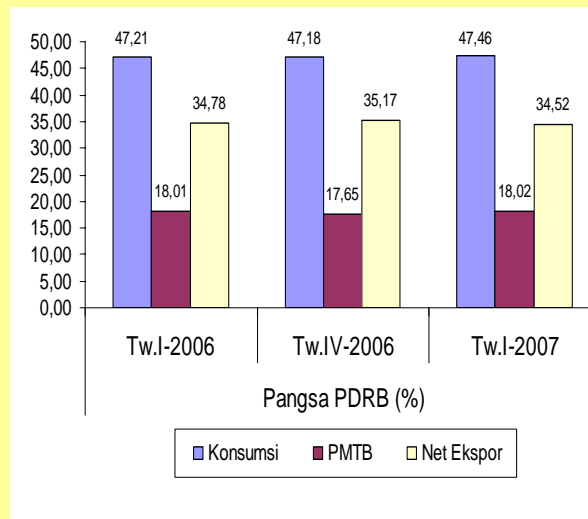
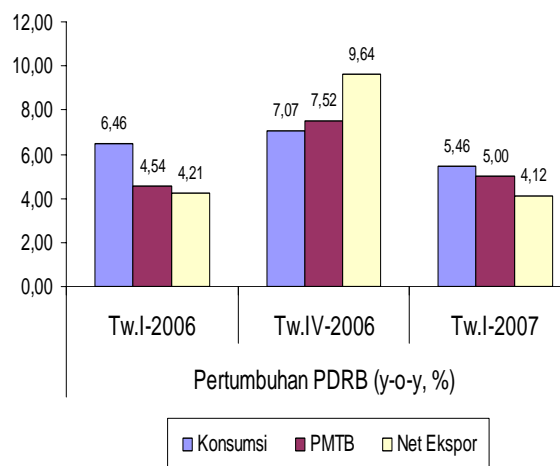
Dilihat dari sisi penawaran, struktur PDRB zona Padang didominasi sektor primer (sektor pertanian dan sektor pertambangan) dengan pangsa sebesar 57,95%, selanjutnya sektor tersier (yaitu sektor perdagangan, hotel & restoran, sektor angkutan & komunikasi, sektor keuangan, dan sektor jasa-jasa) sebesar 26,84%, dan sektor sekunder (sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas & air dan sektor bangunan) sebesar 15,21%. Meskipun pangasanya besar, namun dari sisi pertumbuhan sektor primer tidak setinggi dua sektor lainnya. Sektor primer hanya tumbuh sebesar 2,94%, sedangkan sektor tersier dan sekunder masing-masing tumbuh sebesar 7,51% dan 5,21%.



Penurunan kinerja sektor primer, disebabkan menurunnya produksi hasil perkebunan, terutama kelapa sawit, dan hasil pertambangan. Proses peremajaan kebun kelapa sawit di provinsi Riau dan Jambi yang belum seluruhnya terealisasi merupakan penyebab turunnya produksi kelapa sawit. Hal ini dikonfirmasi pula dari nilai ekspor olahan kelapa sawit berupa *crude palm*

oil/CPO yang menurun di dua provinsi tersebut. Pada bulan Januari 2007, ekspor CPO dari Riau hanya sebesar USD123,53 juta, sementara pada Januari 2006 mencapai USD252,23 juta. Di Jambi, ekspor CPO pada bulan Januari 2007 sebesar USD2,75 juta, sedangkan pada bulan Januari 2006 mencapai USD10,21 juta. Begitu pula dari sektor pertambangan, penurunan tercermin dari ekspor hasil tambang, berupa minyak dan batubara, yang juga mengalami penurunan. Ekspor batubara Riau di bulan Januari 2007 sebesar USD2,97 juta, sementara pada bulan Januari 2006 mencapai USD5,14 juta.

Dilihat dari sisi permintaan, struktur PDRB zona Padang tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya yang masih ditopang konsumsi (RT, Pemerintah, dan Lembaga Swasta Nirlaba) mencapai 47,46%, selanjutnya net ekspor sebesar 34,52% dan investasi/PMTB sebesar 18,02%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada konsumsi sebesar 5,46% (y-o-y), disusul kemudian investasi/PMTB sebesar 5,00%, dan net ekspor sebesar 4,12%.



Pertumbuhan konsumsi di zona Padang terutama berasal dari pertumbuhan konsumsi di provinsi Jambi. Hal ini terefleksi dari pertumbuhan impor barang konsumsi yang masuk ke provinsi Jambi pada bulan Januari 2007 lebih besar dari Januari 2006. Impor barang modal tumbuh dari USD19.148 pada Januari 2006 menjadi USD558.036 di bulan Januari 2007. Sementara itu, adanya bencana alam yang terjadi di Sumatera Barat, menimbulkan efek tingginya permintaan barang konsumsi seperti beras, mie instan, air mineral, makanan kaleng, dll yang ditujukan bagi korban bencana.

Pertumbuhan net ekspor pada PDRB zona Padang seiring dengan meningkatnya net ekspor barang/komoditi dari zona Padang. Pada bulan Januari 2007, net ekspor dari zona Padang mencapai USD864,30 juta, lebih tinggi dibandingkan net ekspor Januari 2006 yang tercatat sebesar USD854,60 juta. Kondisi neraca pembayaran zona Padang yang selalu positif/surplus mengindikasikan bahwa performa ekspor provinsi di zona Padang cukup baik. Namun demikian, ekspor, yang didominasi komoditi perkebunan, dalam

beberapa tahun kedepan dikhawatirkan akan menurun apabila proses peremajaan dan perluasan perkebunan dalam program revitalisasi perkebunan tidak segera dilakukan.

III. Assesmen Keuangan Pemerintah Daerah (APBD)

Realisasi APBD tahun anggaran 2006 yang lalu, keuangan pemerintah daerah di zona Padang (gabungan APBD Prov. Sumatera Barat dan Prov. Riau) mengalami surplus sebesar Rp432,42 miliar, dari semula ditargetkan defisit sebesar Rp601,42 miliar. Adanya surplus tersebut berasal dari target pendapatan yang terlampaui, sementara anggaran belanja cenderung dibawah target. Pendapatan yang dianggarkan sebesar Rp4.175,45 miliar selama tahun 2006, realisasinya mencapai Rp4.712,38 miliar atau 112,86%.

Realisasi APBD Tahun 2006 Zona Padang

jutaan rupiah

Komposisi APBD	Anggaran 2006	Realisasi s.d Tw IV 2006	%
I. PENDAPATAN	4.175.446,20	4.712.377,74	112,86
1. PAD	1.375.842,97	1.548.416,76	112,54
2. Dana Perimbangan	2.678.913,23	3.043.304,24	113,60
3. Lain-lain pendapatan yang sah	120.690,00	119.656,73	99,14
II. BELANJA	4.776.870,08	4.279.962,35	89,60
1. Belanja Administrasi umum	1.264.786,04	1.142.430,63	90,33
2. Belanja Operasi & pemeliharaan	821.430,02	735.505,10	89,54
3. Belanja Modal	1.812.734,41	1.571.957,71	86,72
4. Belanja Bagi Hasil & Bantuan Keu.	858.546,46	817.291,64	95,19
5. Belanja tak terangka	19.373,15	12.777,27	65,95
Defisit/Surplus anggaran	-601.423,88	432.415,39	

Sumber : Pemprov. Riau dan Sumbar

Terlampauinya pendapatan terutama bersumber dari pendapatan APBD Riau yang terealisasi 115,11% dari rencana, terutama PAD dan dana perimbangan. Program pemda Riau yang menggenjot PAD melalui pemaksimalan retribusi diantaranya dari bahan galian, baik bahan galian golongan C, seperti tanah timbun, maupun golongan B, seperti bouksit dan pasir, dinilai cukup berhasil mendongkrak PAD Riau. Pemaksimalan retribusi tersebut, selain untuk meningkatkan PAD, juga dalam rangka membatasi/mengontrol aktifitas galian C & B yang cukup marak dan berpotensi merusak lingkungan apabila tidak diawasi. Selain pendapatan dari bahan galian, yang juga ditingkatkan lagi pencapaiannya yaitu retribusi sampah, parkir, pajak penerangan jalan umum, dan juga pajak air baku.

Di sisi lain, belanja/pengeluaran APBD zona Padang cenderung dibawah target. Realisasi belanja sebesar Rp4.279,96 miliar, atau hanya 89,80% dari rencana sebesar Rp4.776,87 miliar. Realisasi terendah terjadi pada belanja modal yang hanya terealisasi 86,72% dari rencana. Tidak maksimalnya pemanfaatan anggaran belanja modal diperkirakan karena proses tender/lelang pada proyek pemda yang memakan waktu dan tingkat kekhawatiran panitia lelang yang cenderung meninggi sehingga pengambilan keputusan terhambat. Kondisi ini

cukup disayangkan mengingat belanja modal pemda diharapkan dapat menjadi stimulus bagi investasi sektor swasta.

APBD Zona Padang Tahun 2007

juta rupiah

Komposisi APBD	Riau	Sumbar	Zona Padang
I. PENDAPATAN	3.330.724,00	1.117.772,17	4.448.496,17
1. PAD	975.724,00	482.765,59	1.458.489,59
2. Dana Perimbangan	2.335.000,00	603.373,00	2.938.373,00
3. Lain-lain pendapatan yang sah	20.000,00	31.633,58	51.633,58
II. BELANJA	3.764.215,00	1.203.933,96	4.968.148,96
Belanja Tidak Langsung	1.001.866,00	647.815,91	1.649.681,91
1. Belanja Pegawai	472.720,00	325.913,52	798.633,52
2. Belanja Bantuan Sosial	157.017,00	30.015,42	187.032,42
3. Belanja Bagi Hasil	325.479,00	166.127,00	491.606,00
4. Belanja Bantuan Keuangan	36.650,00	121.826,40	158.476,40
5. Belanja tidak terduga	10.000,00	3.933,58	13.933,58
Belanja Langsung	2.762.349,00	556.118,05	3.318.467,05
1. Belanja Pegawai	479.986,00	81.082,33	561.068,33
2. Belanja Barang Jasa	671.363,00	266.914,84	938.277,84
3. Belanja Modal	1.611.000,00	208.120,88	1.819.120,88

Sumber : Pemprov. Riau dan Sumbar

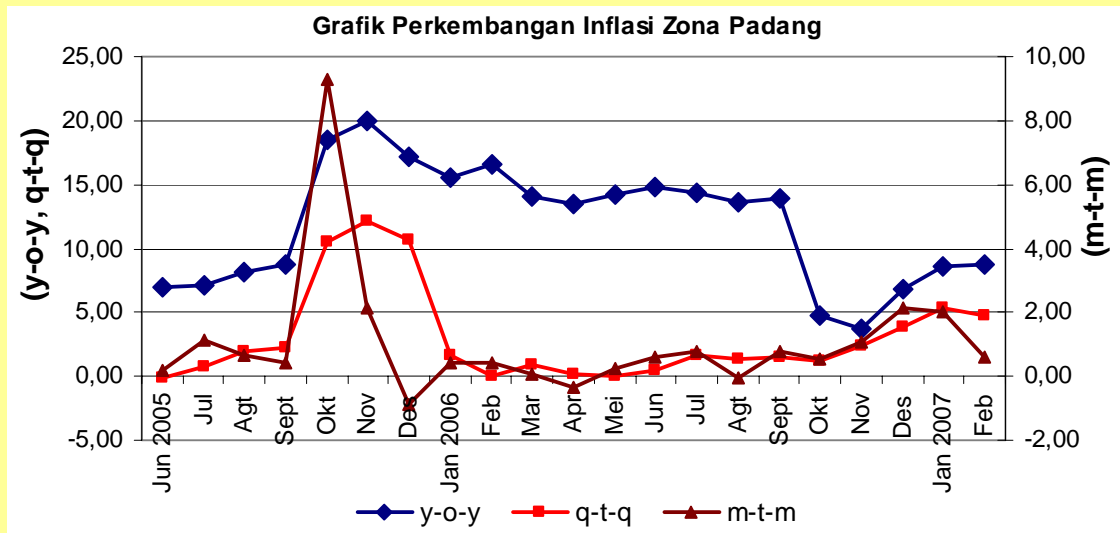
Untuk tahun anggaran 2007, pendapatan APBD zona Padang (gabungan Prov. Sumatera Barat dan Riau) sebesar 4.448,50 miliar, yang berarti naik hanya 6,54% dari anggaran tahun 2006. Begitu pula dengan belanja hanya naik 4,00% dari tahun sebelumnya menjadi Rp4.968,15 miliar. Relatif rendahnya kenaikan anggaran pendapatan dan belanja di tahun 2007 mencerminkan sikap konservatif dan cenderung hati-hati dari masing-masing daerah.

Dari anggaran belanja tahun 2007 yang telah disusun, pos anggaran belanja langsung modal relatif tidak berubah dari tahun 2006. Kenaikannya hanya 0,35%, yaitu dari Rp1.812,73 miliar di tahun 2006 menjadi Rp1.819,12 miliar di tahun 2007. Padahal, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya, diperlukan modal/investasi yang lebih tinggi pula. Untuk Sumatera Barat, guna mencapai pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2007 diperlukan investasi sebesar Rp7,5 triliun untuk menambah kapasitas produksi yang ada saat ini. Apalagi dengan adanya bencana gempa bumi di awal Maret 2007, kapasitas produksi perekonomian Sumatera Barat diperkirakan telah berkurang seperlima dari jumlah yang diperlukan. Dengan demikian, diperlukan tambahan dana sekitar Rp3 triliun untuk melakukan rehabilitasi, pemulihan dan rekonstruksi di Sumatera Barat.

IV. Asesmen Inflasi

Tekanan inflasi di zona Padang dalam triwulan laporan secara tahunan (y-o-y), mengalami peningkatan dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya, yaitu

dari 6,87% pada triwulan IV-2006 menjadi 8,77%² di triwulan laporan. Begitu pula secara kuartalan (q-t-q), inflasi di zona Padang mengalami peningkatan dari 3,80% pada triwulan IV-2006 menjadi 4,81% di triwulan laporan. Peningkatan inflasi tersebut terutama dipicu oleh naiknya komoditi pertanian, pada kelompok bahan makanan, akibat kelangkaan di pasaran.



Sampai dengan Februari 2007, laju inflasi zona Padang mencapai 2,62% (y-t-d) atau lebih tinggi dari periode yang sama tahun 2006 yang tercatat sebesar 0,84%. Laju inflasi tersebut diperkirakan akan menurun seiring dengan masuknya musim panen padi mulai bulan Maret 2007.

Berdasarkan kotanya, kota Pekanbaru merupakan kota dengan inflasi tertinggi di zona Padang. Pada triwulan laporan, inflasi kota Pekanbaru tercatat sebesar 5,89% (q-t-q), diikuti dengan kota Padang sebesar 5,46%, kota Jambi sebesar 4,54% dan terendah di kota Batam sebesar 3,21%.

Dilihat dari kelompok barang dan jasa (q-t-q), pada triwulan laporan kelompok bahan makanan mengalami inflasi tertinggi di zona Padang dengan angka inflasi mencapai 10,47% (sumbangan 3,05%), disusul kemudian kelompok makanan jadi sebesar 4,05% (sumbangan 0,71%), kelompok perumahan sebesar 3,83% (sumbangan 0,87%) dan kelompok kesehatan sebesar 1,20% (sumbangan 0,04%).

² Data Februari 2007

Tabel Perkembangan Inflasi Zona Padang Menurut Kel. Barang

(tahunan, y-o-y, %)

Kelompok Barang & Jasa	2005				2006				2007
	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	Tw. I
UMUM / TOTAL	9,75	6,95	8,71	17,23	14,00	14,76	13,92	6,87	8,77
Bahan Makanan	11,93	5,61	12,33	19,76	13,64	15,01	12,63	9,92	14,41
Makanan Jadi	7,88	8,52	9,46	11,27	11,07	9,96	10,72	8,48	9,87
Perumahan	7,35	5,20	3,45	8,71	8,86	10,26	9,86	5,20	6,76
Sandang	6,85	6,50	8,73	7,81	8,49	11,55	8,88	7,43	7,14
Kesehatan	4,07	4,53	4,53	6,67	8,79	7,67	8,44	8,77	8,26
Pendidikan	5,60	5,53	6,20	9,70	9,82	10,47	11,21	8,24	8,51
Transportasi & Komnk	16,62	12,31	11,92	46,38	32,54	32,82	32,57	1,15	1,15

(kuartalan, q-t-q, %)

Kelompok Barang & Jasa	2005				2006				2007
	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	Tw. I
UMUM / TOTAL	3,78	-0,16	2,25	10,65	0,92	0,51	1,50	3,80	4,81
Bahan Makanan	5,27	-2,06	3,90	11,79	-0,11	-0,87	1,74	9,10	10,47
Makanan Jadi	2,63	1,31	1,90	5,01	2,45	0,30	2,61	2,89	4,05
Perumahan	1,16	0,23	1,00	6,16	1,30	1,52	0,63	1,66	3,83
Sandang	0,34	0,60	3,11	3,58	0,97	3,44	0,65	2,20	0,80
Kesehatan	1,18	1,97	0,73	2,65	3,19	0,92	1,44	2,97	1,20
Pendidikan	0,14	0,10	5,59	3,64	0,25	0,69	6,30	0,87	0,56
Transportasi & Komnk	10,87	0,26	0,37	31,21	0,38	0,47	0,18	0,11	0,34

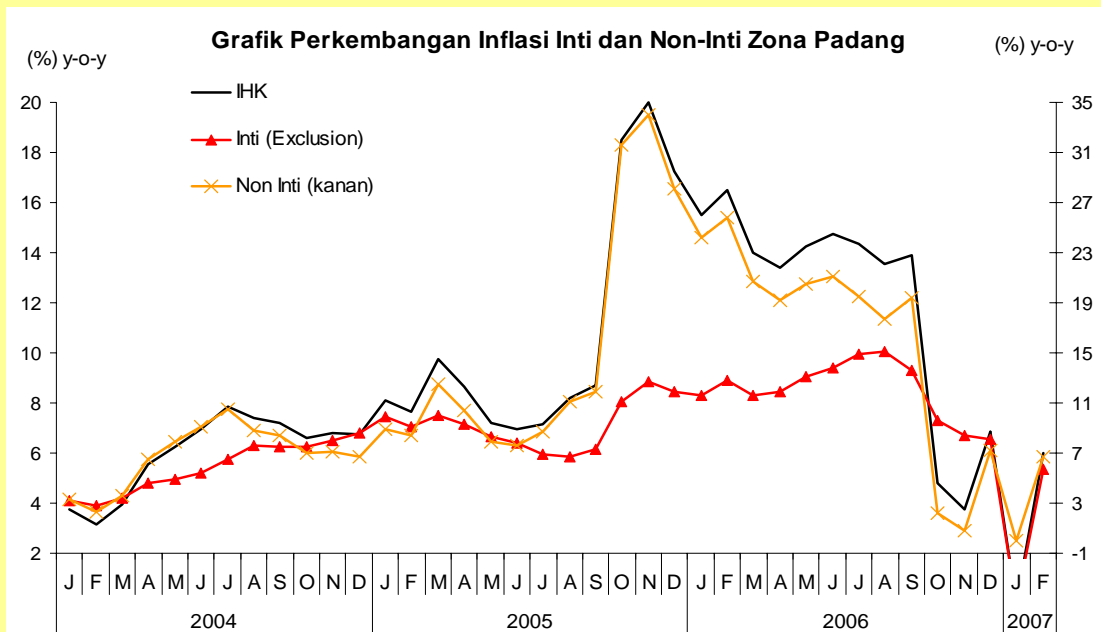
Sumber : BPS, diolah

Kelangkaan beras secara nasional, berdampak pula terhadap supply beras di zona Padang. Sumatera Barat yang menjadi sumber beras utama di zona Padang, tidak luput dari permasalahan kenaikan harga beras. Solok yang menjadi salah satu sumber produksi beras, mengalami penurunan produksi karena cuaca yang sering hujan. Namun demikian, kenaikan harga beras tertinggi di triwulan laporan pada zona Padang terjadi di kota Jambi yang mengalami kenaikan sebesar 16,34% dari posisi Desember 2006. Sementara di kota Padang dan Pekanbaru hanya naik 4,44% dan 5,00%. Masuknya beras impor ke Sumatera Barat sebanyak 12.000 ton dan ke Riau sebanyak 22.000 ton pada bulan Februari 2007 dapat mengerem laju kenaikan harga beras ke tingkat yang lebih tinggi, walaupun belum dapat menurunkan harga beras.

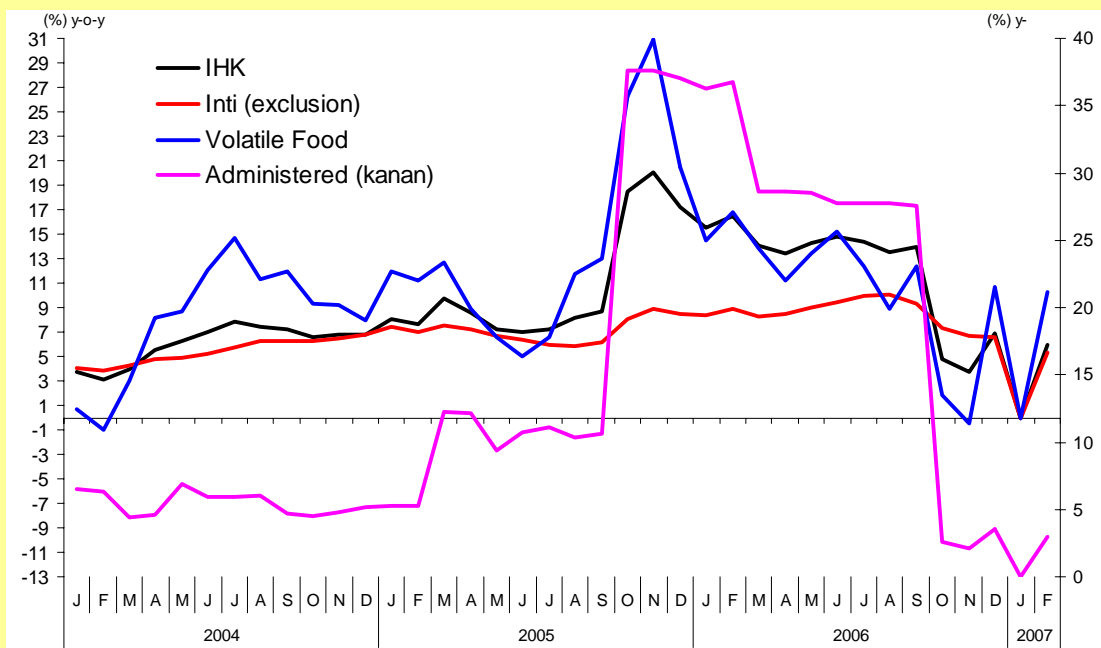
Sementara itu, kebijakan pemerintah menaikkan Harga Jual Eceran (HJE) Rokok sebesar 7% mulai 1 Maret 2007, nampaknya telah diantisipasi produsen rokok dengan menaikkan harga jual rokok sebelum kebijakan tersebut diberlakukan, yaitu diantaranya pada rokok kretek, rokok kretek filter dan rokok putih yang berada pada kelompok makanan jadi. Selain HJE, tarif cukai spesifik setiap golongan rokok juga direncanakan meningkat. Untuk rokok golongan I ditetapkan sebesar Rp7/batang, rokok golongan II sebesar Rp5/batang, dan rokok golongan III Rp3/batang mulai 1 Juli 2007. Kenaikan harga rokok tersebut telah terjadi di kota Pekanbaru, Padang dan Batam.

Secara tahunan (y-o-y) inflasi di zona Padang, baik inflasi inti maupun non inti, cenderung meningkat. Berdasarkan determinan inflasi, inflasi inti di zona Padang tercatat sebesar 5,34%, sedangkan inflasi non inti sebesar 6,67%.

Tingginya inflasi non inti tersebut disebabkan oleh inflasi *volatile food* yang juga masih relatif tinggi.



Sejak Oktober 2005, inflasi *volatile food* berada pada level dua digit hingga mencapai angka 30,85% pada bulan November 2005. Namun sejak Oktober 2006, inflasi *volatile food* bergerak cukup fluktuatif, dan pada triwulan laporan (Februari 2007) bertengger pada level 10,25% (y-o-y). Kenaikan harga beras dan fluktuatifnya harga komoditi pertanian lainnya, cukup memberikan tekanan terhadap inflasi *volatile food*. Sementara itu, inflasi kategori *administered price* turun rendah dari triwulan sebelumnya yang berada pada angka inflasi 2,96% (y-o-y) pada triwulan laporan.



V. Assesmen Keuangan

Kinerja kegiatan usaha perbankan di zona Padang pada awal tahun 2007 (posisi bulan Januari 2007) menunjukkan terjadinya penurunan baik pada penghimpunan DPK maupun penyaluran kredit, masing-masing sebesar 2,56%. Dengan perkembangan tersebut, nisbah LDR bank umum di Zona KBI Padang pada bulan Januari 2007 sebesar 80,96%, tercatat sama dengan nisbah pada bulan Desember 2006. Berdasarkan analisis secara year-on-year, pertumbuhan kredit per Januari 2007 sebesar 16,33%, sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit per Desember 2006 sebesar 15,83%.

Sementara itu, pertumbuhan DPK per Januari 2007 sebesar 33,37%, relatif sama dengan pertumbuhan per Desember 2006 sebesar 33,9%. Alokasi kredit di Zona Padang pada periode laporan menurut jenis penggunaan terutama untuk modal kerja (40,03%), kemudian investasi (32,32%) dan konsumsi (27,64%). Sedangkan menurut sektor ekonomi di luar sektor lain-lain yang menampung kredit konsumtif, sebagian besar kredit disalurkan untuk tiga sektor utama, yaitu sektor perindustrian (19,84%), sektor pertanian (18,49%) dan sektor perdagangan, hotel & restoran (18,10%).

Memasuki tahun 2007, alokasi penempatan dana pada SBI oleh perbankan di zona Padang telah menunjukkan penurunan. Posisi penempatan pada SBI pada bulan Februari 2007 tercatat Rp5,82 triliun atau menurun Rp 3,8 triliun (-39,53%) dibandingkan dengan posisi Desember 2006.

Kinerja Bank Umum di Zona Padang

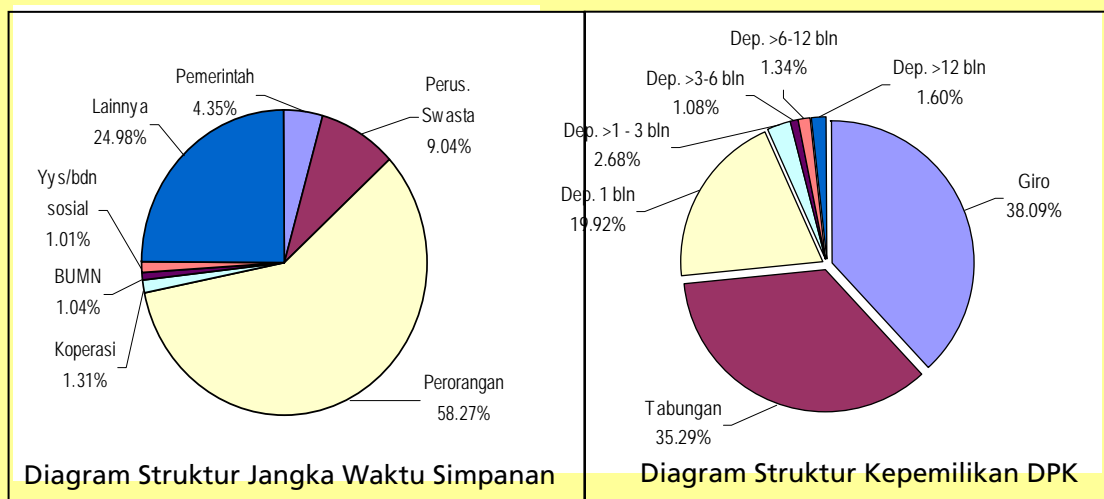
	POSISI (Rp M)		PANGSA		PERT. (Y-O-Y)		PERT. 2007
	Dec-06	Jan-07	Dec-06	Jan-07	Dec-06	Jan-07	s.d Jan-07
DPK	59,047	57,537	100.00%	100.00%	33.90%	33.37%	-2.56%
GIRO	23,093	21,917	39.11%	38.09%	45.74%	43.88%	-5.09%
TABUNGAN	15,021	15,314	25.44%	26.62%	-11.11%	29.22%	1.95%
SIMP. BERJANGKA	20,933	20,306	35.45%	35.29%	84.38%	26.45%	-3.00%
KREDIT	47,802	46,579	100.00%	100.00%	15.83%	16.33%	-2.56%
MENURUT PENGGUNAAN							
MODAL KERJA	19,723	18,644	41.26%	40.03%	34.43%	32.30%	-5.47%
INVESTASI	15,221	15,058	31.84%	32.33%	-2.25%	1.06%	-1.07%
KONSUMSI	12,859	12,876	26.90%	27.64%	16.59%	16.55%	0.13%
MENURUT SEKTOR EKONOMI							
PERTANIAN	9,371	8,614	19.60%	18.49%	19.04%	12.20%	-8.08%
PERTAMBANGAN	638	622	1.33%	1.34%	11.58%	32.98%	-2.46%
PERINDUSTRIAN	9,419	9,241	19.70%	19.84%	22.08%	25.72%	-1.88%
LISTRIK, GAS DAN AIR	1,659	1,657	3.47%	3.56%	-6.34%	-13.21%	-0.15%
KONSTRUKSI	1,856	1,724	3.88%	3.70%	-1.73%	-5.90%	-7.12%
PERDAG., RESTORAN & HOTEL	8,668	8,433	18.13%	18.10%	23.29%	23.96%	-2.71%
PENGANGKUTAN, PERGUDANGAN	670	659	1.40%	1.41%	9.32%	8.27%	-1.60%
JASA DUNIA USAHA	2,161	2,252	4.52%	4.83%	-7.82%	18.90%	4.22%
JASA SOSIAL MASYARAKAT	418	417	0.87%	0.89%	12.75%	12.43%	-0.23%
LAIN-LAIN	12,944	12,961	27.08%	27.83%	16.67%	16.46%	0.13%
LDR	80.96%	80.96%					

Berdasarkan asesmen terhadap sistem keuangan zona Padang, risiko kredit perbankan di zona Padang masih relatif terjaga meskipun dilihat dari rasio NPL mengalami sedikit peningkatan, dari 4,91% (Desember 2006) menjadi 5,13% (Februari 2007). Kelompok rumah tangga memiliki risiko terendah dengan

nisbah NPLs kredit konsumsi pada Februari 2007 sebesar 2,03%, tercatat sedikit diatas nisbah NPLs pada bulan Desember 2006 sebesar 1,93%. Sementara itu, risiko lebih tinggi terjadi pada kelompok swasta/korporasi seperti tercermin dari nisbah NPLs pada kredit modal kerja dan kredit investasi di bulan Februari 2007 masing-masing sebesar 6,15% dan 7,74%. Nisbah tersebut juga tercatat sedikit lebih tinggi dibandingkan nisbah NPLs kredit modal kerja dan kredit investasi periode Desember 2006, yang masing-masing tercatat sebesar 5,68% dan 7,63%. Secara sektoral, nisbah NPL tertinggi dialami oleh sektor pertambangan (12,23%), diikuti sektor konstruksi (10,46%) dan sektor pertanian (8,16%).

Jenis Penggunaan	NPLs Zona Padang	
	Des-06	Peb-07
Modal Kerja	5.68%	6.15%
Inventasi	7.63%	7.74%
Konsumsi	1.93%	2.03%
Sektor Ekonomi	Des-06	Peb-07
Pertanian	7.86%	8.16%
Pertambangan	11.70%	12.23%
Industri	5.33%	5.33%
Listrik, Air, Gas	0.00%	0.00%
Konstruksi	8.90%	10.46%
Perdagangan	6.58%	7.00%
Angkutan	5.90%	6.57%
Jasa Dunia	2.76%	2.95%
Jasa Sosial	5.15%	5.89%
Lainnya	1.95%	2.05%
Total	4.91%	5.13%

Dari segi risiko likuiditas, komposisi simpanan perbankan zona Padang didominasi oleh dana jangka pendek (giro, tabungan dan deposito 1 s.d 3 bulan) yang mencapai 95,99%, yang mencerminkan relatif tingginya risiko likuiditas yang dihadapi perbankan zona Padang. Sementara berdasarkan struktur kepemilikan, share terbesar dimiliki oleh nasabah perorangan (58,27%), diikuti oleh nasabah perusahaan swasta (9,04%) dan milik pemerintah (4,35%).



Penyaluran Kredit berskala Mikro, Kecil dan Menengah (MKM) Zona Padang selama periode laporan mengalami sedikit peningkatan, dari Rp 21,59 triliun per Desember 2006 menjadi Rp 21,73 triliun per Februari 2007. Dengan demikian, pangsa kredit berskala MKM terhadap total kredit Zona Padang juga naik sedikit, dari 63,88% menjadi 64,59%.

VI. Outlook Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi

Prospek perekonomian zona Padang pada triwulan II-2007 diprediksikan tumbuh positif dengan pertumbuhan sedikit lebih tinggi dari triwulan I-2007, berkisar pada 4,3% – 5,3% (y-o-y). Faktor pendorong pertumbuhan bersumber dari PDRB Riau dan Jambi, sementara PDRB Sumatera Barat diperkirakan mengalami perlambatan kembali, sehubungan dengan bencana gempa bumi yang telah mengurangi kapasitas produksi perekonomiannya.

Tekanan inflasi pada triwulan II-2007 diperkirakan masih diwarnai dengan kelangkaan beberapa komoditi konsumsi walaupun tidak sebesar triwulan I-2007. Hal ini dikarenakan beberapa daerah di Sumatera Barat dan Jambi telah memasuki musim panen padi. Di kota Padang, tekanan inflasi diperkirakan berasal dari kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, dan kelompok perumahan akibat masih tingginya permintaan barang konsumsi dan bahan bangunan pasca gempa bumi. Dengan memperhitungkan determinan-determinan inflasi tersebut diproyeksikan inflasi zona Padang triwulan II-2007 dan inflasi tahun 2007 berkisar pada angka 6-8% (y-o-y).

BAB 2

KEUANGAN DAERAH

2.1 Umum

Analisis keuangan daerah pada laporan ini hanya meliputi pelaksanaan APBN yang berada di wilayah Sumatera Barat untuk periode yang berakhir tanggal 31 Maret 2007 yang bersumber dari Laporan Arus Kas Per MAK/MAP yang dirilis Kantor Wilayah III Direktorat Jenderal Perbendaharaan Padang. Secara umum realisasi pendapatan dan belanja negara di wilayah Sumbar mengalami kenaikan.

Realisasi pendapatan negara dan hibah di wilayah Sumbar meningkat 30,65%. Pertumbuhan ini terjadi baik pada penerimaan perpajakan sebesar 30,34% maupun penerimaan negara bukan pajak sebesar 35,48% (tabel 2.1.). Sementara itu, belanja negara juga mengalami kenaikan meski dengan presentase yang lebih kecil. Pada triwulan ini, realisasi belanja negara di wilayah Sumatera Barat mencapai Rp2,319 triliun atau lebih tinggi Rp224,277 miliar dibandingkan triwulan I tahun sebelumnya. Kenaikan belanja negara ini terutama terjadi pada belanja daerah sebesar 12,62%, sedangkan belanja pemerintah pusat hanya mengalami kenaikan sebesar 2,09%.

Bila kita bandingkan antara jumlah pendapatan negara dan hibah dengan belanja negara diketahui bahwa belanja negara lebih besar daripada pendapatan negara dan hibah sehingga terjadi defisit sebesar Rp 2,06 triliun pada triwulan I-2007. Defisit ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat lebih banyak mengeluarkan dana melalui belanja daripada menarik dana masyarakat melalui pajak. Seiring dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal, maka belanja negara di wilayah Sumatera Barat didominasi oleh Belanja Daerah yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Tabel 2.1.
Perkembangan Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara di Wilayah Sumbar

Keterangan	Triwulan I 2006	Triwulan I 2007	Perubahan	
			Nominal	%
Pendapatan Negara dan Hibah	286,129,062,402	373,822,706,701	87,693,644,299	30.65%
Penerimaan Perpajakan	269,078,354,202	350,722,507,124	81,644,152,922	30.34%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	17,050,708,200	23,100,199,577	6,049,491,377	35.48%
Belanja Negara	2,226,914,317,730	2,436,337,442,978	209,423,125,248	9.40%
Belanja Pemerintah Pusat	512,711,492,702	505,817,290,725	(6,894,201,977)	-1.34%
Belanja Daerah	1,714,202,825,028	1,930,520,152,253	216,317,327,225	12.62%
Defisit	(1,940,785,255,328)	(2,062,514,736,277)	(121,729,480,949)	6.27%

Sumber : Laporan Arus Kas SAKUN Wilayah Sumbar, diolah

2.2. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah

Penerimaan perpajakan di wilayah Sumatera Barat meningkat cukup tinggi sebesar 30,34%. Pada triwulan I-2007, penerimaan perpajakan bersih mencapai Rp350,72 miliar atau naik sebesar Rp81,64 miliar dibandingkan triwulan I-2006. Kenaikan penerimaan pajak tersebut terjadi karena peningkatan penerimaan pajak (kotor) sebesar 21,83% sementara terjadi penurunan pengembalian (restitusi) pajak sebesar 55,76%.

Tabel 2.2.
Perkembangan Penerimaan Perpajakan

Jenis Pendapatan Negara	Triwulan I 2006	Triwulan I 2007	Perubahan	
			Nominal	%
Penerimaan Perpajakan	298,579,130,156	363,773,722,415	65,194,592,259	21.83%
Pajak Penghasilan	200,699,919,607	240,298,332,201	39,598,412,594	19.73%
Pajak Pertambahan Nilai	83,896,950,637	101,150,392,652	17,253,442,015	20.57%
Pajak Bumi dan Bangunan	687,648,459	542,793,383	(144,855,076)	-21.07%
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	3,006,676,705	4,416,778,861	1,410,102,156	46.90%
Pendapatan Pajak Lainnya	6,217,759,527	6,109,068,581	(108,690,946)	-1.75%
Bea Masuk	4,070,175,221	11,256,356,737	7,186,181,516	176.56%
Pengembalian (Restitusi)	29,500,775,954	13,051,215,291	(16,449,560,663)	-55.76%
Pengembalian BM	68,000,000	-	(68,000,000)	-100.00%
Pengembalian Pendapatan Pajak dan Cukai	29,432,775,954	13,051,215,291	(16,381,560,663)	-55.66%
Penerimaan Perpajakan Bersih	269,078,354,202	350,722,507,124	81,644,152,922	30.34%

Sumber : Laporan Arus Kas SAKUN Wilayah Sumbar, diolah

Peningkatan tertinggi terjadi pada penerimaan Bea Masuk sebesar 176,56% dari Rp4,07 miliar pada triwulan I-2006 menjadi Rp11,26 miliar pada triwulan laporan. Peningkatan ini terjadi seiring dengan kenaikan impor barang-barang konsumsi seperti beras dan gula. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga mengalami kenaikan cukup tinggi sebesar 46,90%. Peningkatan ini mencerminkan meningkatnya transaksi penjualan tanah di wilayah Sumatera Barat. Sementara itu Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga meningkat dengan pertumbuhan yang relatif sama masing-masing 19,73% dan 20,57%. Peningkatan PPN dan PPh tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kegiatan ekonomi di wilayah Sumatera Barat pada triwulan I-2007.

Dari sisi komposisi, penerimaan perpajakan di wilayah Sumatera Barat didominasi oleh penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 66,06% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 27,81%. Kenaikan penerimaan Bea Masuk ikut meningkatkan sumbangannya terhadap penerimaan perpajakan dari 1,36% pada triwulan I-2006 menjadi 3,09% pada triwulan laporan. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan memberikan sumbangan cukup kecil sebesar 0,15% sedangkan BPHTB memberikan sumbangan sebesar 1,21%.

Tabel 2.3.
Komposisi Penerimaan Perpajakan

Jenis Pendapatan Negara	Komposisi	
	Triwulan I 2006	Triwulan I 2007
Penerimaan Perpajakan	100.00%	100.00%
Pajak Penghasilan	67.22%	66.06%
Pajak Pertambahan Nilai	28.10%	27.81%
Pajak Bumi dan Bangunan	0.23%	0.15%
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.01%	1.21%
Pendapatan Pajak Lainnya	2.08%	1.68%
Bea Masuk	1.36%	3.09%

Sumber : Laporan Arus Kas SAKUN Wilayah Sumbar, diolah

2.3. Realisasi Belanja Negara

2.3.1. Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi belanja pemerintah pusat di wilayah Sumatera Barat sampai dengan triwulan I-2007 mencapai Rp389,39 miliar atau meningkat sebesar 3,41% dibandingkan triwulan I-2006. Seperti triwulan I-2006, pada triwulan laporan belanja pemerintah pusat didominasi dengan belanja pegawai dengan nilai Rp259,72 miliar dengan sumbangan sebesar 66,70% dari total belanja pemerintah pusat. Kenaikan gaji PNS sebesar 15% dari gaji pokok mulai 1 Januari 2007 membuat belanja gaji dan tunjangan pegawai mengalami kenaikan dari Rp184,46 miliar menjadi Rp237,52 miliar.

Tabel 2.4.
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat

Keterangan	Nominal		Komposisi	
	Tw.I-2006	Tw.I-2007	Tw.I-2006	Tw.I-2007
Belanja Pemerintah Pusat	376,557,570,322	389,399,658,919	100.00%	100.00%
Belanja Pegawai	200,067,205,171	259,717,109,384	53.13%	66.70%
Belanja Gaji dan Tunjangan	184,461,686,177	237,523,525,691	48.99%	61.00%
Belanja Honorarium/Lembur/Vakasi/Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	15,955,041,885	22,465,182,446	4.24%	5.77%
Belanja Kontribusi Sosial	(349,522,891)	(271,598,753)	-0.09%	-0.07%
Belanja Barang	31,132,967,266	40,533,990,403	8.27%	10.41%
Belanja Barang	19,202,184,050	24,734,582,543	5.10%	6.35%
Belanja Jasa	4,743,089,300	4,856,275,159	1.26%	1.25%
Belanja Pemeliharaan	3,686,657,256	4,633,239,796	0.98%	1.19%
Belanja Perjalanan	3,501,036,660	6,309,892,905	0.93%	1.62%
Belanja Bantuan Sosial	87,061,193,906	74,926,350,803	23.12%	19.24%
Belanja Bantuan Kompensasi Sosial	75,904,351,900	59,199,599,000	20.16%	15.20%
Belanja Lembaga Pendidikan dan Peribadatan	11,156,842,006	15,635,351,803	2.96%	4.02%
Belanja Lembaga Sosial Lainnya	4,882,302,000	91,400,000	1.30%	0.02%
Belanja Lain-Lain	13,077,459,208	1,048,690,600	3.47%	0.27%
Belanja Lain-Lain	13,077,459,208	1,048,690,600	3.47%	0.27%
Belanja Modal	45,218,744,771	13,173,517,729	12.01%	3.38%
Belanja Modal Tanah	519,991,300	1,596,410,700	0.14%	0.41%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27,714,708,300	6,152,204,014	7.36%	1.58%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10,078,567,077	2,314,822,000	2.68%	0.59%
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	6,512,312,594	2,944,312,515	1.73%	0.76%
Belanja Modal Fisik Lainnya	393,165,500	165,768,500	0.10%	0.04%

Sumber : Laporan Arus Kas SAKUN Wilayah Sumbar, diolah

Belanja lain yang cukup signifikan dalam realisasi belanja pemerintah pusat di Sumbar adalah belanja bantuan sosial. Sumbangan pos belanja ini terhadap total belanja pemerintah pusat di Sumbar mencapai 19,24%. Belanja bantuan sosial ini masih didominasi belanja bantuan kompensasi sosial kenaikan harga BBM sebesar Rp59,19 miliar. Sementara itu, belanja lembaga pendidikan terealisasi sebesar Rp15,64 miliar dengan sumbangan 4,02%.

Sementara itu, realisasi belanja modal pada triwulan I-2007 mengalami penurunan, yaitu dari Rp45,22 miliar pada triwulan I-2006 menjadi hanya Rp 13,17 miliar. Hal ini terjadi karena pada APBN tahun 2006 terdapat DIPA Luncuran (*carry over*) dari APBN tahun 2005. Perubahan sistem anggaran dan perbendaharaan pada tahun 2005 membuat pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan DIPA Luncuran 2006. Penurunan realisasi belanja modal tersebut membuat sumbangan belanja modal terhadap total belanja pemerintah pusat di wilayah Sumbar hanya sebesar 3,38%.

Belanja modal yang terealisasi pada triwulan ini paling banyak disumbangkan oleh pos belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp6,15 miliar. Berikutnya adalah pos belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp2,94 miliar, pos belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp2,31 miliar, pos belanja modal tanah sebesar Rp 1,59 miliar, dan pos belanja modal fisik lainnya sebesar Rp 165,77 juta.

Jika dilihat dari kecilnya persentase pengeluaran investasi pemerintah pusat di Wilayah Sumbar baik pada triwulan laporan maupun triwulan I-2006, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah pusat untuk menggerakkan perekonomian melalui APBN relatif kecil terhadap ekonomi Sumatera Barat. Belanja pemerintah pusat lebih banyak terealisasi untuk operasional pemerintahan dan bantuan subsidi langsung tunai maupun bersyarat akibat kenaikan BBM 2005. Untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus bekerja lebih keras untuk memberikan iklim berusaha yang kondusif sehingga investasi dari sektor swasta tertarik untuk berinvestasi di Sumbar.

2.3.2. Belanja untuk Daerah

Tabel 2.5.
Perkembangan Belanja untuk Daerah

Keterangan	Nominal		Pertumbuhan	
	Tw.I-2006	Tw.I-2007	Nominal	%
Belanja Dana Bagi Hasil	4,638,829,110	4,078,751,859	(560,077,251)	-12.07%
Pajak Bumi dan Bangunan	2,485,561,491	796,978,051	(1,688,583,440)	-67.94%
BPHTB	2,153,267,619	3,281,773,808	1,128,506,189	52.41%
Belanja Dana Alokasi Umum	1,709,563,995,918	1,926,441,400,394	216,877,404,476	12.69%
Belanja DAU untuk Provinsi	159,009,666,666	228,298,999,999	69,289,333,333	43.58%
Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota	1,550,554,329,252	1,698,142,400,395	147,588,071,143	9.52%
Belanja Dana Alokasi Khusus	-	-	-	0.00%

Sumber : Laporan Arus Kas SAKUN Wilayah Sumbar, diolah

Pada triwulan I-2007 ini, belanja dana bagi hasil yang merupakan transfer bagian pemerintah provinsi dan kabupaten/kota atas penerimaan PBB dan BPHTB terealisasi sebesar Rp4,08 miliar. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar dibandingkan triwulan I-2006 karena terjadi penurunan penerimaan PBB. Peningkatan penerimaan BPHTB sebesar 46,90% membuat transfer bagi hasil BPHTB bagi wilayah Sumbar juga meningkat sebesar 52,41%. Transfer BPHTB dari pemerintah pusat ke daerah tercatat sebesar Rp 3,28 miliar pada triwulan laporan.

Belanja Dana Alokasi Umum (DAU) pada triwulan I-2007 mencapai Rp1,93 triliun. Dibandingkan dengan DIPA 2007, realisasi tersebut mencapai 33,33% dari total alokasi DAU yang telah dianggarkan untuk Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat sebesar Rp5,78 triliun. Belanja DAU untuk pemerintah provinsi mencapai Rp228,29 miliar sedangkan untuk pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp1,69 triliun (tabel 2.5.). Sementara itu, tidak ada realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) pada triwulan ini meskipun sudah dianggarkan dalam DIPA 2007 sebesar Rp746,95 miliar.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Analisis DIPA Sumatera Barat Tahun 2007 : Semestinya Bisa Menjadi Kekuatan Ekonomi

Umum

Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI No.134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

DIPA tahun 2007 telah diserahkan secara serentak di 34 provinsi di Indonesia yang dilakukan oleh para Menteri, Jaksa Agung dan Kapolri kepada para Gubernur. Selanjutnya para Gubernur akan menyerahkan DIPA dimaksud kepada berbagai instansi dan satuan kerja di daerah masing-masing. Pemerintah Pusat berharap anggaran yang diserahkan tepat waktu akan menjadi langkah maju dalam menjalankan roda pembangunan di tahun ini maupun tahun-tahun berikutnya karena faktor ketepatan waktu sangat mutlak diperlukan agar tidak ada program yang terlambat dilaksanakan.

DIPA tahun 2007 yang diserahkan Pemerintah Pusat terdiri dari : DIPA Sektoral, DIPA Dekonsentrasi, DIPA Tugas Perbantuan, DIPA Dana Alokasi Umum (DAU), dan DIPA Dana Alokasi Khusus (DAK). Seluruh anggaran belanja Negara untuk tahun 2007 berjumlah Rp763,5 triliun, yang terdiri dari anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp504,8 triliun dan anggaran belanja daerah sebesar Rp258,7 triliun.

DIPA Sumatera Barat

Di tahun 2007 DIPA Sumatera Barat mengalami peningkatan yang relatif cukup tinggi dibandingkan tahun 2006, yaitu meningkat sebesar 19,44%. Di tahun 2006 DIPA Sumatera Barat berjumlah Rp8,43 triliun dan di tahun 2007 berjumlah Rp10,16 triliun. Dilihat dari peningkatannya, DIPA DAK mengalami peningkatan tertinggi yaitu sebesar 60,13% dari Rp466 miliar di tahun 2006 menjadi Rp746 miliar di tahun 2007. Sementara apabila dilihat dari pangsaanya, DIPA DAU merupakan yang terbesar dengan pangsa sebesar 57,43% dari total DIPA Sumatera Barat.

DIPA SUMATERA BARAT

Triliun Rp

Kategori DIPA	2006	2007	Peningkatan Nominal	Pertumb. (%)
DIPA Kantor Vertikal + Tugas Perbantuan	2,83	3,54	0,71	24,99
DIPA DAU	5,13	5,78	0,65	12,69
DIPA SRAA-DAK	0,47	0,75	0,28	60,13
Jumlah	8,43	10,06	1,64	19,44

DIPA kantor vertikal dan tugas perbantuan yang dialokasikan di Sumatera Barat sebesar Rp3,54 triliun di tahun 2007 berasal dari 34 lembaga

negara/departemen. Pada DIPA ini, peningkatan tertinggi terjadi pada DIPA Departemen Dalam Negeri yang meningkat sekitar 400% di tahun 2007, yaitu dari Rp14,42 miliar di tahun 2006 menjadi Rp73,86 miliar. Sedangkan dilihat dari pangasanya, DIPA Departemen Pendidikan Nasional mencapai 27,18% dari total DIPA kantor vertikal dan tugas perbantuan atau sebesar Rp961,99 miliar di tahun 2007. Mayoritas dari dana tersebut adalah untuk membiayai pembangunan sekolah dan operasional sekolah.

Sementara itu, pada DIPA DAU pangsa terbesar teralokasikan untuk pemerintah provinsi sebesar Rp546,33 miliar (9,45% dari total DIPA DAU) dan pemerintah kota Padang sebesar Rp565,10 miliar (9,78% dari total DIPA DAU). Selebihnya tersebar pada seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat. Peningkatan DIPA DAU tertinggi terjadi pada Kabupaten Mentawai dengan peningkatan sebesar 27,82% di tahun 2007, yaitu dari Rp184,68 miliar di tahun 2006 menjadi Rp236,06 miliar dan yang terendah pada Kabupaten Padang Pariaman yang hanya meningkat sebesar 9,87%, yaitu dari Rp320,79 miliar di tahun 2006 menjadi Rp352,45 miliar di tahun 2007.

Dana Alokasi Umum (DAU) Kab & Kota di Sumatera Barat (000 Rp)

No.	Prov/Kab/Kota	2006	2007	Peningkatan (nominal)	Pertumb. (%)
1	Prov. Sumbar	477.029.160	546.332.000	69.302.840	14,53
2	Kota Padang	503.905.740	565.100.000	61.194.260	12,14
3	Kota Bukittinggi	183.129.590	211.433.000	28.303.410	15,46
4	Kota Payakumbuh	180.807.970	205.435.000	24.627.030	13,62
5	Kota Solok	160.646.650	182.247.000	21.600.350	13,45
6	Kota Padang Panjang	152.317.120	169.805.000	17.487.880	11,48
7	Kota Sawahlunto	147.937.740	167.833.000	19.895.260	13,45
8	Kota Pariaman	170.463.330	194.522.000	24.058.670	14,11
9	Kab. Agam	338.577.270	377.132.000	38.554.730	11,39
10	Kab. Swahlunto/Sijg	214.370.180	243.480.000	29.109.820	13,58
11	Kab. Padang Pariaman	320.791.720	352.452.000	31.660.280	9,87
12	Kab. Solok	293.117.020	325.791.000	32.673.980	11,15
13	Kab. Tanah Datar	302.633.230	334.472.000	31.838.770	10,52
14	Kab. 50 Kota	311.994.100	344.547.000	32.552.900	10,43
15	Kab. Pesisir Selatan	344.709.360	380.657.000	35.947.640	10,43
16	Kab. Mentawai	184.682.260	236.058.000	51.375.740	27,82
17	Kab. Pasaman	232.044.050	263.891.000	31.846.950	13,72
18	Kab. Dharmasraya	196.311.350	218.596.000	22.284.650	11,35
19	Kab. Solok Selatan	169.952.130	188.488.000	18.535.870	10,91
20	Kab. Pasaman Barat	243.280.590	271.069.000	27.788.410	11,42
	Jumlah	5.128.700.560	5.779.340.000	650.639.440	12,69

Meningkatnya alokasi DAU pada anggaran Pemprov Sumatera Barat dan Pemda Kab/Kota dibandingkan tahun sebelumnya sudah selayaknya dapat dimanfaatkan guna meningkatkan kinerja personil dan pembangunan di semua wilayah di Sumatera Barat. Sebagai salah satu komponen dalam APBD, DAU masih merupakan sumber pemasukan daerah yang cukup signifikan besarnya. Pada APBD Prov. Sumatera Barat saja, pangsa DAU terhadap total penerimaan mencapai 48,88% atau hampir setengah dari total penerimaan pemprov. Ini mengindikasikan masih relatif cukup besarnya ketergantungan daerah terhadap alokasi dana dari pusat.

Seperti halnya DAU, DIPA Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk wilayah Sumatera Barat juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi, yaitu sebesar 60,13% dari

Rp466,48 miliar di tahun 2006 menjadi Rp746,95 miliar di tahun 2007. Pangsa terbesar DAK teralokasikan untuk Kabupaten Padang Pariaman sebesar Rp59,17 miliar (7,92% dari total DIPA DAK) dan Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp59,01 miliar (7,90% dari total DIPA DAK). Sedangkan dilihat dari peningkatannya, tertinggi terjadi pada Kota Padang Panjang dengan peningkatan sebesar 161,31% di tahun 2007, yaitu dari Rp9,03 miliar di tahun 2006 menjadi Rp23,60 miliar, dan yang terendah pada Kabupaten Pasaman yang hanya meningkat sebesar 0,36%, yaitu dari Rp39,85 miliar di tahun 2006 menjadi Rp39,99 miliar di tahun 2007.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab & Kota di Sumatera Barat (000 Rp)

No.	Prov/Kab/Kota	2006	2007	Peningkatan (nominal)	Pertumb. (%)
1	Kota Padang	26.050.000	35.574.000	9.524.000	36,56
2	Kota Bukittinggi	17.320.000	28.008.000	10.688.000	61,71
3	Kota Payakumbuh	17.320.000	23.991.000	6.671.000	38,52
4	Kota Solok	17.350.000	28.393.000	11.043.000	63,65
5	Kota Padang Panjang	9.030.000	23.596.000	14.566.000	161,31
6	Kota Sawahlunto	18.400.000	28.176.000	9.776.000	53,13
7	Kota Pariaman	23.370.000	35.552.000	12.182.000	52,13
8	Kab. Agam	29.840.000	49.736.000	19.896.000	66,68
9	Kab. Swahlunto/Sijg	25.170.000	35.626.000	10.456.000	41,54
10	Kab. Padang Pariaman	29.070.000	59.170.000	30.100.000	103,54
11	Kab. Solok	31.830.000	46.778.000	14.948.000	46,96
12	Kab. Tanah Datar	25.710.000	44.308.000	18.598.000	72,34
13	Kab. 50 Kota	28.620.000	49.165.000	20.545.000	71,79
14	Kab. Pesisir Selatan	33.910.000	59.012.000	25.102.000	74,03
15	Kab. Mentawai	21.790.000	47.179.000	25.389.000	116,52
16	Kab. Pasaman	39.845.000	39.988.000	143.000	0,36
17	Kab. Dharmasraya	24.420.000	36.487.000	12.067.000	49,41
18	Kab. Solok Selatan	20.760.000	35.993.000	15.233.000	73,38
19	Kab. Pasaman Barat	26.670.000	40.213.000	13.543.000	50,78
	Jumlah	466.475.000	746.945.000	280.470.000	60,13

Kesimpulan

Meningkatnya DIPA untuk wilayah Sumatera Barat di tahun 2007 sudah selayaknya disambut dengan gembira dan bisa menjadi kekuatan ekonomi daerah. Peningkatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur dan pembangunan di Sumatera Barat yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Agar DIPA dapat termanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, maka diperlukan kontrol dan evaluasi yang berkelanjutan, serta perlu ditunjang dengan program-program pemerintah daerah yang jelas, konkrit dan menyentuh kehidupan masyarakat banyak. Terhadap daerah kabupaten/kota yang memperoleh pangsa DIPA terbesar, baik DAU maupun DAK, semestinya ekonomi di daerah yang bersangkutan dapat tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dan tingkat kemiskinan dapat dikurangi.

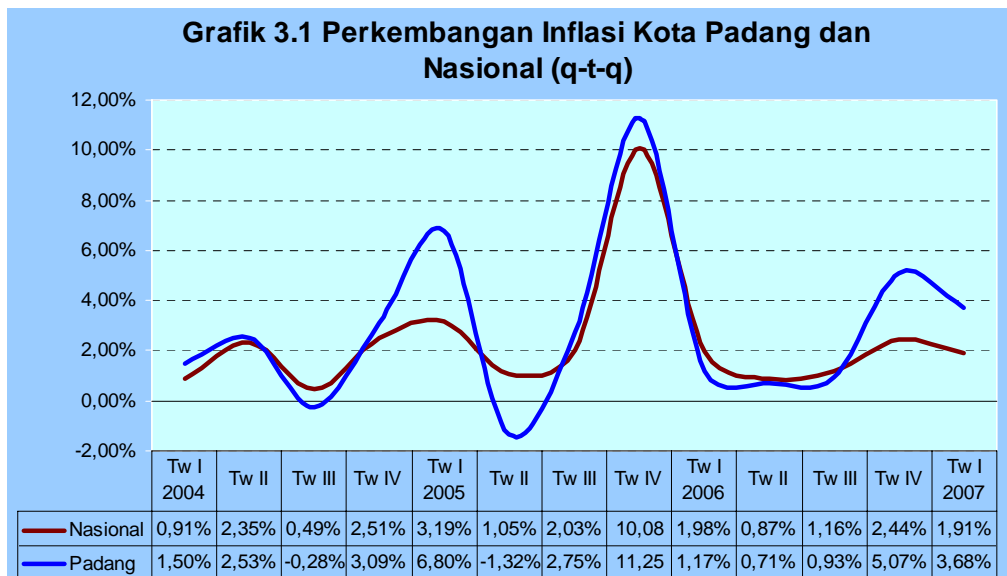
BAB 3

I N F L A S I

3.1. Umum

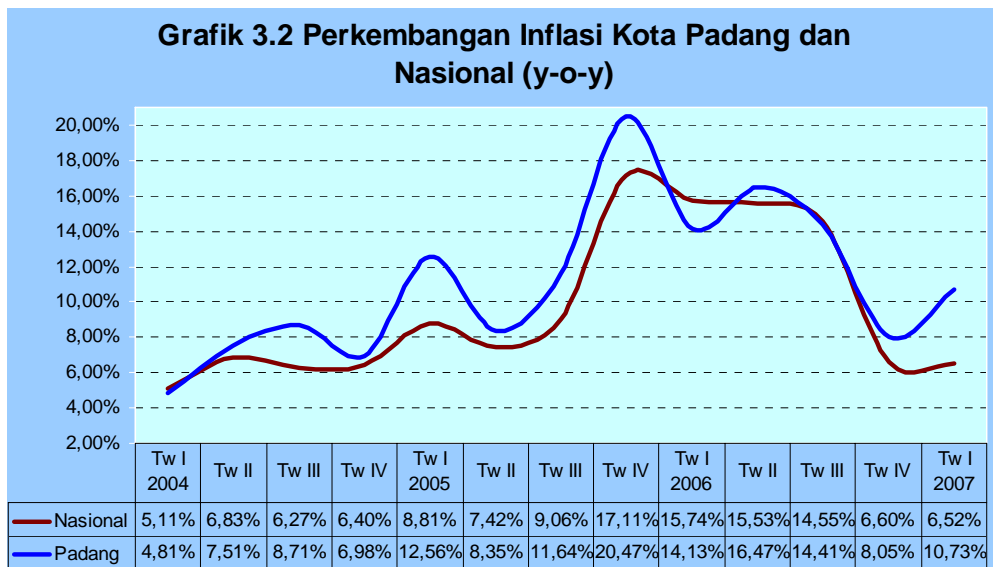
Bencana gempa bumi yang melanda beberapa daerah di Sumatera Barat pada tanggal 6 Maret 2007, secara umum belum mendorong inflasi ke level yang lebih tinggi. Hal ini ditandai dengan pergerakan tingkat harga-harga di kota Padang yang menunjukkan arah penurunan pada triwulan I-2007 dibandingkan triwulan sebelumnya. Begitu pula dengan inflasi nasional, juga mengalami penurunan walaupun dengan slope yang lebih landai dari kota Padang.

Inflasi kota Padang pada triwulan I-2007 tercatat sebesar 3,68% ($q-t-q$). Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 5,07% ($q-t-q$). Walaupun menurun, inflasi kota Padang tersebut masih lebih tinggi apabila dibandingkan inflasi nasional pada triwulan I-2007 yang tercatat sebesar 1,91% ($q-t-q$). Laju inflasi kota Padang hingga Maret 2007, mencapai 3,68% ($y-t-d$), lebih tinggi dibandingkan laju inflasi nasional yang tercatat sebesar 1,91% (Grafik 3.1).



Sementara itu, perkembangan harga secara tahunan di kota Padang, pada triwulan I-2007 kembali berada pada level dua digit, yaitu mencapai 10,73% ($y-o-y$). Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 8,05% ($y-o-y$). Begitu pula jika dibandingkan inflasi tahunan

nasional triwulan I-2007 yang tercatat sebesar 6,52% (y-o-y), inflasi tahunan kota Padang juga lebih tinggi (Grafik 3.2).



Seperti biasanya, faktor utama inflasi yang terjadi di kota Padang pada triwulan I-2007 didorong dari peningkatan harga barang/jasa pada kelompok bahan makanan dan kelompok makanan jadi. Kelompok bahan makanan mengalami inflasi sebesar 8,88% (q-t-q) dengan sumbangan inflasi sebesar 2,84%. Sedangkan kelompok makanan jadi mengalami inflasi sebesar 2,63% (q-t-q) dengan sumbangan inflasi sebesar 0,45%.

3.2 Determinan Inflasi

Berdasarkan determinannya, inflasi inti (*core inflation*), pada triwulan I-2007 relatif terkendali pada level 1 digit, sementara inflasi non inti (*non core inflation*) bergerak lebih cepat memasuki level 2 digit. Inflasi inti (*core inflation*) kota Padang tercatat sebesar 8,20% (y-o-y) dengan sumbangan sebesar 3,68%, sementara inflasi non inti (*non core inflation*) sebesar 12,79% (y-o-y) dengan sumbangan sebesar 7,05%. Secara umum, naiknya inflasi non inti tersebut terutama dikarenakan faktor kenaikan harga barang-barang jenis konsumsi/food, terutama pada bahan makanan seperti beras, ikan, kelapa, mie, dll.

Pada triwulan I-2007, inflasi pada barang yang masuk kategori *administered price* mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya dan berada pada level 4,69% (y-o-y) dengan sumbangan sebesar 1,12%, lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 6,73% (y-o-y) dengan sumbangan sebesar 1,58%. Sebaliknya, pada kategori *non administered* terjadi lonjakan angka inflasi yang cukup tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu mencapai 12,61% (y-

o-y) dengan sumbangan sebesar 9,61%. Begitu pula dengan inflasi makanan (*food inflation*), pada triwulan I-2007 mengalami peningkatan angka inflasi menjadi sebesar 15,85% (y-o-y) dengan sumbangan sebesar 7,65%. Sedangkan inflasi *non food* berada pada level 5,96% (y-o-y) dengan sumbangan sebesar 3,09% (tabel 3.1).

Tabel 3.1 Perkembangan Inflasi Inti, *Food & Administered* Kota Padang (y-o-y, %)

Kelompok Barang & Jasa	2006								2007	
	Tw. I		Tw. II		Tw. III		Tw. IV		Tw. I	
	Perubhn.	Sumb.	Perubhn.	Sumb.	Perubhn.	Sumb.	Perubhn.	Sumbgn.	Perubhn.	Sumb.
Core	9,92	4,62	11,63	5,52	12,41	5,84	8,95	3,97	8,20	3,68
Non Core	17,80	9,50	20,85	10,94	16,19	8,57	7,34	4,08	12,79	7,05
Food	11,41	5,63	13,19	6,39	8,86	4,38	9,57	4,62	15,85	7,65
Non Food	16,78	8,50	19,56	10,08	19,83	10,04	6,63	3,43	5,96	3,09
Administered	31,92	6,57	33,28	7,02	32,65	6,72	6,73	1,58	4,69	1,12
Non Administered	9,51	7,55	11,98	9,45	9,68	7,69	8,46	6,47	12,61	9,61

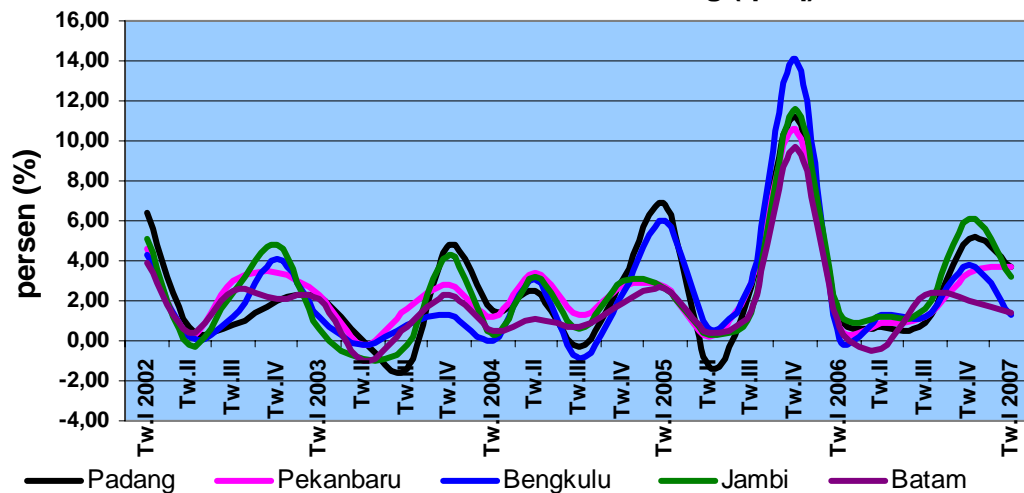
Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, diolah

3.3. Perkembangan Inflasi Kota Padang, Nasional dan Kota-kota di Provinsi Tetangga

Perkembangan harga-harga di kota Padang pada periode triwulan I-2007 diwarnai adanya kelangkaan beberapa komoditi bahan makanan di Sumatera Barat. Kondisi tersebut menyebabkan harga pada triwulan laporan menjadi lebih tinggi dari periode triwulan sebelumnya. Di triwulan I-2007 kota Padang mengalami inflasi sebesar 3,68% (q-t-q), lebih rendah dibandingkan triwulan IV-2006 yang tercatat sebesar 5,07% (q-t-q). Selama periode triwulan I-2007, kota Padang mengalami inflasi pada bulan Januari 2007 sebesar 1,27% (m-t-m), bulan Februari 2007 sebesar 1,14% (m-t-m), dan bulan Maret 2007 sebesar 1,22% (m-t-m).

Secara nasional, inflasi pada triwulan I-2007 sebesar 1,91% (q-t-q) atau lebih rendah dibandingkan triwulan IV-2006 yang tercatat sebesar 2,44% (q-t-q). Sementara itu, pergerakan inflasi triwulanan (q-t-q) kota-kota di provinsi tetangga seperti Bengkulu, Jambi dan Batam pada triwulan I-2007 cenderung menurun dibandingkan triwulan sebelumnya, kecuali di kota Pekanbaru. Kota-kota yang mengalami penurunan angka inflasi yaitu kota Bengkulu dari 3,76% pada triwulan IV-2006 menjadi 1,35% pada triwulan I-2007, kota Jambi dari 6,41% pada triwulan IV-2006 menjadi 3,17% pada triwulan I-2007, dan kota Batam dari 1,97% pada triwulan IV-2006 menjadi 1,40% pada triwulan I-2007. Sementara kota yang mengalami peningkatan angka inflasi yaitu kota Pekanbaru dari 3,36% pada triwulan IV-2006 menjadi 3,67% pada triwulan I-2007 (Grafik 3.3).

Grafik 3.3 Perkembangan Inflasi KBI Padang & KBI-KBI dibawah Koordinasi KKBI Padang (q-t-q)



Dilihat dari inflasi bulanan (*m-t-m*), pada bulan Januari 2007 inflasi tertinggi terjadi di kota Pekanbaru sebesar 2,72% sedangkan inflasi terendah di kota Bengkulu sebesar 0,12%. Pada bulan Februari 2007, inflasi tertinggi terjadi di kota Padang sebesar 1,14% dan terendah di kota Batam sebesar -0,34%. Di bulan Maret 2007, inflasi tertinggi terjadi di kota Bengkulu sebesar 1,26% dan terendah di kota Batam sebesar -0,50% (Tabel 3.2).

Tabel. 3.2 Inflasi KBI Padang dan KBI-KBI dibawah Koordinasi KKBI Padang (m-t-m, %)

Periode	Nasional	Kota				
		Padang	Pekanbaru	Bengkulu	Jambi	Batam
2005						
Jul	0,78	1,12	1,37	1,47	1,53	0,64
Agt	0,55	0,41	1,15	0,93	-0,27	0,86
Sept	0,69	1,20	0,32	0,51	0,15	0,02
Okt	8,70	10,74	8,73	12,50	10,47	7,95
Nov	1,31	2,11	2,47	2,24	1,74	1,95
Des	-0,04	-1,62	-0,74	-0,85	-0,70	-0,30
2006						
Jan	1,36	-0,91	0,56	1,30	0,92	1,32
Feb	0,58	1,02	0,29	-0,70	0,11	0,10
Mar	0,03	1,07	-0,11	-0,50	0,34	-0,75
Apr	0,05	-0,19	-0,09	-0,50	-0,77	-0,56
Mei	0,37	0,24	0,24	0,22	0,70	-0,02
Jun	0,45	0,65	0,73	1,60	1,28	0,19
Jul	0,45	0,93	0,44	0,77	0,27	1,21
Agt	0,33	-0,88	0,72	-0,17	-0,28	0,07
Sept	0,38	0,88	0,05	0,62	1,62	1,00
Okt	0,86	1,77	-0,04	1,15	1,59	-0,02
Nov	0,34	0,27	1,45	0,97	2,42	0,86
Des	1,21	2,96	2,27	1,59	2,01	1,27
2007						
Jan	1,04	1,27	2,72	0,12	1,49	2,26
Feb	0,62	1,14	0,79	-0,02	0,97	-0,34
Mar	0,24	1,22	0,13	1,26	0,68	-0,50
Akumulasi 3 bln	1,90	3,63	3,64	1,36	3,14	1,42
y-t-d (Mar'07)	1,91	3,68	3,67	1,35	3,17	1,40

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, diolah.

Dari pergerakan angka inflasi tersebut, laju inflasi s.d Maret 2007 (*y-t-d*) tertinggi masih terjadi di kota Padang dengan laju inflasi sebesar 3,68%, disusul kota Pekanbaru sebesar 3,67%, dan berturut-turut kota Jambi sebesar 3,17%, kota Batam dengan laju inflasi sebesar 1,40% dan kota Bengkulu sebesar 1,35%. Sementara laju inflasi nasional sampai dengan Maret 2007 sebesar 1,91%. Dengan demikian, respon harga di kota Padang, Pekanbaru dan Jambi jauh lebih tinggi dibandingkan nasional. Sebaliknya, pada kota Batam dan Bengkulu respon terhadap harga-harga relatif terkendali.

3.4. Inflasi Berdasarkan Kelompok Barang & Jasa

Berdasarkan kelompok barang & jasa (*q-t-q*), semua kelompok barang & jasa mengalami inflasi. Seperti halnya triwulan IV-2006, inflasi tertinggi terjadi pada kelompok bahan makanan sebesar 8,88% (sumb. inflasi 2,84%), disusul kemudian kelompok makanan jadi sebesar 2,63% (sumb. inflasi 0,45%). Selanjutnya secara berturut-turut pada kelompok sandang sebesar 1,16% (sumb. inflasi 0,08%), kelompok perumahan sebesar 0,99% (sumb. inflasi 0,19%), kelompok transportasi inflasi sebesar 0,50% (sumb. inflasi 0,08%), kelompok pendidikan sebesar 0,46% (sumb. inflasi 0,03%), dan kelompok kesehatan sebesar 0,40% dengan sumbangan inflasi sebesar 0,01% (Tabel 3.3).

Tabel 3.3 Perkembangan Inflasi Padang Menurut Kel. Barang (*q-t-q*, %)

Kelompok Barang & Jasa	2006								2007	
	Tw. I		Tw. II		Tw. III		Tw. IV		Tw. I	
	Perubhn.	Sumb.	Perubhn.	Sumb.	Perubhn.	Sumb.	Perubhn.	Sumb.	Perubhn.	Sumb.
UMUM / TOTAL	1,17	1,17	0,71	0,71	0,93	0,93	5,07	5,07	3,68	3,68
Bahan Makanan	-1,34	-0,43	-2,35	-0,74	-0,63	-0,19	12,59	3,76	8,88	2,84
Makanan Jadi	5,43	0,88	0,05	0,01	2,98	0,50	4,14	0,71	2,63	0,45
Perumahan	2,29	0,44	4,82	0,93	1,15	0,23	1,74	0,35	0,99	0,19
Sandang	0,55	0,04	5,28	0,37	0,80	0,06	2,06	0,15	1,16	0,08
Kesehatan	5,52	0,16	-0,18	-0,01	0,32	0,01	1,56	0,05	0,40	0,01
Pendidikan	0,11	0,01	1,57	0,09	5,46	0,31	0,34	0,02	0,46	0,03
Transportasi & Komk	0,48	0,08	0,31	0,05	0,10	0,02	0,17	0,03	0,50	0,08

Sumber : BPS Prov. Suma

Kelompok bahan makanan pada triwulan I-2007 masih berada pada level inflasi yang cukup tinggi. Kenaikan harga beberapa komoditi pada kelompok bahan makanan terjadi akibat kelangkaan barang di pasar Sumatera Barat. Kelompok bahan makanan pada triwulan I-2007 mengalami inflasi sebesar 8,88% (*q-t-q*) dengan sumbangan inflasi sebesar 2,84%.

Inflasi pada kelompok bahan makanan di triwulan laporan disebabkan oleh kenaikan harga yang terjadi pada sub kelompok lemak dan minyak sebesar 23,68%, disusul kemudian inflasi pada sub kelompok padi-padian sebesar 22,19%, sub kelompok ikan segar sebesar 16,00%, sub kelompok buah-buahan sebesar 10,44%, sub kelompok ikan diawetkan sebesar 9,72%, sub kelompok sayur-sayuran sebesar 6,39%, dan sub kelompok bahan makanan lainnya sebesar 3,94% (Tabel 3.4).

Tabel 3.4 Perkembangan Inflasi Kelompok Bahan Makanan (q-t-q, %)

Kelompok / Subkelompok	2005		2006				2007
	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I
Bahan Makanan	5,75	10,43	-1,34	-2,35	-0,63	12,59	8,88
Padi-padian, Ubi-ubian dan Hasil-hasilnya	1,59	4,86	18,84	-9,65	0,24	8,78	22,19
Daging dan Hasil-hasilnya	0,48	7,93	-2,14	2,46	3,82	-0,99	-3,77
Ikan Segar	10,28	0,28	-14,08	15,01	1,37	-13,57	16,00
Ikan Diawetkan	4,33	14,78	-9,28	2,99	-4,24	6,76	9,72
Telur, Susu & Hasil-hasilnya	1,77	5,27	-2,10	1,06	2,68	2,09	-2,70
Sayur-sayuran	6,84	21,05	-2,64	3,20	-11,04	14,50	6,39
Kacang-kacangan	4,27	7,97	0,68	13,58	1,31	-4,17	-0,49
Buah-buahan	-4,22	16,26	1,95	-4,37	-5,93	16,47	10,44
Bumbu-bumbuan	27,33	39,94	-21,60	-21,00	1,02	100,30	-0,05
Lemak & Minyak	5,62	-2,38	-0,18	2,49	-0,76	5,06	23,68
Bahan makanan lainnya	1,36	0,35	-0,02	-2,61	5,93	10,49	3,94

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, diolah.

Sementara itu, sub kelompok yang lainnya mengalami deflasi, dengan urutan sebagai berikut : sub kelompok daging & hasil-hasilnya sebesar -3,77%, sub kelompok telur, susu & hasil-hasilnya sebesar -2,70%, sub kelompok kacang-kacangan sebesar -0,49% dan sub kelompok bumbu-bumbuan sebesar -0,05%. Walaupun mengalami deflasi, namun komoditi-komoditi tersebut sumbangannya lebih rendah dibandingkan komoditi yang mengalami inflasi.

Kelangkaan beras secara nasional berdampak pula terhadap supply beras di Sumatera Barat. Sumatera Barat yang menjadi salah satu lumbung/sumber beras utama di Indonesia, tidak luput dari permasalahan kenaikan harga beras, yang telah mengalami peningkatan sejak akhir tahun 2006. Solok yang menjadi salah satu sumber produksi beras di Sumatera Barat, mengalami penurunan produksi karena cuaca yang sering hujan. Seringnya hujan menyebabkan proses penjemuran padi terhambat sehingga gabah yang digiling juga berkurang. Kelangkaan tersebut berimbas pada harga beras di beberapa daerah di Sumatera Barat dengan kenaikan hingga 20%. Operasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masuknya beras impor ke Sumatera Barat sebanyak 12.000 ton pada bulan Februari 2007 secara temporer dapat mengerem laju

kenaikan harga beras ke tingkat yang lebih tinggi, namun demikian belum dapat menurunkan harga beras ke harga "normal".

Selain itu, kondisi cuaca yang buruk juga membuat harga ikan mengalami lonjakan drastis, seperti ikan tongkol dan tuna. Kenaikan harga dipicu berkurangnya pasokan ikan yang masuk ke pasar-pasar di kota Padang karena adanya keenganan nelayan untuk melaut lebih jauh akibat cuaca buruk. Kondisi ini ditambah lagi dengan meningkatnya permintaan ikan sebagai dampak pengalihan konsumsi daging ayam. Masih belum berhentinya isu flu burung (*avian influenza*) di Sumatera Barat membuat penjualan ayam potong, terutama jenis ayam ras, mengalami kelesuan. Masyarakat masih khawatir membeli dan mengkonsumsi ayam, dan lebih memilih alternatif jenis lauk lainnya. Turunnya harga daging ayam ras dari Rp14.000-Rp15.000/ekor menjadi Rp12.000-Rp13.000/ekor belum mendongkrak peningkatan penjualan daging ayam ras. Berdasarkan survei dinas Pertanian & Peternakan kota Padang, penurunan omzet pedagang daging ayam ras mencapai 50%.

Angka inflasi **kelompok makanan jadi** yang meningkat pada triwulan IV-2006, mengalami perlambatan ke tingkat inflasi yang lebih rendah. Pada triwulan I-2007 kelompok ini mengalami penurunan angka inflasi menjadi sebesar 2,63% (*q-t-q*). Inflasi tersebut disumbang dari inflasi yang terjadi pada sub kelompok makanan jadi sebesar 2,82%, selanjutnya sub kelompok tembakau & minuman beralkohol sebesar 2,52% dan sub kelompok minuman yang tidak beralkohol sebesar 2,13% (Tabel 3.5).

Tabel 3.5 Perkembangan Inflasi Kelompok Makanan Jadi (*q-t-q*, %)

Kelompok / Subkelompok	2005		2006				2007
	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I
Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	2,61	5,72	5,43	0,05	2,98	4,14	2,63
Makanan Jadi	0,88	10,20	1,87	0,03	5,38	4,27	2,82
Minuman yang Tidak Beralkohol	14,03	0,22	4,09	0,21	-0,30	1,70	2,13
Tembakau & Minuman Beralkohol	-0,01	0,00	14,18	0,00	0,00	5,22	2,52

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, diolah.

Adanya kebijakan pemerintah menaikkan Harga Jual Eceran (HJE) Rokok sebesar 7% mulai 1 Maret 2007, nampaknya telah diantisipasi produsen rokok dengan menaikkan harga jual rokok, malah sebelum kebijakan tersebut diberlakukan, yaitu diantaranya pada rokok kretek, rokok kretek filter dan rokok putih yang berada pada kelompok makanan jadi. Selain HJE, tarif cukai spesifik setiap golongan rokok juga direncanakan meningkat. Untuk rokok golongan I ditetapkan sebesar Rp7/batang, rokok golongan II sebesar Rp5/batang, dan rokok golongan III Rp3/batang mulai 1 Juli 2007.

Sementara itu, harga gula pasir yang sempat melonjak hingga Rp7.700/kg di awal tahun 2007, secara perlahan mengalami penurunan dengan adanya impor gula asal Thailand sebanyak 2.000 ton yang masuk ke Sumatera Barat pada bulan Januari 2007. Kenyataan lambatnya penurunan harga gula pasca impor 2.000 ton, menyebabkan pemprov Sumatera Barat mendatangkan kembali tambahan 4.000 ton gula pasir impor. Tambahan impor tersebut guna mengimbangi kebutuhan gula Sumatera Barat yang mencapai 4.000-5.000 ton/bulan atau sekitar 60.000 ton/tahun. Secara nasional, kebutuhan gula pasir sebesar 4,2 juta ton/tahun, namun produksi gula Indonesia baru mencapai 3,6 juta ton/tahun.

Kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar, mengalami inflasi sebesar 0,99% (*q-t-q*) pada triwulan laporan atau lebih rendah dibandingkan inflasi pada triwulan IV-2006 yang tercatat sebesar 1,74%. Penurunan angka inflasi tersebut berasal dari sub kelompok bahan bakar, penerangan & air yang sebelumnya mengalami inflasi sebesar 3,75% pada triwulan IV-2006, maka di triwulan laporan tidak terjadi inflasi maupun deflasi. Sementara itu, sub kelompok penyelenggaraan rumah tangga mengalami inflasi sebesar 1,32%, sub kelompok biaya tempat tinggal mengalami inflasi sebesar 1,08%, dan sub kelompok perlengkapan rumah tangga sebesar 4,00% (Tabel 3.6).

Tabel 3.6 Perkembangan Inflasi Kelompok Perumahan (*q-t-q*, %)

Kelompok / Subkelompok	2005		2006				2007
	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I
Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	0,45	8,22	2,29	4,82	1,15	1,74	0,99
Biaya Tempat Tinggal	0,43	1,74	4,87	4,72	1,89	0,69	1,08
Bahan Bakar, Penerangan & Air	0,25	19,15	0,00	6,82	0,01	3,75	0,00
Perlengkapan Rumah Tangga	1,57	7,96	-0,28	1,05	1,71	0,41	4,00
Penyelenggaraan Rumah Tangga	0,00	5,85	-0,05	1,46	0,86	1,05	1,32

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, diolah.

Gempa bumi yang melanda Sumatera Barat pada bulan Maret 2007, menyebabkan banyak bangunan yang mengalami kerusakan bahkan kehancuran. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan diduga memicu peningkatan permintaan bahan bangunan seperti semen, kayu, batu batako, batu bata, seng dan lain-lain. Meningkatnya permintaan sementara pasokannya yang relatif tetap, mendorong kenaikan harga pada barang-barang bahan bangunan tersebut. Kondisi tersebut diperparah dengan kelangkaan kayu untuk bahan bangunan yang masih terjadi di Sumatera Barat. Selain bahan bangunan, permintaan perlengkapan rumah tangga seperti lemari pakaian dan meja kursi tamu juga mengalami peningkatan untuk menggantikan yang rusak akibat gempa. Peningkatan tersebut diiringi dengan kenaikan harga penjualan yang memicu inflasi subkelompok perlengkapan rumah tangga.

Inflasi **kelompok transportasi, komunikasi & jasa keuangan** pada triwulan I-2007 berada dibawah level 1%. Inflasi pada kelompok ini umumnya akan mengalami lonjakan apabila terdapat kenaikan/penurunan harga komoditi/barang yang diatur harganya oleh pemerintah (*administered price*). Pada triwulan I-2007 inflasi sektor ini sebesar 0,50% (*q-t-q*). Angka tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,17%. Inflasi pada triwulan laporan disumbang oleh inflasi yang terjadi pada sub kelompok sarana & penunjang transportasi sebesar 1,25% dan sub kelompok transportasi sebesar 0,56%. Sedangkan sub kelompok jasa keuangan dan sub kelompok komunikasi & pengiriman tidak mengalami perubahan harga di triwulan laporan (Tabel 3.7).

Tabel 3.7 Perkembangan Inflasi Kelompok Transportasi (q-t-q, %)

Kelompok / Subkelompok	2005		2006				2007
	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I
Transportasi, Komunikasi & Jasa Keuangan	0,58	30,61	0,48	0,31	0,10	0,17	0,50
Transportasi	0,75	42,24	0,11	0,37	0,09	-0,05	0,56
Komunikasi & Pengiriman	0,00	0,41	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
Sarana & Penunjang Transportasi	0,80	2,34	6,99	0,00	0,44	4,37	1,25
Jasa Keuangan	0,00	1,19	4,46	0,00	0,39	0,00	0,00

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, diolah.

Komoditi penyumbang inflasi pada kelompok transportasi, komunikasi & jasa keuangan diantaranya adalah bahan pelumas/oli dan ban luar motor. Sementara itu, naiknya harga mobil dan motor pada triwulan laporan merupakan imbas dari permintaan mobil dan motor secara nasional. Dirjen Industri Alat Transportasi dan Telematika Depperin Budi Dharmadi mengatakan sejak Maret 2007 telah terjadi kelebihan permintaan (*over demand*) di industri otomotif nasional karena produsen tidak mengimbangnya dengan volume produksi yang sepadan. Kondisi ini membuat stok mobil di gudang pabrik semakin menipis yang memaksa konsumen harus mengantre/pesan (*indent*) selama beberapa bulan. Saat ini jumlah indent cukup besar. Ini berarti *demand* lebih banyak daripada produksi.

Inflasi **kelompok kesehatan** di triwulan I-2007 kembali mengalami inflasi yang lebih rendah dari triwulan sebelumnya, yaitu sebesar 0,40% (*q-t-q*). Inflasi yang terjadi tersebut disumbang dari sub kelompok obat-obatan sebesar 2,06%, sub kelompok jasa perawatan & jasmani sebesar 1,31%, dan sub kelompok jasa kesehatan sebesar 1,29%. Sementara itu, sub kelompok perawatan jasmani & kosmetik mengalami deflasi sebesar -0,36 (Tabel 3.8).

Tabel 3.8 Perkembangan Inflasi Kelompok Kesehatan (q-t-q, %)

Kelompok / Subkelompok	2005		2006				2007
	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I
Kesehatan	0,92	2,30	5,52	-0,18	0,32	1,56	0,40
Jasa Kesehatan	5,61	0,00	11,45	0,00	0,00	0,00	1,29
Obat-obatan	0,00	1,55	2,37	2,32	0,00	-2,98	2,06
Jasa Perawatan & Jasmani	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	0,00	1,31
Perawatan Jasmani & Kosmetik	-0,82	3,74	4,05	-0,69	0,12	3,24	-0,36

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, diolah.

Inflasi pada **kelompok pendidikan, rekreasi & olahraga** masih berada pada level dibawah 1%. Di triwulan laporan, kelompok ini mengalami inflasi sebesar 0,46% (q-t-q). Angka tersebut sedikit lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,34%. Inflasi yang terjadi hanya disumbang dari inflasi pada sub kelompok kursus pelatihan sebesar 20,33%. Sementara itu, sub kelompok rekreasi kembali mengalami deflasi sebesar -1,16%. Sedangkan sub kelompok jasa pendidikan, sub kelompok perlengkapan/peralatan pendidikan, dan sub kelompok olahraga tidak mengalami perubahan harga pada triwulan laporan (Tabel 3.9).

Tabel 3.9 Perkembangan Inflasi Kelompok Pendidikan (q-t-q, %)

Kelompok / Subkelompok	2005		2006				2007
	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I
Pendidikan, Rekreasi & Olahraga	0,37	8,25	0,11	1,57	5,46	0,34	0,46
Jasa Pendidikan	0,77	8,85	0,00	0,15	8,45	0,82	0,00
Kursus Pelatihan	0,00	0,00	-2,52	0,00	0,00	0,00	20,33
Perlengkapan/Peralatan Pendidikan	-1,64	8,87	1,70	4,62	-0,80	0,52	0,00
Rekreasi	0,38	6,79	0,00	5,09	0,38	-1,46	-1,16
Olahraga	0,00	3,72	0,66	0,00	4,21	0,26	0,00

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, diolah.

Inflasi pada sub kelompok kursus-kursus/pelatihan pada triwulan laporan merupakan penyesuaian tarif yang dilakukan oleh beberapa bimbingan belajar di kota Padang. Tingginya minat pelajar untuk mengambil bimbingan belajar diluar pelajaran reguler sekolah, merupakan dampak dari adanya ketentuan lulus Ujian Nasional (UN) bagi pelajar SMP dan SMU. Menghadapi UN yang berlangsung di bulan April 2007, penyelenggara bimbingan belajar mulai membuka paket bimbingan belajar pada triwulan I-2007. Sementara itu, walaupun harga kertas naik sejak Februari 2007 akibat bahan baku yang berkurang dan tingginya permintaan luar negeri, namun pedagang di kota Padang masih menjual dengan harga lama. Hal ini dikarenakan stok yang ada di toko-toko di kota Padang dibeli dengan harga lama juga. Tidak hanya kertas yang menggunakan harga lama, namun juga buku tulis bergaris isi 40 lembar. Kebijakan pedagang tersebut

berdampak tidak adanya inflasi maupun deflasi pada sub kelompok perlengkapan/peralatan pendidikan.

Di triwulan I-2007 komoditi-komoditi pada **kelompok sandang** mengalami penurunan angka inflasi setelah mengalami inflasi pasca hari raya keagamaan di triwulan IV-2006. Inflasi pada kelompok sandang pada triwulan laporan sebesar 1,16% (*q-t-q*) atau lebih rendah dibandingkan inflasi triwulan IV-2006 yang tercatat sebesar 2,06%. Inflasi yang terjadi pada kelompok sandang masih berasal dari sub kelompok barang pribadi & sandang lainnya sebesar 2,86%, disusul kemudian sub kelompok sandang wanita sebesar 0,45%, sub kelompok sandang anak-anak yang mengalami inflasi sebesar 0,14%, dan sub kelompok sandang laki-laki sebesar 0,09% (Tabel 3.10).

Tabel 3.10 Perkembangan Inflasi Kelompok Sandang (*q-t-q*, %)

Kelompok / Subkelompok	2005		2006				2007
	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I
Sandang	3,62	4,23	0,55	5,28	0,80	2,06	1,16
Sandang Laki-laki	1,02	1,23	0,77	1,50	1,33	1,73	0,09
Sandang Wanita	0,52	2,36	-0,83	5,29	0,54	1,09	0,45
Sandang Anak-anak	2,44	1,85	0,79	1,35	1,55	1,95	0,14
Barang Pribadi, Sandang lainnya	9,63	9,45	1,57	9,58	0,38	3,13	2,86

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, diolah.

Sesuai siklusnya, biasanya permintaan produk sandang, baik pria maupun wanita, akan mengalami penurunan pasca hari raya keagamaan dan tahun ajaran baru sekolah. Meskipun terdapat beberapa komoditi yang mengalami kenaikan harga, seperti kain sarung dan baju kaus, namun peningkatannya relatif tidak setinggi triwulan sebelumnya. Meningkatnya harga kain sarung merupakan dampak dari meningkatnya permintaan terkait dengan maraknya pemberian sumbangan kepada korban gempa, yang umumnya berupa pakaian pantas pakai dan kain sarung.

Sementara itu, pada triwulan laporan, harga emas di pasar domestik masih cukup tinggi. Di bulan Januari 2007, harga emas di kota Padang berkisar pada harga Rp460.000-Rp470.000/emas. Menguatnya rupiah terhadap dollar tidak secara langsung menurunkan harga emas domestik. Harga emas selain dipengaruhi oleh fluktuasi nilai rupiah, juga dipengaruhi oleh permintaan dan harga internasional.

3.5. Komoditi dan Jasa Penyumbang Inflasi/Deflasi Terbesar

Dilihat secara lebih spesifik, komoditi-komoditi yang merupakan penyumbang inflasi terbesar (total sumbangan sebesar 3,90%) pada triwulan I-2007 (*q-t-q*), antara lain adalah : beras dengan sumbangan inflasi sebesar 1,89%, selanjutnya adalah ikan tongkol (0,58%), kelapa (0,34%), mie (0,19%), minyak goreng (0,14%), ikan tuna (0,10%), rokok kretek filter (0,09%), nasi (0,08%), bayam (0,07%), tomat sayur (0,06%), emas perhiasan (0,06%), jengkol (0,04%), bahan pelumas/oli (0,04%), bimbingan belajar (0,04%), meja kursi tamu (0,03%), lemari pakaian (0,03%), ikan asin belah (0,03%), anggur (0,03%), dendeng daging (0,03%), dan daun singkong sebesar 0,03% (Tabel 3.11).

Tabel 3.11 Komoditi Penyumbang Inflasi Terbesar Terhadap Inflasi/Deflasi Kota Padang (*q-t-q*)

No.	Komoditi	Tw IV/06		Komoditi	Tw I/07	
		Inflasi	Sumb.		Inflasi	Sumb.
1	Cabe Merah	183,94%	2,67%	Beras	23,56%	1,89%
2	Beras	9,46%	0,73%	Tongkol	47,72%	0,58%
3	Minyak Tanah	15,39%	0,27%	Kelapa	50,88%	0,34%
4	Mie	18,75%	0,20%	Mie	15,56%	0,19%
5	Rokok Kretek Filter	6,12%	0,14%	Minyak Goreng	10,62%	0,14%
6	Pepaya	37,93%	0,13%	Tuna	35,13%	0,10%
7	Cabe Hijau	118,19%	0,10%	Rokok Kretek Filter	3,79%	0,09%
8	Bawang Merah	14,20%	0,08%	Nasi	3,57%	0,08%
9	Kangkung	20,74%	0,08%	Bayam	20,84%	0,07%
10	Salak	100,01%	0,07%	Tomat Sayur	35,98%	0,06%
11	Ketupat / Lontong Sayur	3,85%	0,07%	Emas Perhiasan	2,91%	0,06%
12	Minyak Goreng	5,57%	0,07%	Jengkol	28,09%	0,04%
13	Emas Perhiasan	3,33%	0,07%	Bahan Pelumas/Oli	19,75%	0,04%
14	Rokok Kretek	4,41%	0,07%	Bimbingan Belajar	35,71%	0,04%
15	Pisang	11,54%	0,06%	Meja Kursi Tamu	13,23%	0,03%
16	Taman Kanak-Kanak	36,37%	0,06%	Lemari Pakaian	18,59%	0,03%
17	Kentang	14,66%	0,05%	Ikan Asin Belah	20,53%	0,03%
18	Daun Singkong	35,94%	0,05%	Anggur	21,28%	0,03%
19	Tomat Sayur	33,64%	0,05%	Dendeng	11,11%	0,03%
20	Bawang Putih	22,22%	0,04%	Daun Singkong	14,96%	0,03%
	Total Sumbangan Komoditi lain		5,06%	Total Sumbangan Komoditi lain		3,90%
	Inflasi	5,07%	0,01%	Inflasi	3,68%	-0,22%

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, diolah

Selain terdapat komoditi/jasa yang mengalami inflasi, pada triwulan I-2007 terdapat pula beberapa komoditi/jasa yang mengalami deflasi. Komoditi-komoditi yang mengalami deflasi terbesar, dengan total sumbangan sebesar -0,72%, diantaranya adalah pepaya dengan sumbangan deflasi sebesar -0,18%, selanjutnya adalah daging ayam ras (-0,14%), telur ayam ras (-0,07%), cabe merah (-0,05%), kentang (-0,05%), petai (-0,04%), jeruk (-0,04%), ikan aso-aso (-0,03%),

ikan teri (-0,02%), pisang (-0,02%), apel (-0,02%), sawi hijau (-0,01%), televise berwarna (-0,01%), udang basah (-0,01%), kacang tanah (-0,01%), semangka (-0,01%), alpukat (-0,01%), sabun mandi (-0,01%), kakap merah (-0,01%), dan kembung/gembung sebesar -0,01% (Tabel 3.12).

Tabel 3.12 Komoditi Penyumbang Deflasi Terbesar Terhadap Inflasi/Deflasi Kota Padang (q-t-q)

No.	Komoditi	Tw IV/06		Komoditi	Tw I/07	
		Deflasi	Sumb.		Deflasi	Sumb.
1	Tongkol	-20,72%	-0,33%	Pepaya	40,62%	-0,18%
2	Udang Basah	-27,14%	-0,09%	Daging Ayam Ras	13,13%	-0,14%
3	Tuna	-22,51%	-0,09%	Telur Ayam Ras	8,03%	-0,07%
4	Tempe	-31,03%	-0,09%	Cabe Merah	1,36%	-0,05%
5	Kerapu	-27,14%	-0,06%	Kentang	12,15%	-0,05%
6	Daging Ayam Ras	-4,81%	-0,06%	Petai	27,77%	-0,04%
7	Kakap Merah	-12,12%	-0,03%	Jeruk	6,88%	-0,04%
8	Dendeng	-10,00%	-0,03%	Aso-Aso	11,76%	-0,03%
9	Sekolah Dasar	-7,78%	-0,02%	Teri	12,40%	-0,02%
10	Jengkol	-12,55%	-0,02%	Pisang	3,45%	-0,02%
11	Cumi-Cumi	-10,57%	-0,02%	Apel	8,44%	-0,02%
12	Televisi Berwarna	-6,55%	-0,01%	Sawi Hijau	20,96%	-0,01%
13	Kain Batik	-16,67%	-0,01%	Televisi Berwarna	5,73%	-0,01%
14	Obat Dengan Resep	-10,87%	-0,01%	Udang Basah	3,93%	-0,01%
15	Ketimun	-9,37%	-0,01%	Kacang Tanah	8,91%	-0,01%
16	Nangka Muda	-9,38%	-0,01%	Semangka	11,11%	-0,01%
17	Tenggiri	-10,01%	-0,01%	Alpukat	9,09%	-0,01%
18	Selar	-9,28%	-0,01%	Sabun Mandi	2,11%	-0,01%
19	Asam	-14,28%	-0,01%	Kakap Merah	2,75%	-0,01%
20	Ketela Rambat/Ubi Jalar	-10,00%	-0,01%	Kembung/Gembung	1,36%	-0,01%
	Total Sumbangan		-0,91%	Total Sumbangan		-0,72%
	Komoditi lain		5,98%	Komoditi lain		4,40%
	Inflasi	5,07%		Inflasi	3,68%	

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, diolah

Halaman ini sengaja dikosongkan

Ironi di Provinsi Surplus Beras, Harga Beras Masih Tinggi

Ada yang aneh terjadi di Sumbar beberapa waktu belakangan. Kendati produksi beras dianggap surplus 232.045 ton beras, namun sejumlah daerah terjadi kelangkaan beras hingga harga beras pun merangkak naik. Meski awalnya malu-malu, sejumlah kepala daerah mengambil sikap melakukan operasi pasar.

Kondisi ini memang terbilang aneh. Provinsi yang menjadi salah satu dari sembilan provinsi di Indonesia penyangga beras nasional, meski melakukan operasi pasar. Apalagi sampai bulan Juli tahun lalu, ketersediaan beras di Sumbar sudah mencapai angka 1.041.753 ton dari sasaran produksi tahun ini 1.879.483 ton dan kebutuhan Sumbar sebesar 809.708 ton.

Artinya, sampai bulan tersebut, Sumbar sudah surplus beras sebanyak 232.045 ton. Dengan begitu, secara otomatis persoalan beras tidak perlu dipersoalkan. Surplus beras inilah yang didistribusikan untuk menyuplai beras untuk beberapa daerah tetangga seperti Jambi, Riau, Bengkulu dan Sumatera Utara. Bahkan, Asisten II Sekprov Sumbar Surya Dharma Sabirin awal pekan pertama September lalu, mengaku 60 persen kebutuhan berasnya disuplai dari Sumbar.

Kepala Divre Perum Bulog Sumbar Sarmi Anton Samawi juga mengaku, stok beras di Bulog masih tersedia sebanyak 21 ribu ton. Untuk menambah stok itu, Bulog sudah mengajukan tambahan beras sebanyak 19 ribu ton lagi ke pemerintah pusat. Total stok beras itu (ditambah 19 ribu ton) tidak hanya untuk raskin di Sumbar, tapi juga daerah tetangga kita Jambi.

Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi, juga menguatkan pernyataan ini. Selaku tempat menampung stock cadangan nasional, diyakini tidak mempengaruhi harga beras di pasaran. Bahkan stock beras ini pun, bukan untuk menggelar operasi pasar. Operasi pasar baru dilakukan kalau memang harga di pasaran memang sudah cukup mengkhawatirkan. Proses operasi pasar itu sendiri tidak semudah itu melempar ke pasaran, itu perlu persetujuan lebih Menteri Perdagangan.

Pernyataan ini sempat membawa angin segar bagi masyarakat Sumbar. Tak ada yang perlu dikhawatirkan dengan stock kebutuhan paling pokok itu. Pro/kontra dilakukan operasi pasar pun, mulai meredup. Tapi, fakta tak dapat didiamkan. Tak beberapa lama usai pernyataan itu diungkapkan, harga beras di pasaran merangkak naik.

Hingga minggu kedua Desember 2006 lalu, harga beras di Pasar Raya Padang mencapai Rp5.925 per kilogram, sedangkan di Pasaman Barat mencapai Rp5.100 per kilogram. Jika dibandingkan pada minggu keempat November 2006 harga beras mengalami peningkatan berkisar Rp400 hingga Rp500 per kilogram.

Tak urung, pro/kontra perlunya operasi pasar kembali menguat. Kepala B2KP Sumbar Suhardi Emha menguraikan terjadi kenaikan konsumsi beras masyarakat Sumbar dari tahun sebelumnya 659.047 ton menjadi 809.708 ton tahun ini, menjadi salah satu pemicu terjadinya operasi pasar ini.

Tercatat di beberapa daerah dilakukan operasi pasar. Bulog Divre Regional Sumbar mengaku sejak 16 Desember tahun lalu telah menggelar operasi pasar (OP). Bahkan, tahap awal OP digelar di 10 titik di Kota Padang. Sesuai dengan permintaan dari walikota Padang yang meminta agar untuk melakukan OP sebanyak 1.000 ton beras dengan harga Rp4.475 per kilo atau Rp5.220 per gantang. Kondisi yang sama juga terjadi di Padang Pariaman dan sejumlah daerah yang pernah dianggap lumbung padi.

Sampai akhir bulan lalu, Bulog Divre Sumbar mengaku sudah mendrop 2.900 ton beras dari 7.500 ton beras yang direncanakan untuk OP. Operasi ini sudah dimulai semenjak 16 Desember tahun lalu. Untuk Kota Padang sudah terealisasi 1800 ton dari 4.000 ton yang ditargetkan. Sisanya masih menumpuk di gudang Bulog dan diperkirakan 22 Februari mendatang bakal masuk lagi 6.000 ton beras impor ke Sumbar.

Kendati OP sudah digelar sekitar dua bulan, namun harga beras dipasaran belum menunjukkan kestabilan. Banyak pihak yang menyorot tujuan OP itu, dinilai pemerintah tidak perlu menggelar OP karena tak jelas orientasinya. Namun, menurut Bulog, belum stabilnya harga ini juga diakibatkan sedikitnya pasokan beras lokal di pasaran.

Ironis memang, provinsi katanya dianggap penyangga pangan nasional, mesti berkuat juga dengan kelangkaan beras. Ekonom Unand Prof Dr Elfindri menilai ini salah satu bentuk tak beresnya pengaturan distribusi beras di Sumbar. Kalau pengaturan distribusi ini diawasi dengan benar, ia yakin tak akan terjadi kelangkaan beras di pasaran.

Analisis Harga Beras di Zona Padang*

Kelangkaan beras yang terjadi secara nasional, terjadi pula pada provinsi-provinsi di zona Padang. Operasi pasar yang dilakukan Bulog dan pemda belum secara efektif menurunkan harga beras yang sudah cukup tinggi. Di zona Padang, kenaikan harga beras tertinggi terjadi di Jambi yang mengalami peningkatan harga sebesar 16,34% dari posisi Desember 2006.

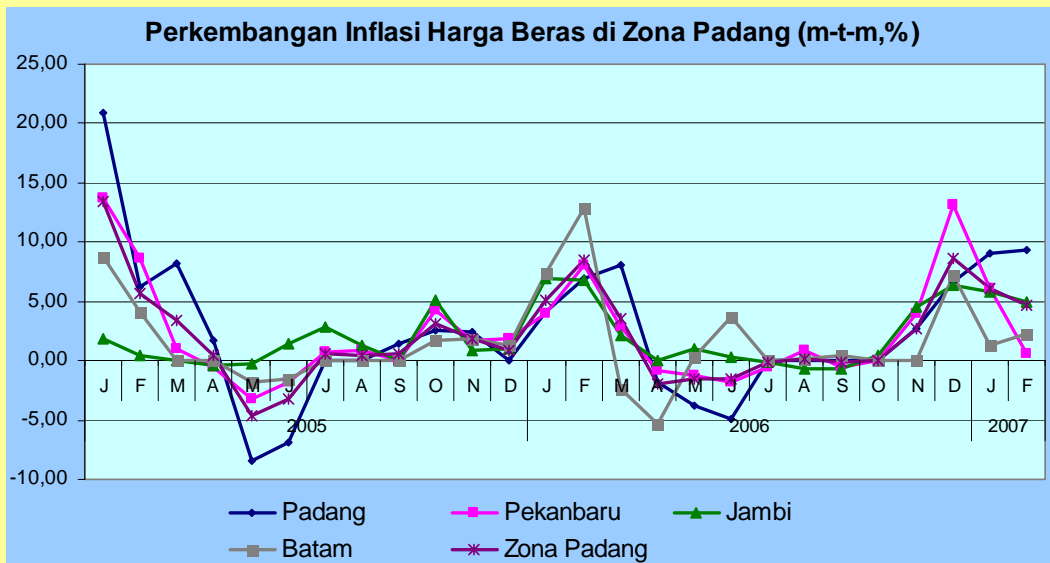
Perkembangan Harga Beras di Zona Padang

Kota	Jenis	26 Des'06	Januari 2007					Februari 2007				Maret 2007	
			2	9	16	23	30	6	13	20	27	6	13
Pekanbaru	Mundarti	6.000	6.500	6.500	6.800	6.800	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Padang	IR 42	5.625	5.938	5.938	5.938	5.300	6.060	6.060	6.250	6.250	6.375	5.875	5.875
Jambi	IR 42	4.750	4.800	4.800	4.800	5.750	5.750	5.500	5.800	5.526	5.526	5.526	5.526

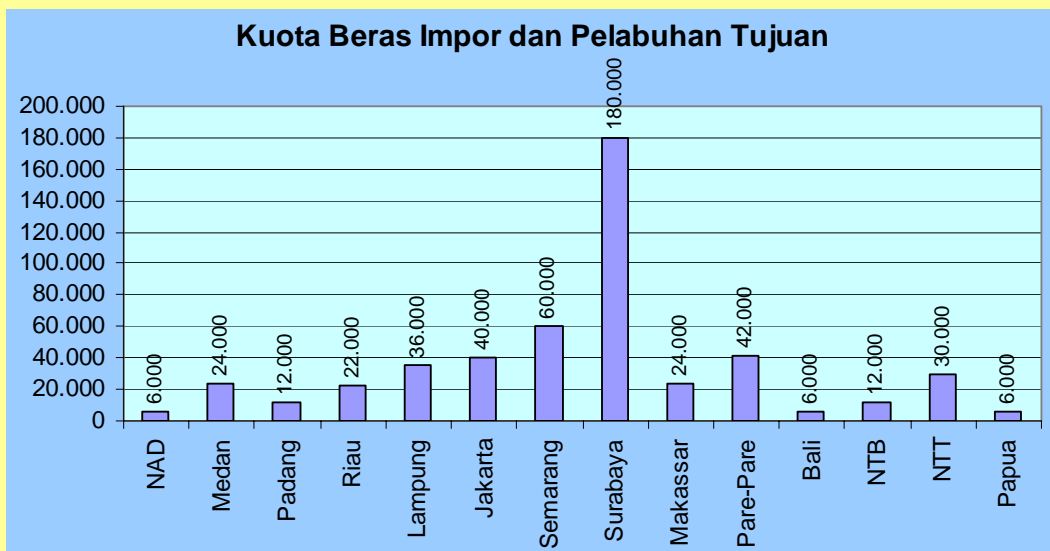
Di zona Padang, Sumatera Barat merupakan lumbung padi yang menyuplai beras ke Riau dan Jambi. Sampai dengan Juli 2006 ketersediaan beras di Sumatera Barat mencapai 1.041.753 ton dari sasaran 1.879.483 ton dan kebutuhan Sumatera Barat sebesar 809.708, yang berarti terjadi surplus beras sebanyak 232.045 ton. Namun bersamaan dengan cuaca yang terus menerus hujan di akhir tahun 2006 menyebabkan pola tanam padi dibanyak provinsi di Indonesia mengalami pemunduran bahkan penurunan panen/produksi padi. Penurunan produksi padi terjadi pula di Kabupaten Solok, yang merupakan sentra produksi padi di Sumatera Barat, sehingga suplai beras di pasar Sumatera Barat agak berkurang. Hal tersebut diperparah dengan banyaknya produksi padi Sumatera Barat yang dijual ke luar provinsi Sumatera Barat, seperti Riau dan Jambi, karena harga jualnya yang lebih tinggi.

Kenaikan harga beras tersebut secara signifikan telah mendorong inflasi ke tingkat yang lebih tinggi. Secara m-t-m, pergerakan inflasi beras terjadi mulai bulan November 2006. Kenaikan harga beras tersebut lebih cepat dari biasanya yang terjadi pada musim tanam setiap bulan Desember/Januari. Memasuki bulan Januari 2007, di kota Pekanbaru, Batam dan Jambi sebenarnya terjadi penurunan angka inflasi, namun belum mencapai harga normal seperti pada medio Juli-Oktober 2006. Berbeda dengan 3 kota tersebut, di Padang kenaikan harga beras berlangsung sejak bulan November 2006 hingga triwulan I-2007. Informasi yang cukup unik adalah masyarakat Minang lebih menyukai beras lokal karena karakteristiknya yang pas dengan selera masyarakat Minang meskipun harganya yang lebih mahal dari beras Bulog.

* Zona Padang terdiri dari Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Riau dan Kepulauan Riau



Untuk mengerem laju harga beras, pemerintah pusat telah mendatangkan beras impor ke beberapa provinsi, termasuk Sumatera Barat sebanyak 12.000 ton dan Riau sebanyak 22.000 ton, pada bulan Februari dan Maret 2007. Masuknya beras impor ini, walaupun belum dapat menurunkan harga beras, namun cukup berperan mengerem laju harga beras ke tingkat yang lebih tinggi.



Untuk mengatasi masalah kelangkaan beras ini, pemprov Sumatera Barat akan membuka lahan sawah baru sebanyak 2.000 Ha dengan peningkatan produksi 2.000 ton untuk satu kali musim tanam. Bahkan Sumatera Barat menargetkan 25.000 ton beras tambahan dengan 44.000 ton padi. Saat ini total areal sawah Sumatera Barat sebanyak 232.000 Ha. Upaya tersebut telah dimulai dengan penyiapan 2.500 ton bibit unggul.

BAB 4

PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

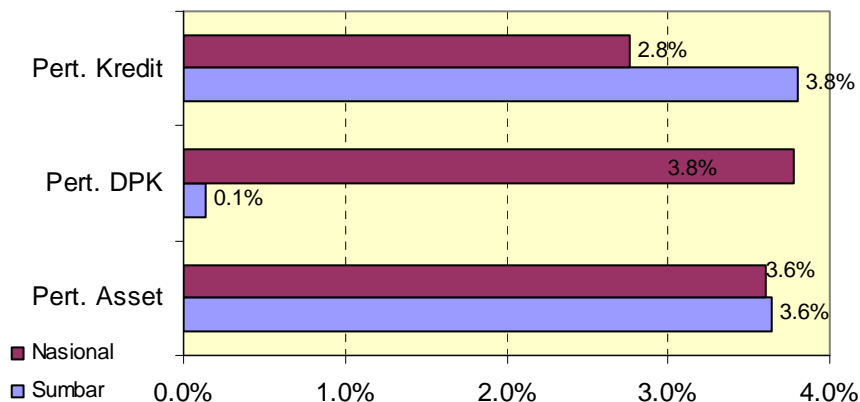
Kegiatan usaha perbankan di Sumbar pada triwulan I-2007 secara umum menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan berbagai indikator seperti aset perbankan, dana yang dikumpulkan, maupun penyaluran kredit. Sementara itu, stabilitas sistem keuangan regional Sumbar secara umum masih terjaga, seperti terlihat dari perkembangan risiko-risiko pada sektor korporasi dan rumah tangga yang relatif terkendali, meski tekanan risiko kredit sedikit meningkat akibat gempa bumi 6 Maret 2007.

Perkembangan lalu lintas pembayaran di Sumbar selama triwulan laporan ditandai dengan penurunan aliran uang tunai maupun non tunai. Perekonomian yang melemah terlihat pada menurunnya semua jenis transaksi keuangan. Baik aliran kas masuk dan keluar, perputaran cek/BG, maupun perputaran RTGS mengalami penurunan pada triwulan ini.

4.1. Perkembangan Perbankan

Indikator-indikator kegiatan usaha perbankan menunjukkan peningkatan selama triwulan laporan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, seperti terlihat dari pertumbuhan positif yang dialami total asset, dana yang dihimpun serta kredit yang disalurkan baik oleh bank umum maupun BPR.

Grafik 4.1.
Perbandingan Kegiatan Usaha Perbankan Sumbar dan Nasional
Triwulan I-2007



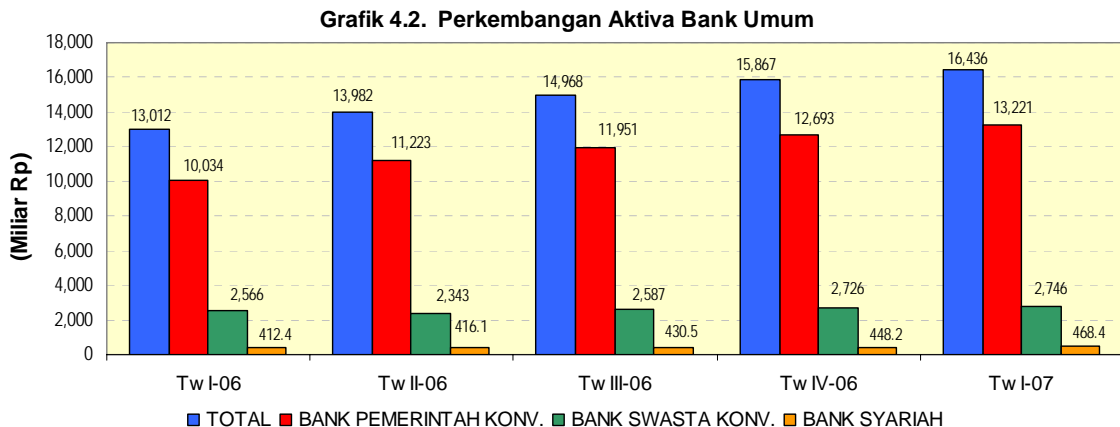
Sumber: Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah (SEKD) Sumbar dan Statistik Perbankan Indonesia; diolah

Apabila dibandingkan dengan perbankan nasional (grafik 4.1), perkembangan kegiatan usaha perbankan Sumbar (bank umum dan BPR) di triwulan I-2007 secara umum lebih baik, terlihat dari pertumbuhan asset dan kredit masing-masing sebesar 3,64% dan 3,81%, tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan yang terjadi pada bank umum secara nasional masing-masing sebesar 3,6% dan 3,8%. Hal yang berbeda terjadi pada pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK). Pertumbuhan DPK pada triwulan ini hanya 0,1%, jauh dari pertumbuhan DPK secara nasional sebesar 3,8%. Dilihat dari nisbah kredit terhadap DPK (LDR), nisbah LDR perbankan Sumbar yang mencapai 81,56%, jauh lebih tinggi dibanding LDR bank umum secara nasional sekitar 61,32%.

4.1.1. Perkembangan Bank Umum

4.1.1.1. Total Asset

Total asset bank umum di Provinsi Sumbar pada triwulan I-2007 tercatat sebesar Rp16,44 triliun (Grafik 4.2), naik sebesar Rp568 miliar (3,58%) dibandingkan posisi triwulan sebelumnya. Peningkatan asset terjadi pada semua kelompok bank dengan pertumbuhan tertinggi dialami oleh kelompok bank pemerintah sebesar 4,16%. Berdasarkan pangsaanya, kelompok bank pemerintah mempunyai pangsa terbesar yakni sebesar 80,44%. Sedangkan pangsa bank syariah masih yang terkecil yaitu sebesar 2,85%.



Dilihat dari komposisi aktiva produktifnya (tabel 4.1), bank umum di Sumbar pada triwulan I-2007 menempatkan portofolio terbesarnya pada kredit (77,15%), selanjutnya dalam bentuk penempatan pada BI (18,27%) dan penempatan pada bank lain (3,84%). Pangsa kredit di dalam aktiva produktif mengalami penurunan, dari 78,12% pada triwulan IV-2006 menjadi 77,15% pada triwulan laporan. Sementara itu komposisi penempatan pada BI terus mengalami peningkatan, dari 15,76% pada triwulan IV-2006 menjadi 18,27% pada triwulan laporan. Kenaikan

tersebut terutama berasal dari penempatan pada SBI dan giro yang masing-masing meningkat sebesar 32,23% dan 8,32%.

Tabel 4.1. Komposisi Aktiva Produktif Bank Umum

Keterangan	Nominal (jutaan rupiah)			Komposisi			Pertumbuhan (qtq)		
	Tw I-06	Tw IV-06	Tw I-07	Tw I-06	Tw IV-06	Tw I-07	Tw I-06	Tw IV-06	Tw IV-06
Penempatan pada BI	998,118	1,722,044	2,192,316	10.67%	15.76%	18.27%	77.01%	23.06%	27.31%
Giro	181,284	354,246	383,709	1.94%	3.24%	3.20%	18.24%	36.67%	8.32%
SBI	816,229	1,367,798	1,808,607	8.73%	12.51%	15.08%	99.05%	20.00%	32.23%
Lainnya	605	-	-	0.01%	0.00%	0.00%	19.80%	-	-
Penempatan pada Bank lain	423,157	582,447	460,972	4.53%	5.33%	3.84%	17.68%	4.31%	-20.86%
Surat Berharga	22,807	22,229	22,229	0.24%	0.20%	0.19%	0.00%	-4.81%	0.00%
Kredit Yang Diberikan	7,856,455	8,538,012	9,255,881	84.02%	78.12%	77.15%	2.52%	5.43%	8.41%
Garansi yang diberikan	50,253	64,903	65,240	0.54%	0.59%	0.54%	5.01%	25.31%	0.52%
TOTAL	9,350,790	10,929,635	11,996,638	100.00%	100.00%	100.00%	8.02%	7.88%	9.76%

Sumber: Laporan Bulanan Bank Umum (LBU/LBUS)

4.1.1.2. Penghimpunan Dana

Dana masyarakat yang berhasil dihimpun bank umum di Sumbar pada triwulan I-2007 hanya mencapai Rp11,42 triliun, turun sebesar Rp7,4 miliar (0,06%) dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya (Tabel 4.2). Penurunan terjadi terutama pada tabungan yang menurun 7,99%. Sebelumnya, tabungan meningkat cukup tinggi sebesar 21,35% pada triwulan IV-2006. Sementara itu, simpanan berjangka mengalami peningkatan sebesar 6,81% dan giro juga meningkat 4,47%.

Tabel 4.2. Perkembangan Dana Bank Umum Menurut Kelompok Bank dan Jenis Simpanan

Keterangan	Posisi (Miliar Rp)			Pangsa (%)			Pert. (% , q-t-q)		
	Tw.I-06	Tw.IV-06	Tw.I-07	Tw.I-06	Tw.IV-06	Tw.I-07	Tw.I-06	Tw.IV-06	Tw.I-07
Dana Pihak Ketiga	9,112.7	11,431.2	11,423.8	100.00	100.00	100.00	1.75	8.64	-0.06
Giro	2,582.2	3,437.5	3,591.0	28.34	30.07	31.43	14.01	9.74	4.47
Simp. Berjangka	3,114.6	3,229.3	3,449.1	34.18	28.25	30.19	11.83	-6.77	6.81
Tabungan	3,415.9	4,764.5	4,383.7	37.49	41.68	38.37	-12.55	21.35	-7.99
I. Bank Pemerintah	7,062.8	9,003.8	9,051.2	100.00	100.00	100.00	3.74	7.69	0.53
Giro	2,326.4	3,095.9	3,283.1	32.94	34.38	36.27	17.03	8.82	6.05
Simp. Berjangka	2,021.8	2,039.3	2,268.4	28.63	22.65	25.06	21.81	-14.94	11.23
Tabungan	2,714.6	3,868.6	3,499.7	38.44	42.97	38.67	-14.11	24.07	-9.53
II. Bank Swasta	2,049.9	2,427.4	2,372.6	100.00	100.00	100.00	-4.57	12.29	-2.26
Giro	255.8	341.6	307.9	12.48	14.07	12.98	-7.68	18.93	-9.85
Simp. Berjangka	1,092.7	1,189.9	1,180.7	53.31	49.02	49.77	-2.89	11.59	-0.77
Tabungan	701.4	895.9	883.9	34.21	36.91	37.26	-5.94	10.87	-1.33

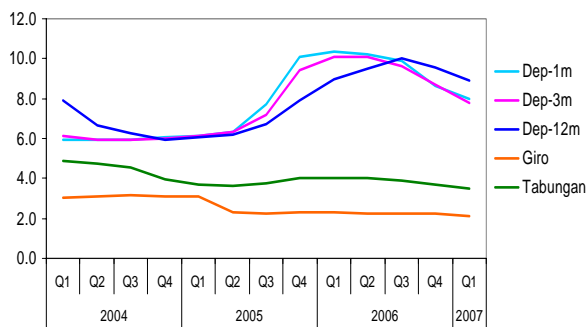
Sumber: Buku Statistik Ekonomi - Keuangan Daerah (SEKD) Sumbar

Tren penurunan DPK bank umum Sumbar ini terjadi pada kelompok bank umum swasta. Semua jenis simpanan di kelompok bank ini mengalami penurunan. Penurunan tertinggi terjadi pada giro sebesar 9,85%, sedangkan tabungan dan simpanan berjangka menurun masing-masing sebesar 1,33% dan 0,77%. Hal yang berbeda terjadi pada kelompok bank pemerintah. Pada kelompok bank ini, hanya tabungan yang mengalami penurunan sebesar 9,53%, sedangkan simpanan

berjangka dan giro tetap mengalami pertumbuhan sebesar 11,23% dan 6,05%. Beberapa faktor dapat menjelaskan mengapa terjadi penurunan DPK. Penurunan DPK triwulan I tiap tahun merupakan faktor musiman. Pada triwulan I 2006, pertumbuhan DPK juga relatif kecil hanya 1,75%. Penurunan tersebut juga dipicu oleh penurunan tabungan yang cukup tinggi sebesar 12,55%. Namun karena dapat diimbangi oleh kenaikan giro dan simpanan berjangka, maka tidak sampai terjadi penurunan DPK.

Faktor berikutnya adalah dampak gempa bumi 6 Maret 2007. Gempa bumi tersebut mengurangi kapasitas perekonomian Sumbar sehingga untuk *recovery* diperlukan dana yang cukup besar. Di level masyarakat dan dunia usaha, kebutuhan dana untuk *recovery* tersebut diperoleh dengan melakukan pengambilan dana simpanan yang mereka miliki di bank.

Grafik 4.3. Perkembangan Suku Bunga Simpanan (%)



Penurunan suku bunga simpanan juga dapat menjadi penjelaras menurunnya jumlah simpanan di bank umum. Seiring dengan penurunan BI-Rate hingga mencapai 9% pada akhir triwulan I-2007, suku bunga semua jenis simpanan juga mengalami penurunan meskipun belum sebesar penurunan

BI rate. Suku bunga deposito 1 bulan tercatat 8,00%, deposito 3 bulan sebesar 7,79%, dan deposito 12 bulan menurun hingga 8,89%. Pada triwulan sebelumnya, suku bunga tiga macam deposito tersebut tercatat masing-masing sebesar 8,66%, 8,68%, dan 9,56%. Sementara itu suku bunga tabungan hanya turun tipis dari 3,71% menjadi 3,51%, sedangkan suku bunga giro sebesar 2,13% (grafik 4.3).

Dilihat dari struktur jangka waktunya (tabel 4.3), simpanan berjangka yang berhasil dihimpun bank umum di Sumbar sebagian besar merupakan simpanan jangka pendek. Pangsa deposito berjangka waktu 1 bulan merupakan yang terbesar yaitu mencapai 66,27% dari total deposito, diikuti oleh deposito 3-bulan dengan pangsa 9,82%. Dilihat dari pertumbuhannya, hampir semua jenis deposito mengalami peningkatan kecuali deposito 3-bulan yang menurun sebesar 17,45% dan lainnya sebesar 16,10%.

Berdasarkan kelompok banknya, struktur jangka waktu deposito di bank pemerintah didominasi oleh deposito 1-bulan dengan pangsa sebesar 73,78%, diikuti oleh deposito 12-bulan dengan pangsa 10,03%. Sementara itu pada

kelompok bank swasta, pangsa terbesar terdapat pada deposito 1-bulan dan 3-bulan masing-masing sebesar 52,62% dan 12,67%.

Tabel 4.3. Struktur Deposito Bank Umum Menurut Jangka Waktu

Keterangan	Nominal (miliaran rupiah)			Pangsa			Pertumbuhan (qtq)		
	Tw I-06	Tw IV-06	Tw I-07	Tw I-06	Tw IV-06	Tw I-07	Tw I-06	Tw IV-06	Tw I-07
BANK PEMERINTAH									
1 bulan	1,502.63	1,470.83	1,664.52	74.32%	72.12%	73.38%	36.50%	-16.79%	13.17%
3 bulan	189.57	211.02	189.12	9.38%	10.35%	8.34%	-1.66%	5.28%	-10.38%
6 bulan	100.00	119.00	130.27	4.95%	5.84%	5.74%	1.58%	-24.71%	9.47%
12 bulan	140.04	181.23	227.62	6.93%	8.89%	10.03%	78.48%	5.07%	25.60%
lainnya	89.61	57.26	56.89	4.43%	2.81%	2.51%	-52.69%	-42.11%	-0.65%
Jumlah	2,021.84	2,039.33	2,268.41	100.00%	100.00%	100.00%	21.81%	-14.94%	11.23%
BANK SWASTA									
1 bulan	505.45	547.90	621.28	46.26%	46.05%	52.62%	-24.98%	17.27%	13.39%
3 bulan	281.70	199.26	149.55	25.78%	16.75%	12.67%	65.57%	-20.67%	-24.95%
6 bulan	54.09	107.65	122.19	4.95%	9.05%	10.35%	157.38%	33.56%	13.51%
12 bulan	23.81	58.13	64.18	2.18%	4.88%	5.44%	-3.54%	96.87%	10.42%
lainnya	227.66	276.99	223.54	20.83%	23.28%	18.93%	-3.40%	16.45%	-19.30%
Jumlah	1,092.72	1,189.92	1,180.73	100.00%	100.00%	100.00%	-2.89%	11.59%	-0.77%
TOTAL									
1 bulan	2,008.08	2,018.73	2,285.80	64.47%	62.51%	66.27%	13.16%	-9.67%	13.23%
3 bulan	471.27	410.27	338.66	15.13%	12.70%	9.82%	29.86%	-9.15%	-17.45%
6 bulan	154.09	226.65	252.45	4.95%	7.02%	7.32%	28.99%	-5.03%	11.39%
12 bulan	163.85	239.36	291.80	5.26%	7.41%	8.46%	58.85%	18.48%	21.91%
lainnya	317.27	334.25	280.43	10.19%	10.35%	8.13%	-25.36%	-0.75%	-16.10%
Jumlah	3,114.56	3,229.26	3,449.14	100.00%	100.00%	100.00%	11.83%	-6.77%	6.81%

Sumber: SEKD Sumbar

Berdasarkan kepemilikan dana simpanan di bank umum (tabel 4.4), nasabah perorangan merupakan pemilik DPK terbesar dengan pangsa 61,23%, diikuti oleh nasabah berkategori lainnya (21,86%) dan pemerintah (4,99%). Dilihat dari pertumbuhannya, peningkatan tertinggi terjadi pada dana milik perusahaan asuransi (66,65%), diikuti oleh dana milik lainnya (58,00%), dan dana milik badan/lembaga pemerintah (12,82%).

Tabel 4.4. Struktur Kepemilikan Dana Simpanan Bank Umum

Keterangan	Nominal (miliaran rupiah)			Share			Pertumbuhan (q-t-q)		
	T. I-06	T. IV-06	T. I-07	T. I-06	T. IV-06	T. I-07	T. I-06	T. IV-06	T. I-07
Pemerintah	502.0	745.7	569.6	5.51%	6.52%	4.99%	-25.88%	22.18%	-23.62%
Badan/Lembaga Pemerintah	81.1	54.0	60.9	0.89%	0.47%	0.53%	-25.70%	110.70%	12.82%
Perusahaan Asuransi	120.8	232.4	387.3	1.33%	2.03%	3.39%	63.81%	-1.70%	66.65%
Badan Usaha Milik Negara	184.3	265.0	159.5	2.02%	2.32%	1.40%	-40.13%	31.65%	-39.82%
Perusahaan Swasta	326.2	662.2	352.0	3.58%	5.79%	3.08%	-27.93%	73.61%	-46.84%
Yayasan dan Badan Sosial	281.5	286.1	269.5	3.09%	2.50%	2.36%	-0.99%	5.60%	-5.81%
Koperasi	53.2	61.9	67.8	0.58%	0.54%	0.59%	-13.54%	4.27%	9.63%
Perorangan	5,765.4	7,492.1	6,994.8	63.27%	65.54%	61.23%	-7.95%	16.54%	-6.64%
Lainnya	1,755.8	1,580.8	2,497.8	19.27%	13.83%	21.86%	153.73%	-30.18%	58.00%
Bukan Penduduk	42.4	51.0	64.7	0.47%	0.45%	0.57%	23.28%	17.19%	26.73%
TOTAL	9,112.7	11,431.2	11,423.8	100.00%	100.00%	100.00%	1.75%	8.64%	-0.06%

Sumber: SEKD Sumbar

Dilihat dari sebaran DPK menurut kabupaten/kota (tabel 4.5), penghimpunan dana masyarakat oleh bank umum masih terkonsentrasi di Kota

Padang dengan pangsa 55,5%, diikuti oleh Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam dengan pangsa 11,29%. Sementara itu, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman mencatat pangsa terendah dalam pengimpunan dana yaitu sebesar 3,92%.

Tabel 4.5. Sebaran DPK Bank Umum Berdasarkan Lokasi Kantor Penghimpun Dana

Posisi dalam miliaran rupiah

Kabupaten/Kota	Triwulan I-2006		Triwulan IV-2006		Triwulan I-2007	
	Posisi	Pangsa	Posisi	Pangsa	Posisi	Pangsa
Kota Padang	5,229.1	57.4%	6,575.8	57.5%	6,340.3	55.50%
Kota Bukittinggi & Kab. Agam	1,010.6	11.1%	1,346.4	11.8%	1,290.4	11.29%
Kota Payakumbuh & Kab. 50 Kota	448.8	4.9%	533.2	4.7%	605.8	5.30%
Kota Solok & Kab. Solok	529.8	5.8%	723.3	6.3%	742.2	6.49%
Kab. Tanah Datar & Kota Pd. Panjang	468.1	5.1%	527.7	4.6%	602.9	5.27%
Kab. Swl/Sijunjung & Kota Sawahlunto	396.8	4.4%	538.7	4.7%	606.3	5.30%
Kota Pariaman & Kab. Pd Pariaman	465.1	5.1%	477.0	4.2%	448.7	3.92%
Kab. Pasaman & Kab. Pesisir Selatan	564.4	6.2%	709.1	6.2%	787.1	6.89%
Total	8,956.3	100.0%	11,431.2	100.0%	11,423.8	100.0%

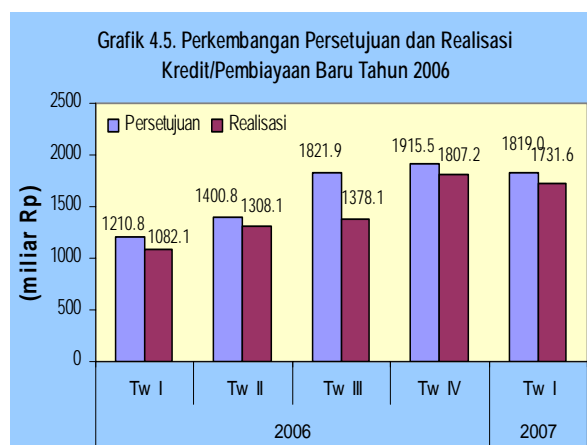
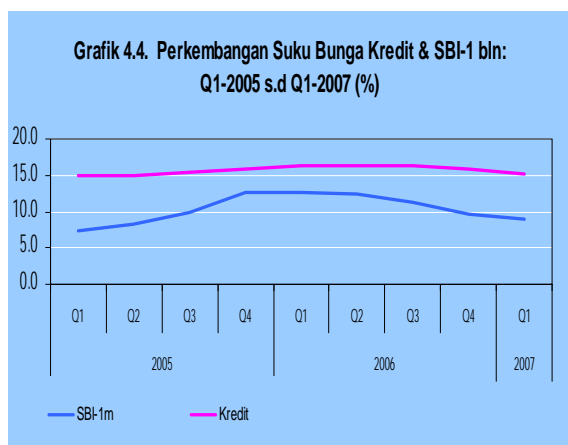
Sumber: SEKD Sumbar

4.1.1.3. Penyaluran Kredit

Nilai kredit yang disalurkan oleh bank umum untuk proyek yang berlokasi di Sumbar hingga posisi triwulan laporan mencapai Rp10,97 triliun, meningkat Rp355,5 miliar (3,35%) dibandingkan posisi triwulan IV-2006 (Tabel 4.6.). Pertumbuhan tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan pertumbuhan kredit pada triwulan sebelumnya sebesar 5,47%.

Pertumbuhan kredit tersebut seiring pula dengan perkembangan suku bunga kredit yang sedikit turun, dari 15,76% pada akhir triwulan IV-2006 menjadi 15,24% pada akhir triwulan laporan (Grafik 4.4). Penurunan tersebut sejalan dengan tren penurunan BI rate (diimplementasikan melalui suku bunga SBI tenor 1 bulan), yang telah mengalami penurunan sebanyak 75 basis poin, dari 9,75% pada akhir triwulan IV-2006 menjadi 9,00% pada akhir triwulan laporan.

Selama triwulan I-2007, persetujuan kredit/pembiayaan baru oleh bank umum tercatat sebesar Rp1.819 miliar (Grafik 4.5) atau menurun sebesar 5,04% dibandingkan dengan persetujuan triwulan sebelumnya sebesar Rp 1.915,4 miliar. Sementara pada periode yang sama, realisasi kredit/pembiayaan baru mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kredit/pembiayaan baru yang direalisasikan selama triwulan laporan mencapai Rp1.731,59 miliar atau turun sebesar 4,18% dibandingkan realisasi triwulan sebelumnya. Dengan demikian dari total persetujuan kredit baru selama periode triwulan I-2007, 95% kredit dapat terealisasi.



Menurut kelompok bank, peningkatan kredit terjadi baik pada bank pemerintah maupun bank swasta masing-masing sebesar 3,48% dan 2,86%. Sementara berdasarkan jenis penggunaannya, alokasi kredit terbesar adalah untuk kredit modal kerja (38,36%), diikuti kredit konsumsi (35,08%) dan kredit investasi (26,56%). Dalam hal pertumbuhannya, kredit konsumsi mencatat pertumbuhan tertinggi (7,39%) diikuti oleh kredit modal kerja (1,83%) dan kredit konsumsi (0,51%).

Tabel 4.6. Penyaluran Kredit oleh Bank Umum Berdasarkan Lokasi Proyek

Keterangan	Posisi (Miliar Rp)			Pangsa (%)			Pertumbuhan (%)		
	Tw.I-06	Tw.IV-06	Tw.I-07	Tw.I-06	Tw.IV-06	Tw.I-07	Tw.I-06	Tw.IV-06	Tw.I-07
Kelompok Bank	9,830.9	10,618.0	10,973.7	100.00	100.00	100.00	3.31	5.47	3.35
Bank Pemerintah	7,631.4	8,339.1	8,629.5	77.63	78.54	78.64	3.36	5.46	3.48
Bank Swasta	2,199.5	2,278.9	2,344.2	22.37	21.46	21.36	3.14	5.53	2.86
Jenis Penggunaan	9,830.9	10,618.0	10,973.7	100.00	100.00	100.00	3.31	5.47	3.35
Modal Kerja	3,638.3	4,134.0	4,209.8	37.01	38.93	38.36	6.91	9.18	1.83
Investasi	2,801.6	2,899.8	2,914.7	28.50	27.31	26.56	0.25	6.87	0.51
Konsumsi	3,391.0	3,584.2	3,849.2	34.49	33.76	35.08	2.20	0.47	7.39
Sektor Ekonomi	9,830.9	10,618.0	10,973.7	100.00	100.00	100.00	3.31	5.47	3.35
Pertanian	1,098.0	1,519.7	1,382.2	11.17	14.31	12.60	-6.55	38.23	-9.05
Pertambangan & Penggalian	42.9	25.7	33.9	0.44	0.24	0.31	0.80	20.39	32.01
Perindustrian	1,210.6	1,083.6	1,174.0	12.31	10.21	10.70	21.81	-0.20	8.34
Listrik, Gas & Air	1,296.0	1,207.1	1,190.0	13.18	11.37	10.84	-1.31	-3.02	-1.41
Konstruksi	120.1	124.7	120.7	1.22	1.17	1.10	-0.17	-13.49	-3.18
Perdag, Hotel & Restoran	2,167.1	2,496.4	2,619.3	22.04	23.51	23.87	3.97	6.13	4.92
Pengangktn & Komunikasi	134.7	117.5	109.6	1.37	1.11	1.00	1.29	-3.15	-6.71
Jasa-jasa	346.4	431.1	467.1	3.52	4.06	4.26	8.10	8.36	8.35
Lain-lain	3,415.0	3,612.2	3,876.8	34.74	34.02	35.33	2.46	0.32	7.32

Sumber: SEKD Sumbar

Dilihat dari sektor ekonomi (tidak termasuk sektor lain-lain yang bersifat konsumtif), alokasi kredit terbesar diberikan terutama kepada sektor perdagangan, hotel & restoran (23,87%), sektor pertanian (12,60%), sektor listrik, gas & air

(10,84%) dan sektor perindustrian (10,70%). Dilihat dari pertumbuhannya, sektor pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan kredit terbesar yakni 32,01%, diikuti oleh sektor jasa-jasa (8,35%), sektor perindustrian (8,34%) dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 4,92%. Sementara itu, tiga sektor lainnya mengalami penurunan, tertinggi pada sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 6,71%.

Tabel 4.7 Sebaran Kredit Bank Umum dan LDR Berdasarkan Lokasi Proyek

posisi dalam miliaran rupiah

Kabupaten/Kota	Triwulan I-2006			Triwulan IV-2006			Triwulan I-2007		
	Posisi	Pangsa	LDR	Posisi	Pangsa	LDR	Posisi	Pangsa	LDR
Kota Padang	4,230.6	43.0%	80.9%	4,334.8	43.1%	65.9%	4,483.9	40.9%	70.7%
Kota Bukittinggi & Kab. Agam	709.9	7.2%	70.2%	827.3	8.2%	61.4%	865.2	7.9%	67.0%
Kota Payakumbuh & Kab. 50 Kota	450.2	4.6%	100.3%	516.1	5.1%	96.8%	546.8	5.0%	90.3%
Kota Solok & Kab. Solok	1,818.1	18.5%	343.2%	1,818.7	18.1%	251.4%	1,826.9	16.6%	246.1%
Kab. Tanah Datar & Kota Pd. Panjang	389.2	4.0%	83.1%	448.4	4.5%	85.0%	482.5	4.4%	80.0%
Kab. Swl/Sijunjung & Kota Sawahlunto	671.6	6.8%	169.2%	752.9	7.5%	139.8%	794.7	7.2%	131.1%
Kota Pariaman & Kab. Pd Pariaman	512.0	5.2%	110.1%	583.4	5.8%	122.3%	584.4	5.3%	130.3%
Kab. Pasaman & Kab. Pesisir Selatan	1,049.3	10.7%	185.9%	1,336.5	13.3%	188.5%	1,389.3	12.7%	176.5%
Total	9,830.9	100.0%	109.8%	10,618.0	105.5%	92.9%	10,973.7	100.0%	96.1%

Sumber: SEKD Sumbar

Sama halnya dengan penghimpunan dana, penyaluran kredit perbankan juga terkonsentrasi di Kota Padang dengan pangsa 44,5%, sedikit menurun daripada triwulan sebelumnya sebesar 43,11% (Tabel 4.7). Kota Solok dan Kabupaten Solok menempati peringkat kedua untuk pangsa kredit terbesar (16,6%). Sedangkan pangsa terkecil terdapat pada Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar (4,4%).

Berdasarkan lokasi proyek, nisbah kredit terhadap DPK (LDR-Gross) di Sumbar secara umum telah mencapai 96,1% pada akhir periode laporan, lebih tinggi daripada nisbah LDR triwulan IV-2006 sebesar (Tabel 4.7). Peningkatan tersebut disebabkan oleh penurunan DPK sedangkan kredit tetap mengalami pertumbuhan selama triwulan laporan. Menurut wilayahnya, nisbah LDR tertinggi terjadi di Kota Solok dan Kabupaten Solok yang mencapai 246,1%, sedangkan terendah dialami oleh kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam dengan nisbah sebesar 67,0%.

4.1.1.4. Perkembangan Kolektibilitas dan Profitabilitas.

Kualitas kredit yang disalurkan bank umum di Sumbar sedikit mengalami penurunan sebagaimana ditunjukkan oleh peningkatan persentase NPLs/kredit bermasalah

Tabel 4.8. Perkembangan Kolektibilitas Kredit/Pembiayaan Bank Umum

(nominal dalam miliar rupiah)

Keterangan	Posisi (miliaran rupiah)				
	Tw I-06	Tw II-06	Tw III-06	Tw IV-06	Tw I-07
Lancar	7,228.8	7,496.4	7,690.5	8,446.3	8,646.5
Dalam Perhatian Khusus	313.6	208.8	270.4	181.7	287.3
Kurang Lancar	38.0	113.9	40.0	19.0	29.9
Diragukan	40.7	33.4	25.7	18.9	22.4
Macet	235.4	245.9	348.7	268.8	269.7
Rasio NPLs (Gross)	4.00%	4.85%	4.95%	3.43%	3.48%

Sumber: LBU/LBUS

(berkategori kurang lancar, diragukan dan macet) dari 3,43% di triwulan IV-2006 menjadi 3,48% di triwulan I-2007 (Tabel 4.8).

Menurut jenis penggunaan kredit (Tabel 4.9), persentase NPLs tertinggi dialami oleh kredit investasi (5,81%), kemudian kredit modal kerja (4,84%). Sementara itu persentase NPLs untuk kredit konsumsi merupakan yang terkecil, yaitu sebesar 0,85%. Berdasarkan sektor ekonomi (Tabel 4.9), persentase NPLs tertinggi masih terjadi pada sektor pertambangan (27,98%), diikuti oleh sektor perdagangan (7,79%).

Tabel 4.9. Sebaran NPLs Bank Umum per Penggunaan dan Sektoral

(nominal dalam miliaran rupiah)

Keterangan	Trw I-2006		Trw IV-2006		Trw I-2007	
	Nominal	Nisbah	Nominal	Nisbah	Nominal	Nisbah
Jenis Penggunaan						
- Modal Kerja	166,786	5.01%	178,834	4.57%	190,811	4.84%
- Investasi	117,757	8.25%	99,284	5.75%	100,749	5.81%
- Konsumsi	29,546	0.95%	28,587	0.87%	30,470	0.85%
Sektor Ekonomi						
- Pertanian	85,220	10.41%	61,447	3.80%	63,812	4.36%
- Pertambangan	9,529	27.47%	5,348	31.28%	5,348	27.98%
- Industri	53,030	4.74%	7,674	0.87%	8,900	0.90%
- Listrik, Air & Gas	-	-	-	-	-	0.00%
- Konstruksi	9,332	8.46%	4,530	4.11%	5,023	4.71%
- Perdagangan	111,094	5.16%	187,857	7.67%	196,112	7.79%
- Angkutan	6,858	3.85%	4,279	2.97%	5,508	4.10%
- Jasa-jasa	8,399	2.66%	6,195	1.57%	6,179	1.45%
- Lainnya (konsumtif)	30,627	0.98%	29,375	0.89%	31,148	0.86%

Sumber: LBU/LBUS

Sementara itu dalam hal profitabilitas (tabel 4.10), bank umum di Sumbar pada triwulan I-2007 membukukan margin bunga bersih (NIM) sebesar 2,00%, sedikit dibawah pencapaian NIM triwulan yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 2,28%.

Tabel 4.10. Perkembangan Profitabilitas Bank Umum*)

Keterangan	Posisi (miliaran rupiah)								
	Tw I-05	Tw II-05	Tw III-05	Tw IV-05	Tw I-06	Tw II-06	Tw III-06	Tw IV-06	Tw I-07
Pendapatan Bunga	305.38	560.8	861.3	1,145.1	348.3	726.8	1,064.0	1,453.1	388.9
Beban Bunga	119.77	234.9	357.1	476.0	169.2	346.8	491.9	666.3	163.6
Rerata aktiva prod.	6,904.0	7,429.7	7,576.0	7,659.8	7,857.3	8,746.1	9,210.3	9,548.0	11,279.1
Aktiva Prod.	6,906.41	7,719.6	8,049.9	8,147.2	8,808.3	9,772.5	10,370.8	10,948.7	11,609.5
NIM	2.69%	4.39%	6.65%	8.74%	2.28%	4.34%	6.21%	8.24%	2.00%

Sumber: LBU

*) tidak termasuk bank syariah

4.1.1.5. Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Nilai kredit berskala mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang disalurkan bank umum Sumbar pada triwulan I-2007 mencapai Rp6.885 miliar atau meningkat 5,5% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Tabel 4.11). Peningkatan kredit UMKM tertinggi terjadi pada kredit skala mikro (7,13%), kemudian kredit berskala kecil (5,61%).

Tabel 4.11. Distribusi Kredit/Pembiayaan Bank Umum menurut Baki Debet

Keterangan	Posisi (miliar Rp)			Pangsa (%)			Pertumb. (%)		
	TrwI-06	TrwIV-06	TrwI-07	TrwI-06	TrwIV-06	TrwI-07	TrwI-06	TrwIV-06	TrwIV-06
Mikro (s.d Rp50 jt)	3,163.8	3,368.1	3,608.0	40.27	37.70	38.98	3.11	-0.08	7.13
Kecil (Rp50 - Rp500 jt)	1,578.4	1,892.5	1,998.8	20.09	21.18	21.59	1.41	5.46	5.61
Menengah (Rp500 jt - Rp5 M)	1,036.9	1,266.2	1,278.6	13.20	14.17	13.81	5.44	8.53	0.98
Total UMKM	5,779.0	6,526.7	6,885.4	73.56	73.05	74.39	3.05	3.07	5.50
Besar (>Rp5 M)	2,077.4	2,407.9	2,370.5	26.44	26.95	25.61	1.08	17.84	-1.55

Sumber: LBU/LBUS

Pangsa kredit UMKM bank umum di Sumbar mencapai 74,39% dari total kredit, meningkat dari pangsa UMKM triwulan sebelumnya sebesar 73,05%. Berdasarkan kelompok baki debetnya, alokasi kredit terbesar disalurkan untuk usaha mikro dengan pangsa 38,98%. Sedangkan pangsa kredit berskala besar (korporat) sebesar 25,61%.

Tabel 4.12. Penyaluran Kredit UMKM Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi

Sektor Ekonomi	Nominal (Rp M)			Pangsa			Pertumbuhan (qtq)		
	Trw I-06	Trw IV-06	Trw I-07	Trw I-06	Trw IV-06	Trw I-07	Trw I-06	Trw IV-06	Trw I-07
Pertanian	309.44	522.84	539.90	5.35%	8.01%	7.84%	0.51%	23.77%	3.26%
Pertambangan	13.27	17.10	19.12	0.23%	0.26%	0.28%	-9.50%	40.75%	11.82%
Industri	84.15	89.54	92.71	1.46%	1.37%	1.35%	2.84%	-10.77%	3.54%
Listrik, Air & Gas	0.34	1.47	1.84	0.01%	0.02%	0.03%	-80.24%	9.46%	25.46%
Konstruksi	94.65	101.92	99.20	1.64%	1.56%	1.44%	-0.63%	-14.58%	-2.66%
Perdagangan	1,715.18	1,989.19	2,028.46	29.68%	30.48%	29.46%	5.14%	5.83%	1.97%
Angkutan	171.83	127.67	118.56	2.97%	1.96%	1.72%	-6.52%	-12.83%	-7.14%
Jasa-jasa	263.83	362.11	383.36	4.57%	5.55%	5.57%	11.90%	9.82%	5.87%
Lainnya (konsumtif)	3,126.36	3,314.90	3,602.26	54.10%	50.79%	52.32%	2.31%	-0.18%	8.67%
TOTAL UMKM	5,779.05	6,526.73	6,885.40	100.00%	100.00%	100.00%	3.05%	3.07%	5.50%

Sumber: LBU/LBUS

Secara sektoral (Tabel 4.12), sekitar separuh dari kredit UMKM masuk dalam kategori sektor lainnya yang menampung penggunaan konsumtif (52,32%). Selebihnya terutama dialokasikan untuk sektor perdagangan (29,46%), dan sisanya dibagi untuk tujuh sektor lainnya, mulai dari yang tertinggi untuk sektor pertanian (7,84%) hingga yang terkecil untuk sektor pertambangan (0,28%).

Tabel 4.13. Sebaran NPLs UMKM Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi

(nominal dalam miliaran rupiah)

Sektor Ekonomi	Trw I-2006		Trw IV-2006		Trw I-2007	
	Nominal	Nisbah	Nominal	Nisbah	Nominal	Nisbah
- Pertanian	46.86	15.14%	51.76	9.90%	63.81	4.36%
- Pertambangan	9.53	71.80%	5.35	31.28%	5.35	27.98%
- Industri	5.61	6.67%	1.72	1.92%	8.90	0.90%
- Listrik, Air & Gas	-	-	-	-	-	0.00%
- Konstruksi	9.33	9.86%	4.53	4.44%	5.02	4.71%
- Perdagangan	94.95	5.54%	81.66	4.10%	196.11	7.79%
- Angkutan	6.86	3.99%	4.28	3.35%	5.51	4.10%
- Jasa-jasa	8.40	3.18%	6.20	1.71%	6.18	1.45%
- Lainnya (konsumtif)	30.63	0.98%	29.38	0.89%	31.15	0.86%
Total (Gross)	212.16	3.67%	184.86	2.83%	322.03	3,48%

Sumber: LBU/LBUS

Kualitas kredit UMKM mengalami penurunan sebagaimana terlihat dari peningkatan nisbah NPLs pada akhir triwulan laporan tercatat sebesar 3,48% (tabel 4.13). Berdasarkan sektor ekonomi non konsumtif, nisbah NPLs tertinggi dialami oleh sektor pertambangan (27.98%) sedangkan persentase terendah dialami oleh sektor industri dan lain-lain masing-masing sebesar 0,90% dan 0,86%.

4.1.2. Perkembangan Bank Syariah

Perkembangan Bank Syariah di wilayah Sumbar menunjukkan pertumbuhan yang positif. Aset bank syariah di wilayah Sumbar mengalami peningkatan sebesar 4,52% (q-t-q). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat atau 4,10% (q-t-q). Kenaikan aset ini bersumber dari kenaikan DPK sebesar 5,90%. Komposisi DPK Bank Syariah pada triwulan ini terdiri dari tabungan sebesar 48,13%, deposito berjangka sebesar 46,76%, dan giro sebesar 5,12%. Semua komponen DPK tersebut mengalami peningkatan pada triwulan ini dengan peningkatan tertinggi pada giro sebesar 11,19%.

Seiring dengan peningkatan DPK, kredit yang disalurkan bank syariah juga mengalami pertumbuhan. Pada triwulan ini, kredit meningkat 4,70%. Dari sisi penggunaan, peningkatan kredit tertinggi terjadi pada kredit konsumsi sebesar 9,09%, kemudian kredit modal kerja sebesar 4,20%. Sementara kredit investasi mengalami penurunan sebesar 6,01%. Dari segi komposisi, kredit untuk konsumsi merupakan alokasi kredit terbesar bank syariah menurut jenis penggunaan. Pada akhir triwulan I-2007 ini, tercatat outstanding kredit konsumsi sebesar Rp 187,34 miliar atau 45,12%.

Tabel 4.13.a Indikator Perkembangan Bank Umum Syariah

Keterangan	Nominal (Rp M)		Pertumbuhan (qtq)		Share	
	Tw IV-06	Tw I-07	Tw IV-06	Tw I-07	Tw IV-06	Tw I-07
Total Asset	448.16	468.44	4.10%	4.52%		
Penghimpunan Dana	322.46	341.50	11.75%	5.90%		
- Giro	15.71	17.47	16.90%	11.19%	4.87%	5.12%
- Tabungan	155.40	164.35	17.99%	5.76%	48.19%	48.13%
- Deposito	151.35	159.68	5.53%	5.50%	46.94%	46.76%
Penyaluran Kredit/Pembiayaan						
- Menurut Sektor Ekonomi	396.61	415.23	3.53%	4.70%		
Pertanian	8.75	9.72	-17.74%	11.13%	2.71%	2.85%
Pertambangan	0.03	0.02	-96.21%	-20.00%	0.01%	0.01%
Industri	8.36	9.50	-3.60%	13.61%	2.59%	2.78%
Listrik, gas dan air	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Konstruksi	3.03	3.94	8.54%	30.18%	0.94%	1.15%
Perdagangan	39.53	35.02	5.65%	-11.39%	12.26%	10.26%
Pengangkutan	16.41	14.55	-18.05%	-11.38%	5.09%	4.26%
Jasa dunia usaha	116.37	122.08	6.27%	4.90%	36.09%	35.75%
Jasa sosial	31.71	32.48	41.20%	2.41%	9.83%	9.51%
Lainnya	172.42	187.93	0.89%	8.99%	53.47%	55.03%
- Menurut Penggunaan	396.61	415.23	3.53%	4.70%		
Modal Kerja	161.90	168.70	5.96%	4.20%	50.21%	49.40%
Investasi	62.98	59.20	4.13%	-6.01%	19.53%	17.33%
Konsumsi	171.73	187.34	1.14%	9.09%	53.26%	54.86%
LDR	122.99%	121.59%				
Gross NPLs	3.67%	3,62%				

Sumber: LBUS

Dari sisi sektor, selain sektor lainnya, jasa dunia usaha merupakan sektor yang mendapat alokasi kredit terbanyak sebesar Rp 122,08 milyar. Pangsa untuk sektor ini sebesar 29,40%. Meskipun mendapat alokasi terbanyak, pertumbuhan kredit menurut sektor tertinggi terjadi pada sektor konstruksi. Dengan pertumbuhan sebesar 30,18%, maka outstanding kredit untuk sektor konstruksi sebesar Rp 3,98 miliar.

4.1.3. Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Secara umum, indikator-indikator perkembangan kegiatan usaha BPR pada triwulan laporan tetap mengalami pertumbuhan meskipun dari sisi dana yang dihimpun mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Total asset BPR di Sumbar pada triwulan I-2007 mengalami peningkatan sebesar 5,25% menjadi Rp592,61 miliar (Tabel 4.14). Pada periode yang sama, posisi penghimpunan dana BPR tercatat sebesar Rp369,23 miliar atau naik 6,36% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Baik tabungan maupun deposito mengalami pertumbuhan positif masing-masing sebesar 3,74% dan 9,77%.

Meski terjadi penurunan dalam pertumbuhan dana, namun kredit yang disalurkan BPR justru tumbuh lebih tinggi daripada triwulan sebelum mencapai

8,82% menjadi Rp423,88 miliar di triwulan I-2007. Menurut lapangan usaha, peningkatan kredit dialami oleh semua sektor ekonomi dengan pertumbuhan kredit tertinggi terjadi pada sektor pertanian (15,28%). Sektor perdagangan juga tumbuh cukup tinggi sebesar 5,90%. Menurut jenis penggunaan, pertumbuhan kredit tertinggi dialami kredit konsumsi (14,34%) diikuti oleh kredit investasi (13,32%) dan kredit modal kerja (6,16%).

Tabel 4.14 Indikator Perkembangan BPR

Keterangan	Nominal (Rp M)			Pertumbuhan (qtq)		
	Tw I-06	Tw IV-06	Tw I-07	Tw I-06	Tw IV-06	Tw I-07
Total Asset	429.40	562.61	592.14	-0.21%	13.71%	5.25%
Penghimpunan Dana	282.85	347.14	369.23	-0.14%	11.19%	6.36%
- Tabungan	155.53	196.14	203.48	-1.14%	12.97%	3.74%
- Deposito	127.33	150.99	165.75	1.11%	8.97%	9.77%
Penyaluran Kredit/Pembiayaan	322.49	389.53	423.88	7.89%	2.38%	8.82%
- Menurut Sektor Ekonomi						
Pertanian	35.02	48.32	55.71	10.18%	8.06%	15.28%
Perindustrian	7.52	8.43	8.58	3.02%	-1.92%	1.86%
Perdag,Hotel& Restoran	155.49	187.56	198.63	8.88%	0.08%	5.90%
Jasa-jasa	48.04	48.66	51.16	8.56%	-0.52%	5.14%
Lain-lain	76.42	96.56	109.80	5.04%	6.30%	13.71%
- Menurut Penggunaan						
Modal Kerja	218.35	257.77	273.65	6.81%	-0.39%	6.16%
Investasi	34.27	41.95	47.54	19.56%	8.93%	13.32%
Konsumsi	69.86	89.81	102.69	6.15%	7.95%	14.34%
LDR	114.01%	112.21%	114.80%			
Gross NPLs	9.49%	8.76%	8.51%			

Sumber: Laporan Bulanan BPR/BPRS

Dengan laju pertumbuhan Kredit yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan DPK maka LDR BPR di Sumbar naik, dari 112,21% pada triwulan IV-2006 menjadi 114,80% pada triwulan laporan. Kondisi ini mencerminkan pelaksanaan fungsi intermediasi BPR telah berjalan dengan baik. Dilihat dari kualitas kredit yang disalurkan BPR, nisbah kredit bermasalah (NPLs) BPR kembali mengalami penurunan, dari 8,76% menjadi 8,51%.

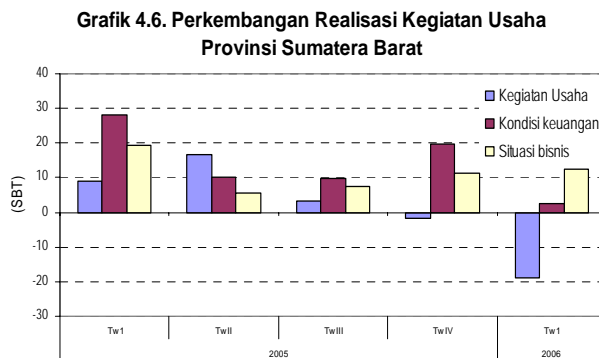
4.2. Asesmen Stabilitas Keuangan Daerah

Asesmen keuangan daerah dimaksudkan untuk mengkaji potensi sumber-sumber risiko yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan di daerah. Secara umum pada triwulan laporan, risiko-risiko yang dialami oleh sektor korporasi dan rumah tangga masih relatif terkendali.

Gempa bumi 6 Maret 2007 sampai saat ini belum memberikan dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan daerah. Berdasarkan survei yang dilakukan Bank Indonesia Padang, jumlah debitur yang terkena gempa bumi relatif kecil. Operasional perbankan tetap dapat beroperasi dengan baik. Transaksi tunai maupun non tunai juga tidak mengalami gangguan yang berarti.

4.2.1. Asesmen Korporasi dan Rumah Tangga

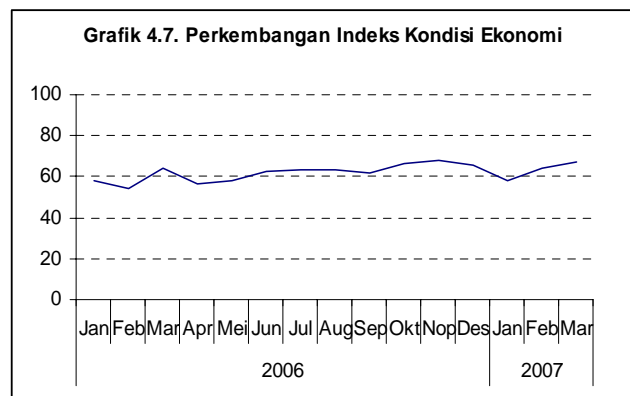
Perkembangan kredit untuk sektor bisnis menunjukkan penurunan selama triwulan laporan, terlihat dari pertumbuhan kredit investasi dan kredit modal kerja relatif rendah bila dibandingkan triwulan IV-2006 maupun triwulan I-2006. Hal ini



dikonfirmasi dengan rendahnya pertumbuhan PDRB investasi sebesar 2,04%, jauh dibawah pertumbuhan investasi pada triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,20%. Hasil survei kegiatan dunia usaha di Sumatera Barat periode triwulan I-2007 juga menunjukkan hal yang sama.

Angka Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar -18,73 menyatakan bahwa realisasi kegiatan usaha di Sumatera Barat mengalami penurunan. Angka ini menurun drastis dari triwulan IV-2006 yang juga sudah mengalami penurunan sebesar -1,54 (Grafik 4.6). Meskipun demikian, situasi bisnis dan kondisi keuangan masih dinilai positif oleh responden dunia usaha.

Dari sisi rumah tangga, daya beli masyarakat masih belum membaik selama triwulan I-2007. Kondisi ini diperparah dengan terjadinya gempa bumi 6 Maret 2007. Akibatnya PDRB konsumsi hanya tumbuh 2,37%. Kondisi ini juga didukung oleh hasil survei konsumen yang menunjukkan



indeks kondisi ekonomi saat ini masih dibawah 100 (Grafik 4.7), yang berarti dinilai pesimis oleh responden rumah tangga.

4.2.1.1. Risiko Kredit Korporasi

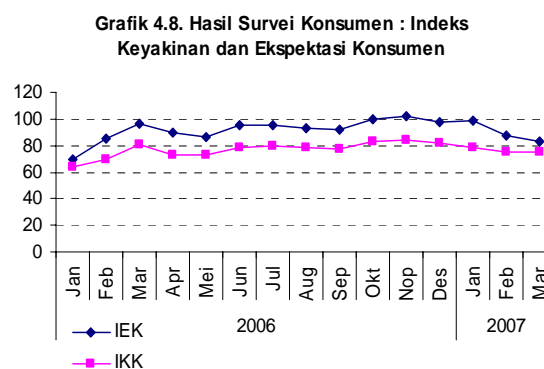
Kredit Investasi dan kredit modal kerja yang proyeknya berlokasi di Sumbar pada triwulan I-2007 hanya tumbuh sebesar 0,51% dan 1,83%. Kredit investasi melorot drastis setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh cukup tinggi(6,87%). Hal yang sama juga terjadi pada kredit modal kerja. Sebelumnya kredit modal kerja tumbuh sebesar 9,18%, namun pada triwulan laporan hanya tumbuh 1,83%. Secara sektoral (tidak termasuk sektor lain-lain yang menampung kredit konsumtif dengan pangsa 35,33%), alokasi kredit terkonsentrasi pada empat sektor yaitu sektor perdagangan (23,87%), sektor pertanian (12,60%), sektor listrik (10,84%), dan sektor industri (10,70%).

Diantara empat sektor dominan tersebut diatas (kecuali untuk sektor listrik yang kreditnya disalurkan oleh bank yang berkantor di luar Sumbar), risiko terbesar berdasarkan nisbah NPLs berada pada sektor perdagangan yang nisbahnya mencapai 7,79%, diikuti oleh sektor konstruksi (4,71%) dan sektor pertanian (4,36%). NPLs semua sektor menunjukkan peningkatan kecuali di sektor pertambangan, jasa-jasa, dan lainnya.

Berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), situasi bisnis selama triwulan I-2007 masih dirasakan positif oleh responden dengan saldo bersih tertimbang (SBT) sebesar 12,36%, bahkan lebih optimis dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dengan SBT sebesar 11,26%. Meskipun demikian, kondisi keuangan perusahaan mengalami penurunan, dari SBT 19,9 pada triwulan IV-2006 menjadi 2,4% pada triwulan I-2007. Penurunan kondisi keuangan ini kemungkinan terjadi karena banyak dunia usaha yang menggunakan dana yang mereka miliki untuk melakukan *recovery* pasca gempa.

4.2.1.2. Risiko Kredit Rumah Tangga

Kredit konsumsi meningkat cukup tinggi sebesar 7,39%. Pangsa kredit konsumsi mencapai 35,08% dari total kredit, meningkat dari 33,76% pada triwulan sebelumnya. Dalam hal kolektibilitasnya, nisbah NPLs kredit konsumsi tergolong rendah yaitu 0,85%. Berdasarkan hasil survei konsumen di tiga kota di



Sumbar, terjadi peningkatan responden di triwulan laporan yang menyatakan sekarang saat yang tepat untuk konsumsi barang tahan lama.

Sementara itu indeks ekspektasi konsumen menunjukkan penurunan (Grafik 4.8). Demikian pula halnya dengan indeks keyakinan konsumen mengalami peningkatan, dari 78,42 di bulan Januari 2007 menjadi 75,33 di bulan Maret 2007.

4.2.2. Asesmen Perbankan

Kondisi sektor perbankan Sumbar selama triwulan I-2007 menunjukkan masih cukup terjaganya stabilitas perbankan daerah di tengah menurunnya perekonomian Sumbar pasca gempa. Kegiatan usaha perbankan meski tumbuh melambat namun tetap tumbuh positif.

4.2.2.1. Risiko Kredit

Portofolio aktiva produktif bank umum di Sumbar terkonsentrasi pada kredit dengan alokasi sebesar 76,34%. Selanjutnya penempatan pada BI sebesar 18,93%. Jika penempatan pada BI dirinci lagi, penanaman pada SBI mencatat peningkatan sebesar 32,23%, lebih tinggi dibanding peningkatan pada triwulan sebelumnya 16,32%. Sementara itu, penempatan pada giro meningkat sebesar 8,32%, lebih tinggi dibanding peningkatan pada triwulan sebelumnya (6,61%). Dalam hal kolektibilitas, nisbah NPLs-Gross bank umum di Sumbar sedikit meningkat, dari 3,43% di triwulan IV-2006 menjadi 3,48% di triwulan I-2007. Berdasarkan jenis penggunaan, nisbah NPLs-Gross tertinggi dialami oleh kredit investasi sebesar 5,81%, diikuti kredit modal kerja (4,84%). Sedangkan nisbah NPLs kredit konsumsi relatif kecil yaitu sebesar 0,85%.

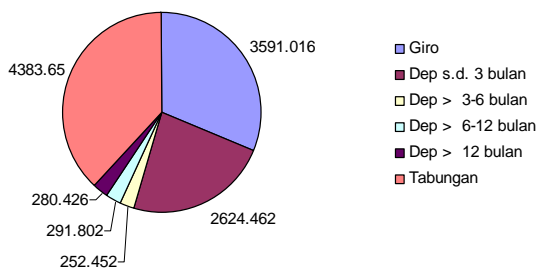
Persentase kredit UMKM di Sumbar mencapai 74,39% dari total kredit. 52,40% kredit UMKM merupakan kategori kredit konsumtif. Selebihnya terutama dialokasikan untuk sektor perdagangan (29,46%). Nisbah NPLs kredit UMKM mengalami sedikit peningkatan yakni sebesar 2,91% dibanding nisbah triwulan sebelumnya sebesar 2,83%. Secara sektoral, rasio NPLs UMKM tertinggi terjadi pada sektor pertambangan (27,98%) dan sektor pertanian (10,02%). Sementara itu, nisbah NPLs untuk kredit perdagangan relatif kondusif, yaitu sebesar 4,43%.

Dengan kecenderungan suku bunga rata-rata kredit yang sedikit turun, dari 15,76% pada akhir triwulan IV-2006 menjadi 15,24% pada akhir triwulan laporan, kredit yang disalurkan di Sumbar menunjukkan peningkatan, yaitu 3,35%. Sedangkan pada saat yang sama, kredit UMKM tumbuh lebih tinggi sebesar 5,50%.

4.2.2.2. Risiko Likuiditas

Struktur DPK bank umum di Sumbar menurut jenis simpanan (Grafik 4.9), didominasi dana jangka pendek yang mencapai 92,78% dari total DPK, yakni terdiri dari giro dengan pangsa 31,43%; tabungan dengan pangsa 38,37%, kemudian deposito berjangka waktu hingga 3 bulan dengan pangsa 22,97%. Dengan struktur simpanan tersebut, bank umum di Sumbar menghadapi risiko likuiditas yang relatif tinggi.

Grafik 4.9. Komposisi DPK Menurut Jangka Waktu



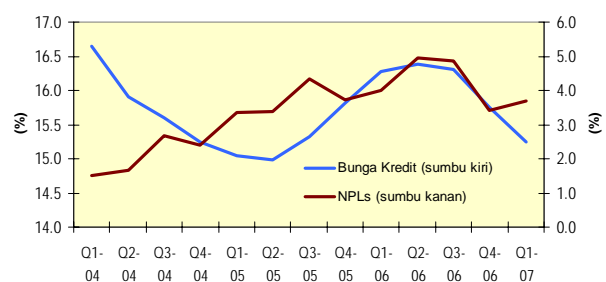
Dalam hal kepemilikan, 61,23% DPK bank umum merupakan milik perorangan. Sementara itu, pangsa simpanan milik nasabah perusahaan swasta dan asuransi masing-masing hanya sebesar 3,39% dan 3,08% sedangkan pangsa pemerintah sebesar 4,99%. Ditinjau dari pelaksanaan fungsi intermediasinya, nisbah LDR Sumbar

mendekati 100% yaitu mencapai 96,1% yang mencerminkan Sumbar telah memperoleh pembiayaan kredit yang hampir sama dengan jumlah dana yang dihimpun dari masyarakatnya.

4.2.2.3. Risiko Pasar

Berdasarkan analisis grafis hubungan antara suku bunga kredit dengan rasio NPLs dalam periode triwulan I-2004 s.d triwulan IV-2006 (Grafik 4.10), terlihat adanya pergerakan yang searah antara nisbah NPLs dengan suku bunga kredit. Namun pada triwulan laporan saat terjadi penurunan suku bunga kredit, NPL justru mengalami peningkatan. Yang harus diperhatikan oleh bank adalah meskipun suku bunga kredit menurun dan direspon dengan peningkatan permintaan kredit, namun *prudential banking* harus tetap dilaksanakan.

Grafik 4.10 Perkembangan Suku Bunga Kredit dan NPLs di Sumbar, Tw I-04 s.d Tw I-07



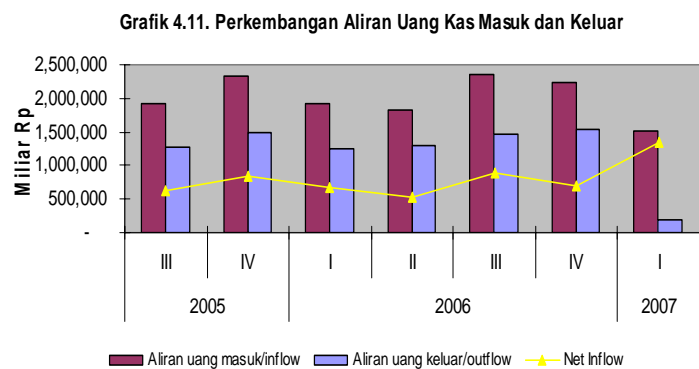
4.3. Perkembangan Sistem Pembayaran

Perkembangan lalu lintas pembayaran di Sumbar selama triwulan laporan di bidang pembayaran tunai menunjukkan penurunan aliran uang kas masuk maupun aliran uang kas keluar dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal yang sama juga terjadi pada transaksi non-tunai.

4.3.1. Perkembangan Alat Pembayaran Tunai.

4.3.1.1. Perkembangan Aliran Uang Kas Masuk dan Keluar

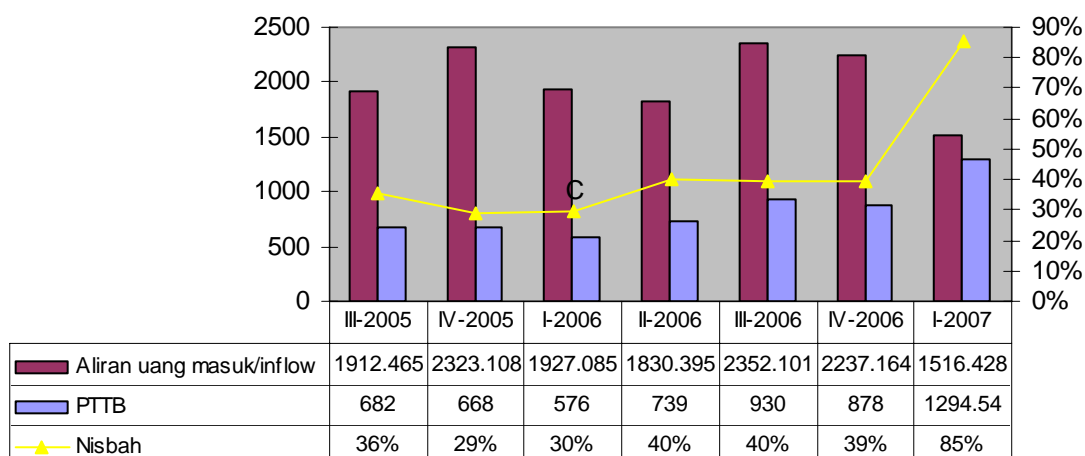
Selama triwulan I-2007, kegiatan transaksi tunai melalui Bank Indonesia Padang menunjukkan penurunan aliran uang kas masuk (*cash-inflow*) maupun aliran uang kas keluar (*cash-outflow*). Aliran kas masuk ke Bank Indonesia Padang (*cash-inflow*) turun 32% menjadi Rp1.516 miliar. Sementara itu, aliran uang kas keluar dari Bank Indonesia Padang (*cash-outflow*) menurun tajam 88% sebesar Rp1.363 miliar dibanding triwulan sebelumnya. Dengan perkembangan tersebut, aliran uang kas masuk bersih (*net-inflow*) pada triwulan laporan sebesar Rp1.335 miliar, tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV-2006 sebesar Rp693 miliar.



4.3.1.2. Pemusnahan Uang Tidak layak Edar (PTTB)

Dalam rangka menjaga kualitas uang yang beredar di masyarakat, Bank Indonesia secara berkala melakukan kegiatan pemusnahan terhadap uang yang sudah lusuh/rusak sehingga tidak layak lagi untuk diedarkan. Jumlah uang tidak layak edar yang dimusnahkan selama triwulan laporan mencapai Rp1.29 triliun, naik sekitar 47,44% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp878 miliar (Grafik 4.12). Nisbah antara jumlah uang yang dimusnahkan dengan jumlah aliran uang masuk (inflow) pada triwulan I-2007 adalah sebesar 85% atau jauh meningkat dibandingkan nisbah triwulan IV-2006 sebesar 39%.

Grafik 4.12. Perkembangan Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (PTTB)



4.3.1.3. Perkembangan Temuan Uang Palsu

Penemuan uang palsu yang dilaporkan masyarakat melalui perbankan kepada BI Padang masih tergolong sangat kecil. Selama triwulan I-2007, jumlah uang yang dipalsukan tercatat 82 lembar dengan nilai Rp 4,57 juta. Pecahan yang banyak dipalsukan adalah pecahan Rp 50.000,00 dengan tahun emisi 1999 sebanyak 44 lembar dan tahun emisi 2005 sebanyak 20 lembar.

Selama triwulan I-2007 ini, KBI Padang telah melakukan dua kali kegiatan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah yang diadakan Kabupaten Solok dan Kabupaten Pesisir Selatan. Melalui kegiatan tersebut diharapkan peredaran uang palsu dan diminimalisasi serta mengajak masyarakat untuk dapat menyimpan uang secara baik dan benar.

4.3.2. Perkembangan Alat Pembayaran Non-Tunai.

4.3.2.1 Perkembangan Kliring Lokal

Transaksi menggunakan kliring lokal wilayah KBI Padang dalam triwulan laporan mengalami kenaikan di sisi volume namun turun secara nominalnya. Volume kliring naik 5,3% menjadi 93 ribu lembar dengan nilai transaksi menurun 0,1% menjadi Rp2.284,6 miliar (Tabel 4.15). Bila dilihat secara rata-rata harian, warkat kliring yang berhasil diproses pada triwulan I-2007 tercatat sebanyak 1.476 lembar per hari dengan rata-rata nilai transaksi per harinya mencapai Rp36 miliar. Penurunan nominal transaksi melalui kliring tersebut merupakan pola musiman

dimana pada awal tahun transaksi belum terlalu banyak dan anggaran perusahaan maupun pemerintah sedang dalam tahap persetujuan.

Tabel 4.15 Perputaran Kliring dan Cek/BG Kosong

Keterangan	2005				2006				2007	Perubahan (qtq)	
	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV	Trw I	(+/-)	(%)
Perputaran Kliring											
- Volume (ribuan lembar)	160.4	161.2	176.7	166.6	162.5	165.1	103.4	88.3	93.0	5	5.3%
- Nominal (miliar rp)	3,131.9	3,174.4	3,533.4	3,586.5	3,141.9	3,168.0	2,401.9	2,286.4	2,284.6	-1.8	-0.1%
Penolakan Cek/BG Kosong											
- Volume (lembar)	1,347	2,052	1,916	1,651	1,408	1,432	1,081	914	1,734	820	89.7%
- Nominal (miliar rp)	16.4	27.7	24.4	26.4	21.3	17.6	13.1	16.8	27.2	10.3	61.3%
Rata-rata Harian Perputaran Kliring											
- Volume (lembar)	2,719	2,600	2,761	2,776	2,621	2,663	1,641	1,448	1,476	29	2.0%
- Nominal (miliar rp)	53.1	51.2	55.2	59.8	50.7	51.1	38.1	37	36	-1.2	-3.3%

Sementara itu penolakan cek/BG yang kosong selama triwulan laporan secara volume justru mengalami peningkatan dalam jumlah yang signifikan. Warkat Cek/BG kosong meningkat sebanyak 89,7%, dari 914 lembar menjadi 1.734 lembar. Demikian juga nilai transaksi Cek/BG kosong juga meningkat 61,3% dari Rp 16,8 miliar menjadi Rp 27,2 miliar. Kondisi usaha yang menurun akibat faktor musiman dan gempa bumi diperkirakan salah satu faktor penyebab hal tersebut.

4.3.2.2. Perkembangan Transaksi Real Time Gross Settlement (RTGS)

Perkembangan transaksi menggunakan sarana BI-RTGS di Kantor BI Padang pada triwulan I-2007 menunjukkan baik transaksi masuk maupun transaksi keluar mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Grafik 4.16).

Tabel 4.16 Perkembangan Transaksi BI-RTGS Wilayah KBI Padang

Uraian	2005				2006				2007	Perub (qtq)	
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	+/-	Pert.
Transaksi Masuk (inflow) :											
- Volume (transaksi)	4,134	4,708	5,355	5,613	4,954	6,531	7,197	7,669	6,563	(1,106)	-14.42%
- Nominal (miliar Rp)	6,344.2	7,034.3	9,419.8	8,678.8	7,797.5	8,099.6	9,363.9	9,884.1	7,046.0	(2,838)	-28.71%
Transaksi Keluar (outflow)											
- Volume (transaksi)	6,803	6,991	7,493	7,883	7,159	8,269	8,236	8,557	7,173	(1,384)	-16.17%
- Nominal (miliar Rp)	6,482.7	7,520.0	7,692.0	8,995.0	10,369.3	8,988.6	8,568.1	8,810.6	7,060.0	(1,750.6)	-19.87%

Untuk transfer masuk ke Sumbar melalui BI-RTGS, nilai transaksi turun sebesar 28,71% menjadi Rp7.046 miliar sementara volume transfer juga menurun 14,24% menjadi 6.563 transaksi. Sementara untuk transfer keluar dari Sumbar, nilai transaksi menurun sebesar 19,87% menjadi Rp7.060 miliar sementara volume transaksi turun 16,17% menjadi 7.173 transaksi.

Dampak Gempa Terhadap Perbankan Sumatera Barat*

Umum

Serangkaian gempa bumi mengguncang Sumatera Barat pada tanggal 6 Maret 2007 dengan skala mencapai 5,8 SR. Menurut Satkorlak Provinsi Sumatera Barat, luas wilayah yang terkena gempa bumi mencapai 12 kabupaten/kota atau sekitar 60% dari total 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Kabupaten/Kota yang terkena gempa bumi antara lain Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, Kab. Solok, Kab. 50 Kota, Kab. Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kota Solok, Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi, Kota Sawahlunto, Kota Pariaman, dan Kota Padang.

Gempa memakan korban meninggal mencapai 72 jiwa dan penduduk yang terpaksa mengungsi sebanyak 107.675 jiwa. Gempa diperkirakan menyebabkan kerugian materi sebesar Rp1,47 triliun berupa kerusakan/kehancuran bangunan tempat tinggal, gedung kantor, toko/tempat usaha, dan fasilitas/sarana umum.

Untuk mengetahui dampak gempa terhadap perbankan di Sumatera Barat, Bank Indonesia Padang melakukan survei dengan menyebarkan kuesioner kepada bank umum dan BPR di Sumatera Barat. Survei difokuskan kepada 9 daerah yang terkena gempa, yaitu Kab Tanah Datar, Kab. Solok, Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Solok dan Kota Padang. Sedangkan survei perbankan difokuskan terhadap simpanan masyarakat di bank, kredit yang disalurkan dan potensi kerugian kredit akibat gempa.

Hasil Survei Kepada Perbankan

Berdasarkan hasil survei, dari sisi jumlah debitur bank umum, total debitur yang terkena dampak gempa sebanyak 336 debitur. Kabupaten Tanah Datar merupakan wilayah dengan debitur terkena gempa bumi terbanyak, yaitu sebanyak 141 debitur, diikuti Kota Bukittinggi (80 debitur), Kota Padang Panjang (56 debitur), Kota Solok (41 debitur), dan sisanya tersebar di daerah lainnya.

Namun apabila dilihat dari sisi baki debet debitur bank umum yang terkena dampak gempa, Kota Bukittinggi merupakan wilayah tertinggi dengan baki debet/*outstanding* kredit yang terkena gempa sebesar Rp11,36 miliar, berikutnya adalah Kota Padang (Rp6,1 miliar), Kota Solok (Rp5,1 Miliar), Kota Padang Panjang (Rp2,52 miliar), Kab. Solok (Rp1,42 miliar), Kab Agam (Rp1,24 miliar) dan sisanya tersebar pada daerah lainnya. Hal ini menunjukkan plafon kredit per debitur yang disalurkan bank umum di daerah-daerah tersebut di atas lebih besar dari bank umum di Kab Tanah Datar. Total baki debet kredit yang terkena dampak gempa

* Hasil survei Bank Indonesia Padang kepada perbankan

sebesar Rp29,14 miliar, atau sekitar 0,37% dari total baki debit kredit pada 9 daerah survei.

Rekapitulasi Debitur terkena dampak gempa berdasarkan lokasi

No	Kabupaten/kota menurut lokasi proyek	Informasi Debitur terkena dampak			Posisi Kredit bulan Februari 2007	% baki debit kredit debitur terkena gempa terhadap total posisi kredit	% potensi kerugian kredit terhadap total posisi kredit daerah
		Jumlah Debitur	Baki Debet Kredit (Rp juta)	Potensi kerugian kredit (Rp juta)			
1	Kab Tanah Datar	141	982,18	757,04	306.681,00	0,32%	0,25%
2	Kota Bukittinggi	80	11.366,66	3.887,00	626.079,00	1,82%	0,62%
3	Kota Padang Panjang	56	2.516,05	2.136,58	159.810,00	1,57%	1,34%
4	Kota Solok	41	5.153,14	3.065,00	303.572,00	1,70%	1,01%
5	Kab Solok	7	1.417,00	1.500,00	1.539.863,00	0,09%	0,10%
6	Kab Padang Pariaman	6	229,00	15,00	239.540,00	0,10%	0,01%
7	Kota Padang	3	6.161,59	-	4.215.585,00	0,15%	0,00%
8	Kab Agam	1	1.239,38	150,00	218.664,00	0,57%	0,07%
9	Kota Payakumbuh	1	75,00	-	268.282,00	0,03%	0,00%
Grand Total		336	29.139,99	11.510,62	7.878.076,00	0,37%	0,15%

Sumber : Survei Bank Indonesia Padang

Dari jumlah baki debit kredit yang terkena gempa, berdasarkan perhitungan bank sekitar 0,15% atau sebesar Rp11,51 miliar berpotensi mengalami kerugian (akan terjadi kredit macet). Fakta tersebut mengindikasikan bahwa dari kredit yang terkena gempa, tidak semuanya menjadi bermasalah/berpotensi macet. Masih ada potensi kredit bank umum yang bisa diselamatkan. Selain karena tingkat kerusakan aset debitur yang relatif kecil, juga karena beberapa aset terlindungi oleh asuransi.

Untuk BPR, jumlah debitur yang terkena dampak gempa sebanyak 514 debitur. Dari jumlah tersebut, sekitar 416 debitur atau 80,93% debitur BPR korban gempa berada di Kab. Tanah Datar, diikuti Kota Bukittinggi (5,84%), Kab. Agam (5,25%), dan Kab. Solok (3,70%). Apabila dilihat dari sisi baki debit debitur BPR yang terkena dampak gempa (*outstanding* kredit), total baki debit kredit yang terkena gempa sebesar Rp2,13 miliar. Kab Tanah Datar merupakan wilayah tertinggi dengan baki debit sebesar Rp1,32 miliar, berikutnya adalah Kab Agam (Rp290 juta), Kota Bukittinggi (Rp231 juta), dan Kab Solok (Rp117 juta).

Rekapitulasi Debitur BPR terkena dampak gempa berdasarkan lokasi

No	Kabupaten/kota	Informasi Debitur terkena			Posisi Kredit bulan Februari 2007	% baki debit kredit debitur terkena gempa terhadap total posisi kredit daerah	% potensi kerugian kredit terhadap total posisi kredit daerah
		Jumlah Debitur	Baki Debet Kredit (Rp juta)	Potensi kerugian kredit (Rp juta)			
1	Kab Tanah Datar	416	1.320,00	353,54	39.025,00	3,38%	0,91%
2	Kota Solok	11	82,83	49,83	2.981,00	2,78%	1,67%
3	Kota Padang Panjang	4	45,00	2,00	1.798,00	2,50%	0,11%
4	Kota Bukittinggi	30	231,00	40,00	12.524,00	1,84%	0,32%
5	Kab Solok	19	117,00	47,00	12.886,00	0,91%	0,36%
6	Kab Agam	27	290,47	138,10	40.856,00	0,71%	0,34%
7	Kab. Lima Puluh Kota	4	35,00	-	53.386,00	0,07%	0,00%
8	Kab Padang Pariaman	3	11,00	11,00	32.780,00	0,03%	0,03%
Grand Total		514	2.132,30	641,47	196.236,00	1,09%	0,33%

Sumber : Survei Bank Indonesia Padang

Jika dibandingkan dengan total baki debit/*outstanding* kredit BPR posisi Februari 2007 sebesar Rp196 miliar, maka prosentase kredit BPR yang terkena gempa di Provinsi Sumatera Barat sebesar 1,09%. Dari jumlah tersebut, berdasarkan perhitungan BPR sekitar 0,33% kredit yang terkena gempa atau sebesar Rp641,27 juta berpotensi mengalami kerugian (terjadi kredit macet). Meskipun prosentasenya tidak terlalu besar, namun cukup berperan dalam mendorong angka *non performing loans/NPL* ke tingkat yang lebih tinggi.

Perkembangan Kredit dan DPK Pasca Gempa

Pertumbuhan kredit pasca gempa (posisi Maret 2007) pada beberapa daerah yang terkena gempa mengalami perlambatan, seperti di Kab Padang Pariaman, kota Padang, kota Padang Panjang dan kota Pariaman. Sementara itu, pada daerah yang terkena gempa lainnya, seperti Kab Agam, 50 Kota, Solok, Tanah Datar, kredit di bulan Maret 2007 mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dari bulan Februari 2007.

Perkembangan Kredit Pasca Gempa 6 Maret 2007
Menurut Bank Pelapor

Wilayah	Pertumbuhan		Selisih
	Februari	Maret	
Kab. Agam	3.15%	4.46%	1.31%
Kab. Limapuluh Koto	2.19%	3.56%	1.38%
Kab. Solok	5.64%	7.89%	2.25%
Kab. Padang Pariaman	2.00%	1.31%	-0.68%
Kab. Tanah Datar	2.56%	4.04%	1.47%
Kota Bukittinggi	3.32%	3.39%	0.07%
Kota Padang	3.89%	3.79%	-0.10%
Kodya Padangpanjang	5.38%	3.13%	-2.25%
Kodya Solok	2.89%	3.91%	1.02%
Kodya Payakumbuh	4.20%	4.39%	0.20%
Kotif Pariaman	9.69%	4.64%	-5.05%

Sumber : LBU

Seperti halnya kredit, pada beberapa daerah yang terkena gempa, Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami perlambatan, seperti di Kab Agam, kota Padang Pariaman, kota Padang Panjang, kota Payakumbuh, dan Kab Solok. Sementara itu, pada daerah yang terkena gempa lainnya, DPK mengalami pertumbuhan DPK yang lebih tinggi dari bulan Februari 2007, yaitu di Kab 50 Kota, Tanah Datar, Bukittinggi, dan

Perkembangan Dana Pihak Ketiga Berdasarkan Kepemilikan
Per Wilayah Kabupaten Kota Menurut Bank Pelapor

Wilayah	Pertumbuhan Februari			Pertumbuhan Maret		
	Perush_Swasta	Perorangan	DPK Total	Perush_Swasta	Perorangan	DPK Total
Kab. Agam	-7.57%	-6.10%	5.49%	9.17%	4.38%	-4.78%
Kab. Padang Pariaman	-16.23%	-3.32%	-3.33%	-6.22%	-1.84%	-1.89%
Kota Padang	-9.60%	-1.36%	0.47%	1.37%	-2.56%	-0.22%
Kab. Limapuluh Koto	-10.40%	-2.59%	-3.41%	-26.93%	1.54%	2.75%
Kodya Solok	-61.82%	1.18%	-0.92%	63.23%	-0.74%	3.18%
Kodya Padangpanjang	-16.58%	-0.49%	4.93%	-9.42%	1.77%	3.23%
Kab. Tanah Datar	10.84%	-6.76%	2.35%	-58.23%	6.98%	3.58%
Kodya Payakumbuh	-8.17%	-23.92%	5.63%	-18.92%	26.08%	3.83%
Kota Bukittinggi	-10.30%	-0.93%	0.56%	-24.98%	1.96%	4.98%
Kab. Solok	9.41%	-3.59%	7.92%	-36.69%	-0.51%	6.59%
Kotif Pariaman	-29.17%	-8.91%	9.36%	8.16%	-6.05%	8.79%
Rata-Rata	-13.60%	-5.16%	2.64%	-9.04%	2.82%	2.73%

Sumber Data : LBU

kota Solok.

Fenomena yang cukup menarik, yaitu pada beberapa wilayah yang terkena gempa, di bulan Maret 2007 justru terjadi kenaikan simpanan milik perorangan antara lain di Payakumbuh (26,08%), Tanah Datar (6,98%), Agam (4,38%), dan Bukittinggi (1,96%). Hal sebaliknya terjadi pada simpanan milik perusahaan swasta. Terjadi penurunan cukup drastis di Tanah Datar (-58,23%), Kab. Solok (-36,69%), Kab. 50 Kota (-26,93%), Kota Bukittinggi (-24,98%), dan Kota Payakumbuh (-18,92%).

Langkah Penanganan Perbankan

Dalam menghadapi potensi kerugian kredit, sebagian besar kalangan perbankan akan melakukan restrukturisasi kredit (41,94%). Restrukturisasi ini dilakukan dengan berbagai macam bentuk antara lain *reschedulling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Sebagai langkah preventif, sebanyak 29,03% kalangan perbankan akan meminta debitur menambah polis asuransi, seperti kebakaran dan bencana alam, untuk tempat usaha ataupun barang dagangan, sehingga apabila terjadi bencana serupa debitur tidak mengalami kerugian.

Kesimpulan

- Perbedaan yang cukup besar antara total kerugian materi (info Satkorlak Sumbar > Rp1 triliun) dan total baki debit (*outstanding* kredit) debitur yang terkena gempa (hasil survei Rp31,27 miliar) mengindikasikan bahwa korban gempa bumi di Sumbar kebanyakan bukan nasabah bank, melainkan masyarakat yang belum akses ke bank (tidak memiliki pinjaman & simpanan di bank) dan umumnya tinggal di pedesaan¹.
- Kepada debitur yang menghadapi potensi kerugian kredit, sebagian besar kalangan perbankan akan melakukan restrukturisasi kredit.
- Meningkatnya simpanan perorangan dikarenakan adanya pemberian bantuan dana kepada individu/keluarga yang menjadi korban gempa, melalui sarana perbankan (transfer rekening/kliring).
- Penurunan pada simpanan/DPK milik perusahaan diduga digunakan/diambil untuk membiayai rehabilitasi pasca gempa, kalangan dunia usaha melakukan *self financing* dengan menggunakan simpanan yang mereka miliki.
- Secara keseluruhan di provinsi Sumatera Barat gempa belum berdampak negatif terhadap pertumbuhan kredit dan simpanan/DPK di Sumatera Barat.

¹ Hal tersebut juga dikonfirmasi dari tingkat monetisasi yang relatif masih rendah di daerah pedesaan

BAB 5

PROSPEK PEREKONOMIAN

5.1. Prospek Ekonomi

Berdasarkan evaluasi perkembangan ekonomi, moneter, perbankan dan sistem pembayaran serta kondisi makro ekonomi nasional, kegiatan perekonomian Sumatera Barat pada triwulan II-2007 diprediksikan mengalami pertumbuhan yang positif dengan pertumbuhan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I-2007. Menurut proyeksi Bank Indonesia Padang, perekonomian Sumatera Barat diperkirakan tumbuh antara 1,00% - 2,00% (q-t-q) pada triwulan II-2007.

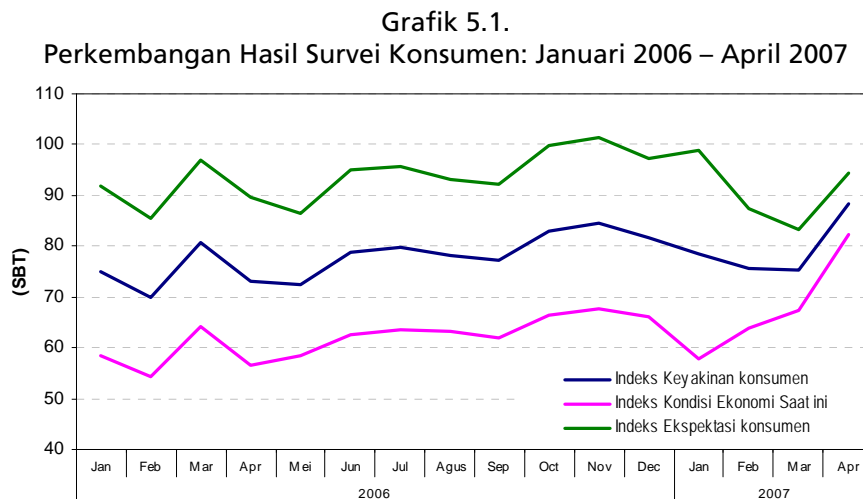
Perkiraan ini dikonfirmasi oleh hasil survei kegiatan dunia usaha (SKDU) yang menunjukkan ekspektasi positif responden untuk kegiatan usaha di triwulan II-2007. Menurut kalangan dunia usaha di Sumbar semua sektor diperkirakan mengalami peningkatan usaha kecuali sektor pengangkutan dengan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 13,14. Sektor pertanian diperkirakan mengalami peningkatan usaha tertinggi dengan SBT sebesar 5,35. Sektor bangunan juga diperkirakan akan mengalami peningkatan usaha dengan meningkatnya permintaan untuk recovery pasca gempa.

Tabel 5.1
Ekspektasi Kegiatan Usaha
Menurut Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Triwulan I-2007

NO	SEKTOR/SUBSEKTOR	SBT
1	PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	5.35
2	PERTAMBANGAN	
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	1.38
4	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	0.81
5	BANGUNAN	4.61
6	PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	1.99
7	PENGANKUTAN DAN KOMUNIKASI	-2.74
8	KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	1.21
9	JASA - JASA	0.52
	TOTAL SELURUH SEKTOR	13.14

Sektor pemerintah diperkirakan juga akan menstimulus perekonomian melalui peningkatan pengeluaran modal. Realisasi APBN maupun APBD diperkirakan semakin meningkat pada triwulan II-2007. Hal ini didukung oleh semakin lancarnya sistem perbendaharaan pemerintah pusat serta telah disahkannya APBD di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Sementara itu, sisi konsumsi diperkirakan masih menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Berdasarkan Survey Konsumen yang dilakukan bulanan, tendensi keyakinan, kondisi ekonomi, maupun ekspektasi konsumen terus menunjukkan peningkatan (grafik 5.1.).

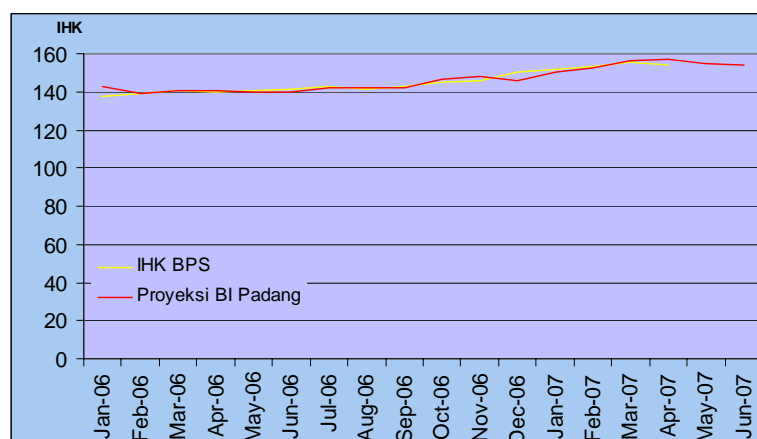


Investasi diperkirakan mulai meningkat seiring dengan adanya komitmen yang lebih kuat dari investor. Pada triwulan II-2007, Asosiasi Pengusaha Gula dan Terigu (Apegti) merealisasikan pembangunan pabrik gula (PG) pertama di Padang, dengan total investasi sebesar Rp300 miliar. Pendirian PG yang berlokasi di Padang Pariaman Industrial Park itu, dilaksanakan oleh anggota tetap Apegti yakni PT Semesta Berdaya. Saat ini pendirian pabrik gula, yang merupakan bagian dari 9 pabrik gula Apegti, kini dalam tahap konstruksi dan diharapkan selesai dalam waktu 1 tahun 8 bulan. Dukungan konkret yang diberikan pemda setempat, antara lain penyediaan lahan untuk tanaman tebu dan lokasi pabrik serta kemudahan perizinan. Selain pabrik gula, komitmen investasi juga berasal dari PT Offshore Crew Services (OCS) Indonesia, yang telah menandatangani MoU mega proyek terowongan Pegambiran - Bungus Telukkabung dengan Walikota Padang. Pembangunan terowongan tersebut nantinya dapat mempersingkat jarak tempuh jalur Padang - Pesisir Selatan sehingga lebih efisien bagi pengguna kendaraan.

5.2. Proyeksi Inflasi

Laju inflasi kota Padang triwulan II-2007 diperkirakan akan lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I-2007. Berdasarkan proyeksi Bank Indonesia Padang, inflasi pada triwulan II-2007 diperkirakan antara 1,50% - 2,50% (q-t-q). Deflasi yang terjadi pada bulan April 2007 diprediksi masih akan berlanjut dalam level yang lebih rendah hingga bulan Juni 2007.

Grafik 5.2.
Proyeksi Inflasi Sumbar



Menurunnya tekanan inflasi ini juga diharapkan dari terkendalinya harga beras. Berdasarkan data empiris, determinan inflasi di Sumatera Barat adalah *volatile foods*. Masuknya masa panen dan musim kemarau diperkirakan akan memberikan jaminan ketersediaan kelompok bahan makanan seperti beras, gula, cabe merah, dan beberapa jenis sayuran. Tekanan yang mungkin terjadi yaitu pada komoditi kelompok sandang dan kelompok pendidikan mengingat tahun ajaran baru dimulai pada akhir triwulan II hingga triwulan III. Tekanan inflasi dari cukai rokok diperkirakan sudah terlewati meskipun pemerintah menunda implementasi pengenaan tarif cukai rokok spesifik karena di pasar sudah terjadi kenaikan harga pada bulan Maret 2007 lalu.

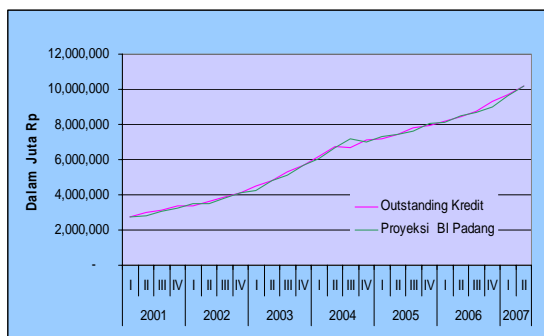
5.3. Proyeksi Kegiatan Perbankan

Kegiatan perbankan di Sumatera Barat pada triwulan II-2007 diperkirakan kembali meningkat dengan pertumbuhan yang lebih tinggi daripada triwulan I-2007. Bank Indonesia Padang memproyeksikan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga pada triwulan II-2007 sebesar 6,00% - 8,00%. Pembukaan Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat pada bulan Mei 2007 diperkirakan akan meningkatkan DPK terutama bagi masyarakat Sumatera Barat yang terkenal agamis.

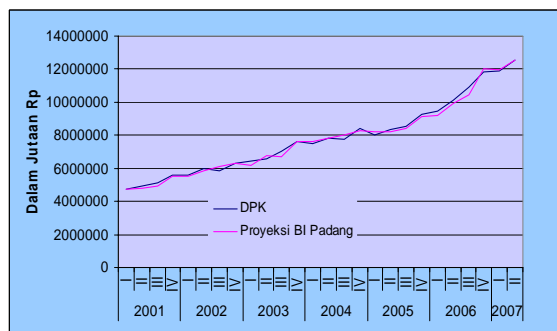
Sementara itu pertumbuhan Kredit diperkirakan sebesar 5,00-7,00%. Peningkatan kegiatan ekonomi di sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan sektor bangunan diprediksi akan meningkatkan kebutuhan kredit pada triwulan mendatang. Di sektor pertanian, realisasi dukungan terhadap program Revitalisasi Sektor Pertanian untuk wilayah Sumatera Barat diperkirakan mulai ada. Pada sektor bangunan/konstruksi, recovery terhadap bangunan yang rusak/hancur pasca

gempa diperkirakan mulai menunjukkan peningkatan. Selain itu, adanya realisasi investasi pendirian pabrik gula di Padang Pariaman akan meningkatkan permintaan kredit di sektor industri pengolahan. Tren semakin menurunnya suku bunga kredit setelah Bank Indonesia kembali menurunkan BI Rate hingga 8,75% diharapkan juga akan mendorong permintaan kredit.

**Grafik 5.3.
Proyeksi Kredit**



**Grafik 5.4.
Proyeksi DPK**



Lampiran

LAMPIRAN 1
PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA PROPINSI SUMATERA BARAT ATAS DASAR HARGA BERLAKU
TRIWULANAN TAHUN 2005-2007

Sektor / Sub Sektor	Total 2005	Tahun 2006 **)				Total 2006	Tahun 2007 ***)
		TRW. I	TRW II	TRW III	TRW. IV		TRW. I
1. PERTANIAN / AGRICULTURE	11.433.001,38	3.397.984,91	3.412.946,11	3.476.096,09	3.494.445,25	13.781.472,35	3.675.902,96
a. Tanaman Pangan & Hortikultura/Farm Food Crops	5.990.309,53	1.894.452,44	1.895.752,70	1.933.495,84	1.948.352,96	7.672.053,95	2.099.123,95
b. Perkebunan / Farm Non Food Crops	2.538.832,55	690.333,01	696.244,12	711.888,62	714.991,72	2.813.457,47	731.964,36
c. Peternakan/Livestock	945.969,38	246.842,64	253.385,95	255.226,32	253.702,37	1.009.157,28	252.175,05
d. Kehutanan/Forestry	662.777,23	173.918,87	173.423,72	174.670,76	170.784,58	692.797,93	173.918,87
e. Perikanan/Fishery	1.295.112,69	392.437,96	394.139,62	400.814,54	406.613,62	1.594.005,74	418.720,74
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/	1.514.207,22	429.546,05	436.995,51	442.488,56	447.445,13	1.756.475,26	448.838,50
a. Migas dan Gas Bumi/Crude Petroleum & Natural Gas							
b. Non Migas / Non Crude Petroleum & Natural Gas	219.944,25	59.254,78	59.857,15	59.925,24	60.123,26	239.160,43	60.237,52
c. Penggalian / Quarrying	1.294.262,97	370.291,27	377.138,37	382.563,31	387.321,88	1.517.314,83	388.600,98
3. INDUSTRI PENGOLAHAN /	5.084.342,79	1.368.644,07	1.380.642,65	1.399.362,48	1.408.349,85	5.556.999,05	1.437.177,62
a. Industri Migas/Oil & Gas Manufacturing Industries							
b. Industri Tanpa Migas/Non Oil & Gas Manufacturing	5.084.342,79	1.368.644,07	1.380.642,65	1.399.362,48	1.408.349,85	5.556.999,05	1.437.177,62
1. Makan, Minuman dan Tembakau / Food, Drink & Tobacco	1.324.100,86	350.681,25	352.952,36	354.911,79	355.159,81	1.413.705,21	365.460,77
2. Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki	2.015.090,46	532.801,58	534.942,43	543.546,87	548.337,57	2.159.628,45	555.867,82
3. Barang Kayu dan Hasil Hutan	181.178,17	49.563,90	48.898,16	48.914,02	48.501,98	195.878,06	48.920,46
4. Kertas dan Barang Cetak	17.029,51	4.739,29	4.760,52	4.862,22	4.864,47	19.226,50	4.951,41
5. Pupuk Kimia dan Barang dari Karet	344.709,94	90.382,03	91.260,83	91.748,85	91.841,43	365.233,13	94.858,00
6. Semen dan Barang Non Logam	1.067.768,66	301.115,68	307.917,14	315.133,16	319.357,29	1.243.523,27	326.338,29
7. Logam Dasar, Besi dan Baja							
8. Alat Angk. Mesin dan Peralatan	132.783,12	38.923,26	39.469,19	39.801,69	39.841,06	158.035,21	40.331,82
9. Barang Lainnya/Other	1.682,07	437,09	442,03	443,87	446,24	1.769,23	449,06
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH /	666.706,05	186.190,09	189.189,71	188.091,31	190.619,08	754.090,19	191.836,01
a. Listrik / Electricity	614.435,84	172.035,86	174.855,09	173.314,35	175.425,82	695.631,12	176.496,74
b. Gas / Gas							
c. Air Bersih / Water Supply	52.270,21	14.154,22	14.334,62	14.776,97	15.193,26	58.459,07	15.339,26
5. BANGUNAN / CONSTRUCTION	2.472.641,03	715.557,28	731.772,15	741.840,65	753.227,09	2.942.397,17	779.229,26
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN /	7.799.756,56	2.019.050,26	2.056.418,28	2.101.845,25	2.125.509,92	8.302.823,72	2.176.497,84
a. Perdagangan Besar dan Eceran/Wholesale & Retail Trade	7.525.084,66	1.944.886,54	1.981.330,81	2.025.918,87	2.048.591,49	8.000.727,71	2.098.047,44
b. Hotel / Hotels	67.490,79	17.431,23	17.611,15	17.734,39	17.940,42	70.717,19	18.102,24
c. Restoran / Restaurant	207.181,11	56.732,50	57.476,32	58.192,00	58.978,01	231.378,82	60.348,16
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI /	6.167.342,76	1.940.601,83	1.965.549,78	2.008.388,51	2.051.585,88	7.966.126,00	2.122.089,77
a. Angkutan / Transport	5.052.531,62	1.613.258,58	1.629.375,12	1.657.510,92	1.689.950,25	6.590.094,88	1.733.723,69
1. Kereta Api / Railway Transport	33.460,51	10.826,41	10.845,63	10.724,42	10.735,67	43.132,14	10.826,41
2. Jalan Raya (Darat) / Road Transport	3.393.561,00	1.144.930,96	1.154.337,54	1.173.263,43	1.195.247,13	4.667.779,06	1.222.524,18
3. Angkutan Laut / Sea Transport	457.270,07	130.024,89	128.800,02	128.775,99	129.762,58	517.363,48	130.024,89
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyebrangan/Inland	126.269,80	46.871,04	48.318,82	49.447,08	50.019,56	194.656,51	51.677,14
5. Angkutan Udara / Air Transport	527.485,05	145.809,16	149.499,23	154.512,76	159.861,69	609.682,84	171.727,98
6. Jasa Penunjang Angkutan / Supporting and Auxiliary Transport	514.485,19	134.796,12	137.573,87	140.787,24	144.323,61	557.480,85	146.943,09
b. Komunikasi / Communication	1.114.811,14	327.343,24	336.174,66	350.877,59	361.635,63	1.376.031,12	388.366,09
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	2.249.279,96	637.137,27	654.715,69	673.164,69	682.138,81	2.647.156,47	700.220,75
a. Bank / Banking	687.158,14	177.462,49	182.613,28	189.432,37	194.306,59	743.814,74	198.392,36
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank & Jasa Penunjang /	555.144,92	161.263,89	165.593,90	170.161,58	173.157,33	670.176,70	176.007,20
c. Sewa Bangunan / Rent of Building	940.615,65	279.952,13	287.966,58	294.717,83	295.622,28	1.158.258,82	306.326,44
d. Jasa Perusahaan / Business Services	66.361,25	18.458,76	18.541,93	18.852,91	19.052,60	74.906,21	19.494,76
9. JASA-JASA / SERVICES	7.287.291,49	2.050.213,67	2.071.331,40	2.099.449,13	2.121.489,95	8.342.484,16	2.203.128,56
a. Pemerintahan Umum & Pertahanan /Public Administration	5.020.455,10	1.428.299,83	1.437.606,40	1.455.767,73	1.474.584,43	5.796.258,40	1.542.176,21
b. Swasta / Private Services	2.266.836,39	621.913,84	633.725,00	643.681,41	646.905,52	2.546.225,76	660.952,35
1. Sosial Kemasyarakatan/Social & Community Services	852.783,92	230.893,50	235.330,72	239.416,31	240.846,51	946.487,04	245.027,79
2. Hiburan dan Rekreasi/Entertainment & Cultural Services	233.735,94	62.316,27	63.587,17	64.682,54	65.392,92	255.978,91	66.469,73
3. Perorangan dan Rumah tangga/ Personal & Household Services	1.180.316,53	328.704,07	334.807,11	339.582,55	340.666,08	1.343.759,81	349.454,82
PDRB / GRDP	44.674.569,24	12.744.925,43	12.899.561,29	13.130.726,67	13.274.810,97	52.050.024,36	13.734.921,27

Catatan : *) Angka Diperbaiki
 **) Angka Sementara
 ***) Angka Sangat sementara

LAMPIRAN 2
PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA PROPINSI SUMATERA BARAT ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000
TRIWULANAN TAHUN 2005-2007

Sektor / Sub Sektor	Total 2005 *)	Tahun 2006 **)				Total 2006 **)	2007 ***)
		TRW. I	TRW. II	TRW. III	TRW. IV		
1. PERTANIAN / AGRICULTURE	7.293.205,65	1.898.609,42	1.919.904,84	1.947.505,99	1.953.317,11	7.719.337,36	1.960.904,28
a. Tanaman Pangan & Hortikultura/Farm Food Crops	3.697.934,11	962.188,25	972.579,88	986.779,55	993.094,94	3.914.642,61	994.187,34
b. Perkebunan / Farm Non Food Crops	1.701.918,33	448.967,88	455.567,70	464.952,40	466.765,71	1.836.253,69	472.740,31
c. Peternakan/Livestock	599.292,39	156.101,08	160.097,27	161.137,90	159.913,25	637.249,50	160.297,04
d. Kehutanan/Forestry	496.051,56	124.085,95	123.626,83	124.356,23	121.433,86	493.502,87	119.830,93
e. Perikanan/Fishery	798.009,26	207.266,27	208.033,16	210.279,91	212.109,35	837.688,69	213.848,65
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/	951.882,62	247.387,72	250.123,17	251.771,00	253.081,14	1.002.363,02	253.323,32
a. Migas dan Gas Bumi/Crude Petroleum & Natural Gas							
b. Non Migas / Non Crude Petroleum & Natural Gas	178.516,58	45.153,38	45.320,45	45.247,94	45.256,99	180.978,75	45.270,56
c. Penggalian / Quarrying	773.366,04	202.234,34	204.802,72	206.523,06	207.824,15	821.384,27	208.052,76
3. INDUSTRI PENGOLAHAN /	3.808.287,01	1.003.282,88	1.010.865,94	1.022.083,28	1.027.575,81	4.063.807,91	1.034.437,27
a. Industri Migas/Oil & Gas Manufacturing Industries							
b. Industri Tanpa Migas/Non Oil & Gas Manufacturing Industries	3.808.287,01	1.003.282,88	1.010.865,94	1.022.083,28	1.027.575,81	4.063.807,91	1.034.437,27
1. Makanan, Minuman dan Tembakau / Food and Beverage	1.007.033,44	262.309,26	263.909,35	265.017,77	265.123,77	1.056.360,15	266.237,29
2. Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki	1.540.089,73	404.495,58	405.628,17	410.657,96	413.902,15	1.634.683,86	415.185,25
3. Barang Kayu dan Hasil Hutan	135.189,15	34.405,04	33.844,24	33.546,41	33.086,82	134.882,52	32.580,60
4. Kertas dan Barang Cetakan	12.706,92	3.259,67	3.272,06	3.333,90	3.330,23	13.195,86	3.350,88
5. Pupuk Kimia dan Barng dari Karet	267.296,11	68.920,26	69.526,76	69.818,77	69.846,70	278.112,49	70.670,89
6. Semen dan Barng Non Logam	759.585,05	207.909,74	212.400,59	217.243,32	219.806,79	857.360,45	223.895,20
7. Logam Dasar, Besi dan Baja							
8. Alat Angk. Mesin dan Peralatan	85.049,61	21.638,46	21.937,08	22.116,96	22.130,23	87.822,74	22.167,86
9. Barang Lainnya/Other	1.337,00	344,87	347,70	348,19	349,09	1.389,85	349,30
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH /	338.722,91	91.325,91	92.317,32	91.559,19	91.941,55	367.143,97	92.448,24
a. Listrik / Electricity	306.401,03	82.842,84	83.737,54	82.782,93	83.006,45	332.369,76	83.438,08
b. Gas / Gas							
c. Air Bersih / Water Supply	32.321,88	8.483,07	8.579,78	8.776,26	8.935,11	34.774,21	9.010,16
5. BANGUNAN / CONSTRUCTION	1.440.337,58	374.343,33	382.766,06	387.971,68	393.597,27	1.538.678,34	396.982,20
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN /	5.305.757,21	1.368.947,37	1.394.098,23	1.422.392,83	1.437.132,67	5.622.571,09	1.456.533,25
a. Perdagangan Besar dan Eceran/Wholesale & Retail Trade	5.123.248,63	1.322.332,43	1.346.927,81	1.374.809,22	1.388.969,75	5.433.039,22	1.407.859,74
b. Hotel / Hotels	45.916,00	11.769,11	11.878,56	11.907,07	12.033,28	47.588,02	12.077,81
c. Restoran / Restaurant	136.592,58	34.845,83	35.291,86	35.676,54	36.129,63	141.943,85	36.595,70
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI /	3.754.819,81	992.419,99	1.004.577,91	1.024.547,54	1.045.242,24	4.066.787,67	1.064.730,30
a. Angkutan / Transport	2.995.481,88	778.414,21	785.714,20	798.089,26	812.873,39	3.175.091,06	824.275,03
1. Kereta Api /Railway Transport	22.006,07	6.759,75	6.769,21	6.676,47	6.681,81	26.887,25	6.565,55
2. Jalan Raya (Darat) / Road Transport	1.983.606,13	515.131,36	518.943,33	526.883,16	536.683,19	2.097.641,04	544.250,42
3. Angkutan Laut / Sea Transport	243.201,02	62.990,45	62.303,86	62.216,63	62.608,60	250.119,54	62.283,03
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyebrangan/Inland Waterway	53.368,00	14.808,24	15.183,14	15.470,10	15.541,26	61.002,75	15.884,73
5. Angkutan Udara / Air Transport	354.988,25	92.266,76	94.518,07	97.306,35	100.371,50	384.462,69	103.994,91
6. Jasa Penunjang Angkutan / Supporting and Auxiliary Transport	338.312,41	86.457,65	87.996,59	89.536,53	90.987,02	354.977,79	91.296,38
b. Komunikasi / Communication	759.337,93	214.005,78	218.863,71	226.458,28	232.368,84	891.696,61	240.455,28
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN /	1.464.102,75	379.192,52	388.797,30	398.965,35	403.624,35	1.570.579,52	409.170,49
a. Bank / Banking	508.959,54	130.525,99	133.984,92	138.393,02	141.396,15	544.300,09	144.167,52
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank & Jasa Penunjang	353.906,76	91.774,47	93.765,98	95.941,35	97.083,05	378.564,85	97.587,88
c. Sewa Bangunan / Rent of Building	557.920,94	145.641,52	149.748,61	153.147,90	153.546,09	602.084,12	155.741,80
d. Jasa Perusahaan / Business Services	43.315,51	11.250,54	11.297,79	11.483,07	11.599,05	45.630,46	11.673,29
9. JASA-JASA / SERVICES	4.802.364,99	1.229.044,53	1.241.893,89	1.258.254,71	1.269.014,92	4.998.208,06	1.282.928,50
a. Pemerintahan Umum & Pertahanan /Public Administration	3.246.849,03	821.995,76	827.256,53	837.514,51	846.392,17	3.333.158,97	858.157,02
b. Swasta / Private Services	1.555.515,96	407.048,77	414.637,36	420.740,20	422.622,76	1.665.049,09	424.771,48
1. Sosial Kemasyarakatan/Social & Community Services	556.383,82	146.636,29	149.378,39	151.798,32	152.618,03	600.431,03	153.365,86
2. Hiburan dan Rekreasi/Entertainment & Cultural	174.988,62	44.967,72	45.871,57	46.614,69	47.099,48	184.553,47	47.452,73
3. Perorangan dan Rumah tangga/ Personal & Household	824.143,52	215.444,76	219.387,40	222.327,19	222.905,24	880.064,59	223.952,90
PDRB / GRDP	29.159.480,53	7.584.553,67	7.685.344,66	7.805.051,56	7.874.527,05	30.949.476,95	7.951.457,86

Catatan : *) Angka Diperbaiki
 **) Angka Sementara
 ***) Angka Sangat sementara

LAMPIRAN 3
PDRB MENURUT PENGGUNAAN PROPINSI SUMATERA BARAT ATAS DASAR HARGA BERLAKU
TRIWULANAN TAHUN 2005-2007

Jenis Penggunaan/ Type of Expenditure	Tahun 2005 *)				Total Tahun 2005 *	Tahun 2006 **)				Total Tahun 2006 **	Tahun 2007 ***)
	TRW. I	TRW II	TRW. III	TRW. IV		TRW. I	TRW II	TRW. III	TRW. IV		TRW. I
1. PENGELUARAN KONSUMSI RUMAHTANGGA/ Private Consumption Expenditure	5.927.916,40	6.113.260,74	6.525.441,38	7.439.355,34	26.005.973,86	7.364.016,87	7.418.054,77	7.505.296,31	7.566.755,89	29.854.123,84	7.720.447,98
A. MAKANAN/Food	3.627.768,38	3.741.782,53	3.992.583,45	4.567.289,99	15.929.424,35	4.506.109,66	4.519.819,39	4.568.301,58	4.600.964,84	18.195.195,47	4.739.995,04
B. NON MAKANAN/Non-Food	2.300.148,02	2.371.478,21	2.532.857,93	2.872.065,35	10.076.549,51	2.857.907,21	2.898.235,38	2.936.994,73	2.965.791,05	11.658.928,37	2.980.452,94
2. PENGELUARAN KONSUMSI LEMBAGA SWASTA NIRLABA/ Non-profit Institution Consumption Expenditure	103.933,94	110.649,08	122.148,44	135.951,77	472.683,23	134.480,68	134.913,48	137.097,21	137.401,21	543.892,58	140.453,41
3. PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH/ Government Consumption Expenditure	1.175.743,13	1.223.576,83	1.293.697,46	1.457.347,67	5.150.365,09	1.469.649,31	1.490.616,34	1.512.157,11	1.530.651,19	6.003.073,95	1.586.854,46
4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO/ Gross Domestic Fixed capital Formation	1.869.847,11	1.938.574,48	1.985.536,76	2.259.526,74	8.053.485,09	2.263.604,28	2.286.933,81	2.323.037,16	2.357.757,65	9.231.332,90	2.412.045,01
5. PERUBAHAN STOK/Change in Stock	-186.794,03	-208.023,42	-248.366,96	-255.958,38	-899.142,79	-234.815,41	-175.667,99	-205.980,37	-274.183,54	-890.647,31	-235.441,06
6. EKSPOR BARANG-BARANG DAN JASA-JASA/ Export of Goods and Services	1.735.068,32	1.918.957,15	2.101.243,29	2.302.527,92	8.057.796,68	2.387.024,51	2.394.534,07	2.529.254,33	2.650.077,81	9.960.890,72	2.830.539,83
7. DIKURANGI IMPOR BARANG-BARANG DAN JASA-JASA/ Less Import of Goods and Services	471.691,25	512.668,17	553.880,52	628.351,98	2.166.591,92	639.034,81	649.823,19	670.135,08	693.649,24	2.652.642,32	719.978,36
Jumlah/ Total	10.154.023,62	10.584.326,69	11.225.819,85	12.710.399,08	44.674.569,24	12.744.925,43	12.899.561,29	13.130.726,67	13.274.810,97	52.050.024,36	13.734.921,27

*) Angka Diperbaiki

**) Angka Sementara

***) Angka Sangat sementara

LAMPIRAN 4
PDRB MENURUT PENGGUNAAN PROPINSI SUMATERA BARAT ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000
TRIWULANAN TAHUN 2005-2007

Jenis Penggunaan/ Type of Expenditure	Tahun 2005**)				Total 2005 **	Tahun 2006 **)				Total 2006 **	Tahun 2007 ***)
	TRW. I	TRW. II	TRW. III	TRW. IV		TRW. I	TRW. II	TRW. III	TRW. IV		TRW. I
1. PENGELUARAN KONSUMSI RUMAHTANGGA/ Private Consumption Expenditure	3.987.034,71	4.044.296,85	4.120.844,63	4.209.711,63	16.361.887,82	4.218.072,74	4.263.408,55	4.305.012,87	4.329.758,84	17.116.253,00	4.318.204,22
A. MAKANAN/Food	2.541.084,26	2.582.017,43	2.637.272,60	2.703.222,21	10.463.596,50	2.709.158,17	2.734.543,68	2.758.021,32	2.768.177,40	10.969.900,57	2.763.561,49
B. NON MAKANAN/Non-Food	1.445.950,45	1.462.279,42	1.483.572,03	1.506.489,42	5.898.291,32	1.508.914,57	1.528.864,86	1.546.991,55	1.561.581,44	6.146.352,43	1.554.642,73
2. PENGELUARAN KONSUMSI LEMBAGA SWASTA NIRLABA/ Non-profit Institution Consumption Expenditure	67.434,91	68.763,38	70.737,55	72.398,04	279.333,88	72.203,23	72.411,30	72.635,13	72.715,42	289.965,08	72.438,91
3. PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH/ Government Consumption Expenditure	852.164,07	866.732,67	880.170,26	897.353,79	3.496.420,79	904.814,42	913.922,68	922.705,04	930.412,28	3.671.854,42	938.902,49
4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO/ Gross Domestic Fixed capital Formation	1.315.721,63	1.333.932,97	1.356.499,42	1.381.980,57	5.388.134,59	1.384.076,77	1.392.855,96	1.406.976,36	1.420.736,78	5.604.645,87	1.412.345,57
5. PERUBAHAN STOK/Change in Stock	-133.887,36	-143.759,20	-166.729,82	-166.625,56	-611.001,94	-153.296,46	-115.323,94	-134.963,72	-179.226,92	-582.811,03	-156.255,44
6. EKSPOR BARANG-BARANG DAN JASA-JASA/ Export of Goods and Services	1.363.966,87	1.418.713,57	1.502.673,54	1.536.466,72	5.821.820,70	1.598.028,87	1.602.128,75	1.685.678,48	1.760.218,29	6.646.054,39	1.829.859,17
7. DIKURANGI IMPOR BARANG-BARANG DAN JASA-JASA/ Less Import of Goods and Services	351.945,32	379.050,32	408.828,70	437.290,97	1.577.115,31	439.345,90	444.058,65	452.992,60	460.087,64	1.796.484,79	464.037,06
Jumlah/ Total	7.100.489,51	7.209.629,92	7.355.366,88	7.493.994,22	29.159.480,53	7.584.553,68	7.685.344,66	7.805.051,56	7.874.527,05	30.949.476,95	7.951.457,86

*) Angka Diperbaiki

**) Angka Sementara

***) Angka Sangat sementara

Indeks Harga Konsumen Kota Padang (Tahun Dasar 2002)

Akhir Periode	BAHAN MAKANAN	MAKANAN JADI	PERUMAHAN	SANDANG	KESEHATAN	PENDIDIKAN	TRANSPORT	U M U M	
								IHK	Perub. (%)
2004									
Okt	106,96	114,22	118,87	113,84	106,96	116,12	109,05	111,94	0,19%
Nov	109,81	116,17	119,16	116,20	106,96	116,12	109,89	113,52	1,41%
Des	113,05	118,08	120,51	116,90	106,45	116,12	109,92	115,18	1,46%
2005									
Jan	120,94	118,25	121,35	116,51	106,45	116,12	110,42	117,91	2,37%
Feb	120,78	118,20	121,53	116,36	106,53	116,10	110,61	117,90	-0,01%
Mar	127,41	122,95	121,86	117,95	106,53	116,49	124,76	123,01	4,33%
Apr	125,57	125,11	122,08	118,04	106,53	116,49	124,76	122,84	0,14%
Mei	121,11	124,33	122,01	118,28	108,37	116,48	125,49	121,79	-0,85%
Jun	120,46	125,02	121,95	118,50	108,45	116,48	125,49	121,39	-0,33%
Jul	124,40	125,13	121,98	119,66	108,10	116,63	125,49	122,75	1,12%
Agst	124,83	126,50	122,19	120,76	107,93	116,83	125,55	123,25	0,41%
Sep	127,39	128,28	122,50	122,79	109,45	116,91	126,22	124,73	1,20%
Okt	142,24	133,67	131,95	126,26	110,22	118,81	164,86	138,12	10,74%
Nov	148,26	135,72	132,35	126,80	111,89	126,55	164,90	141,04	2,11%
Des	140,68	135,62	132,57	127,99	111,97	126,55	164,86	138,76	-1,62%
2006									
Jan	136,36	135,76	132,49	129,59	112,60	126,56	164,57	137,50	-0,91%
Feb	136,50	139,49	135,58	129,26	113,68	126,56	165,29	138,90	1,02%
Mar	138,79	142,98	135,60	128,70	118,15	126,69	165,65	140,39	1,07%
Apr	135,44	143,00	138,68	130,90	118,15	126,88	165,66	140,13	-0,19%
Mei	135,08	143,00	139,01	135,39	117,68	127,23	166,00	140,47	0,24%
Jun	135,53	143,05	142,13	135,50	117,94	128,68	166,17	141,38	0,65%
Jul	136,51	147,40	142,89	137,02	118,19	128,76	166,22	142,70	0,93%
Agst	130,75	147,42	143,09	138,15	118,12	135,70	166,31	141,45	-0,88%
Sep	134,67	147,31	143,76	136,58	118,32	135,71	166,33	142,70	0,88%
Okt	140,13	150,29	144,14	138,20	121,06	135,79	166,33	145,23	1,77%
Nov	140,39	151,38	144,29	139,49	120,60	136,17	166,30	145,62	0,27%
Des	151,63	153,41	146,26	139,39	120,17	136,17	166,61	149,93	2,96%
2007									
Jan	155,42	156,19	147,05	138,93	120,43	136,79	167,12	151,84	1,27%
Feb	159,53	157,21	147,63	140,75	120,55	136,79	167,17	153,57	1,14%
Mar	165,09	157,44	147,71	141,01	120,65	136,79	167,44	155,45	1,22%

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat

LAMPIRAN 6
Inflasi Kota Padang Berdasarkan Kelompok Barang & Jasa
(Tahun Dasar 2002)

Kelompok / Subkelompok	IHK		Perubahan q-t-q
	Des 2006	Mar 2007	
UMUM	149,93	155,45	3,68%
BAHAN MAKANAN	151,63	165,09	8,88%
Padi-padian, Ubi-ubian dan Hasil-hasilnya	169,12	206,64	22,19%
Daging dan Hasil-hasilnya	115,85	111,48	-3,77%
Ikan Segar	121,72	141,2	16,00%
Ikan Diawetkan	121,66	133,49	9,72%
Telur, Susu & Hasil-hasilnya	124,76	121,39	-2,70%
Sayur-sayuran	157,54	167,6	6,39%
Kacang-kacangan	162,03	161,23	-0,49%
Buah-buahan	159,62	142,95	-10,44%
Bumbu-bumbuan	225,08	224,96	-0,05%
Lemak & Minyak	131,96	163,21	23,68%
Bahan makanan lainnya	122,48	127,3	3,94%
MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU	153,41	157,44	2,63%
Makanan Jadi	163,69	168,3	2,82%
Minuman yang Tidak Beralkohol	144,43	147,5	2,13%
Tembakau & Minuman Beralkohol	139,8	143,32	2,52%
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR	146,26	147,71	0,99%
Biaya Tempat Tinggal	137,57	139,06	1,08%
Bahan Bakar, Penerangan & Air	184,46	184,46	0,00%
Perlengkapan Rumah Tangga	119,57	124,35	4,00%
Penyelenggaraan Rumah Tangga	114,42	115,93	1,32%
SANDANG	139,39	141,01	1,16%
Sandang Laki-laki	119,64	119,75	0,09%
Sandang Wanita	126,8	127,37	0,45%
Sandang Anak-anak	127,85	128,03	0,14%
Barang Pribadi, Sandang lainnya	179,81	184,95	2,86%
KESEHATAN	120,17	120,65	0,40%
Jasa Kesehatan	135,93	137,68	1,29%
Obat-obatan	113,7	116,04	2,06%
Jasa Perawatan & Jasmani	147,89	149,82	1,31%
Perawatan Jasmani & Kosmetik	112,9	112,49	-0,36%
PENDIDIKAN, REKREASI & OLAHRAGA	136,17	136,79	0,46%
Jasa Pendidikan	153,98	153,98	0,00%
Kursus Pelatihan	102,93	123,86	20,33%
Perlengkapan/Peralatan Pendidikan	119,69	119,69	0,00%
Rekreasi	107,18	105,94	-1,16%
Olahraga	113,05	113,05	0,00%
TRANSPORT, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN	166,61	167,44	0,50%
Transportasi	181,23	182,24	0,56%
Komunikasi & Pengiriman	122,44	122,44	0,00%
Sarana & Penunjang Transportasi	153,64	155,56	1,25%
Jasa Keuangan	139,54	139,54	0,00%

Halaman ini sengaja dikosongkan